

RESPON ASEAN TERHADAP PERMASALAHAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR

Astiwi Inayah, Gita Karisma ^{a,1}

^a Universitas Lampung, Jalan Prof. Soemantri Brodjonegoro No. 1,
Bandar Lampung, 34597, Indonesia
astiwi.inayah@fisip.unila.ac.id¹

ABSTRAK

Isu pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya tidak hanya berdampak di domestik negara Myanmar, namun berdampak hingga ke kawasan. Situasi dan kondisi ini menjadi tantangan bagi upaya ASEAN dan negara anggotanya untuk menjadi kawasan yang turut serta dalam promosi dan penegakan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana respon ASEAN terhadap isu pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Konsep HAM digunakan oleh peneliti untuk dapat memahami konteks permasalahan ini secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dihimpun melalui kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN tidak banyak melakukan langkah tegas dan tidak dapat mengambil tindakan hukum yang mengikat dikarenakan beberapa norma netralitas di Asia Tenggara seperti non intervensi dan konsensus. ASEAN lebih memilih melakukan pendekatan *soft way*. Pendekatan *soft way* dalam bentuk *tiptoe style of diplomacy* yang dipilih ASEAN disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, untuk membuat Myanmar merasa sebagai bagian dan teman ASEAN sehingga diharapkan lebih terbuka. Kedua, agar Tiongkok tidak mengambil Myanmar. Ketiga, untuk menjaga prinsip dalam TAC dan menghindari konflik antaranggota ASEAN. Peran ASEAN nyatanya memang sulit diharapkan sehingga membawa dampak pada sikap masing masing negara anggota ASEAN yang memiliki kebijakan berbeda dalam merespon isu pengungsi Rohingya.

Kata kunci: Respon, ASEAN, HAM, Rohingya

ABSTRACT

The issue of human rights violations against the Rohingya does not only affect the domestic state of Myanmar, but also has an impact on the region. This situation and condition become a challenge for ASEAN and its member countries' efforts to become a region that participates in promoting and upholding human rights. This study aims to explain how ASEAN's response to the issue of human rights violations against the Rohingya ethnicity. The concept of human rights is used by researchers to be able to understand the context of this problem in more depth. This research uses descriptive qualitative method. Data were collected through literature review. The results show that ASEAN has not taken many decisive steps and cannot take binding legal action due to several neutrality norms in Southeast Asia such as non-intervention and consensus. ASEAN prefers to take a soft way approach. The soft way approach in the form of a tiptoe style of diplomacy chosen by ASEAN is caused by several things. First, to make Myanmar feel part of and a friend of ASEAN so that it is expected to be more open. Second, so that China does not take Myanmar. Third, to maintain the principles in the TAC and avoid conflicts between ASEAN members. The role of ASEAN is in fact difficult to expect so that it has an impact on the attitude of each ASEAN member country which has different policies in responding to the issue of Rohingya refugees.

Keywords: Response, ASEAN, Human Rights, Rohingya

1. PENDAHULUAN

Masalah kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Rohingya di Myanmar mendapatkan perhatian masyarakat internasional. Konflik yang meningkat antara Buddha Arakan dengan muslim Rohingya menggambarkan ketidak-seriusan pemerintah Myanmar dalam menegakkan hukum dan HAM (Wibisono, 2013). Insiden pembunuhan oleh masyarakat Buddhis Arakan terhadap 10 orang etnis Rohingya mengawali peningkatan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh muslim Rohingya. Kelompok Buddhis Arakan yang didukung oleh pendeta Buddha lokal dan badan keamanan Myanmar melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap muslim Rohingya secara sistematis. Berbagai tindakan kekerasan tersebut meliputi pemukulan, pemenggalan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, pengusiran dan isolasi bantuan ekonomi. Berbagai tindakan kekerasan dilakukan untuk mengusir etnis Rohingya keluar dari Myanmar (Aungsan, 2012).

Kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Arakan ini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Myanmar, terutama dalam hal perlindungan terhadap keberlangsungan hidup etnis Rohingya dan penegakan hukum terhadap pelaku aksi kekerasan. Pemerintah Myanmar dianggap sengaja mengambil kebijakan yang diskriminatif terhadap muslim Rohingya dan adanya dugaan upaya pembersihan etnis (*ethnic purifying*) yang dilakukan oleh badan keamanan Myanmar kepada etnis Rohingya (Analysis, 2013).

Salah satu akar konflik tersebut adalah status etnis minoritas Rohingya yang masih dianggap imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar tidak mengakui dan tidak memberi status kewarganegaraan kepada mereka. Pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap mereka bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, bahwa Myanmar tidak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh. Tidak adanya kewarganegaraan ini menyebabkan etnis Rohingya tak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak (Hartati, 2013).

Permasalahan ini mendapat perhatian masyarakat internasional, mulai dari masalah pengungsian besar-besaran ke Bangladesh, tenggelamnya kapal pengangkut pengungsi yang melibatkan angkatan laut Thailand, hingga terjadinya konflik sektarian antara etnis Muslim Rohingya dan penganut Budha di negara bagian Rakhine. *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai institusi lokal bagi negara di kawasan Asia Tenggara berupaya untuk membantu mencari penyelesaian atas permasalahan ini. ASEAN telah mengadopsi prinsip penegakan HAM melalui dibentuknya ASEAN Intergovernmental Commission on

Basic freedoms (AICHR) pada tahun 2009. Salah satu fungsi pembentukan AICHR adalah untuk memberikan informasi dari negara anggota untuk mendorong promosi dan perlindungan HAM.

Dilema penegakan HAM di skala kawasan pada umumnya dan di negara Myanmar pada khususnya muncul karena ASEAN Charter memberikan dasar hukum bagi prinsip non-intervensi yang membuat ASEAN tidak memiliki legitimasi dan otoritas yang cukup untuk mengintervensi masalah konflik dan pelanggaran HAM di dalam negara anggotanya. Prinsip non-intervensi ada dalam pasal 2 Piagam ASEAN (Charter, 2008). Doktrin ini dinilai menghambat penerapan hukum HAM dalam lingkup lokal dan memungkinkan negara untuk melakukan penyalahgunaan terhadap perlindungan HAM tanpa adanya pengawasan dan hukuman oleh ASEAN (Aguirre, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana respon ASEAN terhadap permasalahan etnis Rohingya di Myanmar. Konsep HAM digunakan oleh peneliti untuk dapat memahami konteks permasalahan ini secara lebih mendalam. HAM adalah persoalan yang bersifat universal tetapi sekaligus juga kontekstual. Meskipun HAM itu bersifat universal, namun pelaksanaan HAM tidak dapat disamaratakan antara satu negara dengan negara yang lain. Masing-masing negara mempunyai perbedaan konteks sosial, kultural, maupun hukumnya. Di samping itu pengalaman sejarah dan perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi HAM itu dilaksanakan. Keuniversalan HAM dewasa ini masih mengundang perdebatan dan perbedaan dalam praktek penerapannya di antara masing-masing anggota ASEAN.

James Nickel menyatakan bahwa dalam kehidupan bernegara HAM merupakan norma yang bersifat politis yang pada umumnya terkait dengan bagaimana orang seharusnya diperlakukan oleh negara dan institusi-institusinya. Sehingga pemerintah di tataran domestik diberikan kewenangan untuk melakukan variasi kebijakan yang sesuai dengan konteks di mana HAM diterapkan (Nickel, 2016). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM. Sifat HAM sebagai norma yang sangat diprioritaskan yang berarti sekelompok norma yang sangat pokok dan pelanggaran terhadapnya merupakan serangan serius atas keadilan (Iskandar, 2012)

Karel Vasak mengelompokkan konsep HAM menjadi tiga generasi sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan melengkapi (Vasak, 1977). Generasi pertama konsep HAM terkait dengan hak sipil dan politik yaitu hak liberal untuk tidak dicampuri dan hak partisipasi demokratis yang ada dalam konsep HAM klasik. Jenis pelanggaran HAM generasi pertama yang dihadapi etnis Rohingya adalah pembatasan agama, politik, hak milik, status kewarganegaraan, hingga tindak penganiayaan oleh negara. Generasi kedua adalah konsep HAM yang mengharmonisasikan kepentingan individu (hak sipil-politik) dan kolektif (hak

ekonomi, sosial dan budaya). Status kewarganegaraan dan hukum etnis Rohingya yang tidak diakui negara menyebabkan sejumlah hak atas jaminan sosial, pekerjaan yang layak serta pendidikan anak begitu dibatasi dan terdiskriminasi. Pelanggaran dilakukan oleh pihak negara dan juga oleh kelompok masyarakat lainnya. Sementara generasi ketiga konsep HAM berkaitan dengan hak kolektif masyarakat yaitu hak dasar untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan. Hak pokok dari generasi ini adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (hak rakyat terjajah atas kemerdekaan politik dari penjajahan), kebebasan untuk mengatur sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas warisan budaya, dan hak atas lingkungan hidup yang baik (Nowak, 2003).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Data dihimpun di dalam penelitian ini melalui kajian kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari pelbagai literatur yang relevan, berupa buku, jurnal, ataupun artikel ilmiah lainnya. Data sekunder itu mencakup berbagai respon ASEAN terhadap permasalahan etnis Rohingya di Myanmar. Semua data sekunder terkait dengan respon ASEAN terhadap permasalahan etnis Rohingya di Myanmar dianalisis sebagai bagian dari *text and document analysis*. Dengan mengutip pandangan Weber serta Moyser dan Wagstaffe, Margaret G. Hermann menjelaskan bahwa analisis konten berkaitan dengan upaya ‘*a set of procedures to make inferences from text*’; ia juga merupakan suatu metode yang ‘*capable of throwing light on the ways [people] ... use or manipulate symbols and invest communication with meaning*’ (Hermann, 2008). Peneliti memandang teknik ini relevan karena riset ini berkaitan dengan bagaimana respon ASEAN terhadap permasalahan etnis Rohingya di Myanmar.

3. PEMBAHASAN

Respon ASEAN Terhadap Permasalahan Etnis Rohingya di Myanmar

Permasalahan etnis Rohingya menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi ASEAN sebagai sebuah institusi regional di kawasan Asia Tenggara. Konflik ini dapat membawa dampak terhadap stabilitas keamanan Asia Tenggara. Berdasarkan pemaparan pada bagian permasalahan etnis Rohingya di Myanmar maka *pertama*, masalah Rohingya berkaitan dengan konflik etnis yang mempunyai keterkaitan dengan penegakan demokrasi dan HAM di Myanmar; *kedua*, masalah ini telah membawa masalah baru yaitu eksodus etnis Rohingya yang menyebabkan kawasan Asia Tenggara menghadapi masalah pengungsi.

Posisi Arakhan yang ada di pinggiran pantai membuat mayoritas Rohingya dapat meninggalkan Myanmar dengan menggunakan jalur laut. Hal tersebut membawa para pengungsi Rohingya ke Indonesia dan Thailand yang berbatasan laut dengan Myanmar. Status pengungsi menjadi permasalahan bagi pengungsi itu sendiri dan juga bagi sebagian besar negara di Asia Tenggara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Penanganan ASEAN terhadap masalah ini menjadi cukup penting. Upaya ASEAN tersebut setidaknya akan memperlihatkan kredibilitas ASEAN dalam menegakan HAM sekaligus akan membuktikan kemampuan ASEAN sebagai institusi dalam mencegah agar masalah Rohingya tidak menjadi konflik antarnegara dan mengancam keamanan di Asia Tenggara. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai respon ASEAN dalam menghadapi masalah Etnis Rohingya.

Respon ASEAN dalam Menghadapi Masalah Rohingya

Masalah etnis Rohingya sebetulnya bukan persoalan baru. Sejak tahun 1978 dan bulan Mei 1991 hingga Maret 1992, terjadi bentrokan antara etnis Arakan bersama militer Myanmar dengan etnis Muslim. Konflik kembali terjadi pada Juni dan Oktober 2012. Pada tahun 2012, konflik ini mulai menyita perhatian internasional. Beberapa di antaranya mengecam konflik yang ada di Rakhine, Myanmar ini. Sentimen negatif muncul di Iran dan menyatakan bahwa etnis Rakhine telah melakukan upaya pembantaian terhadap umat muslim yang ada di sana (Ayatollah, 2012). Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan PBB juga mengutuk kekerasan yang dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya (Agustina, 2012).

Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa khusus HAM yang dipimpin oleh Tomas Ojea Quintana pernah mengusulkan pembentukan komisi penyelidikan pelanggaran HAM berat atas kelompok-kelompok etnis di Myanmar. Namun, Pemerintah Myanmar saat itu menolak memberi akses kepada utusan PBB tersebut untuk masuk ke wilayah mereka. Pada saat itu ASEAN sebagai organisasi regional meminta penjelasan secara menyeluruh kepada Myanmar terkait masalah tersebut. ASEAN menyerukan agar Myanmar tidak bersikap diskriminatif dan dapat menyelesaikan masalah etnis tersebut secepatnya dengan menghormati prinsip demokrasi dan HAM (Baus, 2012).

Pada tahun 2012 ASEAN menerapkan prinsip diplomasi dan dialog. Wakil Indonesia untuk Komisi Antarpemerintah Hak Asasi Manusia ASEAN, Rafendi Djamin, menyebut diplomasi ASEAN sebagai diplomasi senyap. Menurutnya, ASEAN menerapkan prinsip diplomasi senyap dalam menangani persoalan seperti biasanya (ASEAN, 2012). Pada saat PBB ingin membentuk komisi penyelidikan, ASEAN juga membantu PBB agar dapat membujuk Myanmar. Hingga akhirnya tim PBB dapat masuk ke Rakhine pada akhir Juli 2012.

ASEAN nampak tidak diam dalam menanggapi isu pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ini, namun pada akhirnya langkah ASEAN untuk terlibat dalam penanganan masalah ini tetap bergantung pada keinginan pemerintah Myanmar sendiri. Sekretaris Jenderal ASEAN saat itu, Surin Pitsuwan, menyatakan bahwa pihaknya kembali membuat proposal pemberian bantuan kemanusiaan ke Myanmar, namun tetap bergantung pada keinginan pemerintah Myanmar sendiri. Ia mengatakan bahwa ASEAN hanya bisa menawarkan bantuan sekaligus mendukung upaya negara lain yang menawarkan bantuan terhadap pengungsi Rohingya (ASEAN, 2012).

Pada akhir tahun 2015, masalah etnis Rohingya kembali mengemuka. Asia Tenggara dihadapkan pada masalah eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya. Hal ini menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap negara-negara sekitar yang didatangi pengungsi. Negara-negara anggota ASEAN terutama Indonesia, Thailand, dan Malaysia menghadapi dilema antara memperlakukan etnis Rohingya sebagai pengungsi korban diskriminasi atau sebagai imigran ilegal. ASEAN dalam hal ini tidak banyak melakukan langkah tegas dan tidak dapat mengambil tindakan hukum yang mengikat karena beberapa norma netralitas di Asia Tenggara seperti non intervensi dan konsensus. Pada akhirnya beberapa negara anggota ASEAN memilih bereaksi dengan caranya masing-masing.

Prinsip Non Intervensi ASEAN dalam Masalah Rohingya

ASEAN sangat memperhatikan prinsip non-intervensi dan ASEAN memilih untuk meredam perselisihan sesuai dengan *Treaty Of Amity and Cooperation in South East Asia* (TAC). Langkah ASEAN dalam menyelesaikan masalah Myanmar yang sering digugat dan dinilai lambat oleh dunia internasional sedikit demi sedikit mulai menunjukkan hasil. Kebijakan dialog dengan menjunjung prinsip non intervensi perlahan membawa wajah baru bagi Myanmar yang lebih terbuka dan beritikad baik untuk memulai proses demokrasi di dalam negeri. Misalnya dengan mengadakan Pemilihan Umum pada tahun 2011 yang mengizinkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aug San Suu Kyi turut serta. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah sikap non intervensi ini juga cukup efektif untuk mengatasi masalah etnis Rohingya.

Pada kenyataannya jumlah pengungsi Myanmar terus bertambah. Dalam forum-forum pembicaraan misalnya pada Mei 2015, fokus pembicaraan ialah tentang penanganan masalah tanpa meninjau akar masalah. Sikap ASEAN ini menunjukkan bahwa ASEAN sangat berhati-hati dan memilih untuk tidak keras atau terlalu kritis menghadapi Myanmar. Sejauh ini, hal yang bisa dilakukan oleh ASEAN adalah menyatakan isu Myanmar adalah "masalah ASEAN" sebagai upaya penolakan terhadap intervensi yang berlebihan dari negara atau institusi

lain di luar kawasan dan menyelesaikan masalah Myanmar melalui pendekatan dialog yang sangat hati-hati.

Jika pendekatan Barat adalah dengan memberikan berbagai sanksi. Maka ASEAN yang lebih memilih melakukan pendekatan *soft way*. ASEAN adalah institusi yang bersifat *less institutionalized* sehingga secara legalitas tidak terlalu mengikat. Hal ini memberikan keuntungan bagi Myanmar. Namun justru sikap lunak ASEAN dalam menghadapi masalah yang terjadi di dalam negeri Myanmar yang dapat secara perlahan mendorong perubahan. Prinsip non-intervensi yang dijunjung ASEAN lebih menekankan pada pendekatan diplomatik dan kekeluargaan. Pendekatan secara halus dianggap lebih produktif daripada memberikan sanksi kepada Myanmar. Pendekatan *soft way* lebih menitikberatkan pada proses meyakinkan pemerintah berkuasa Myanmar bahwa ASEAN akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. ASEAN lebih menempatkan diri sebagai arena untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi, bukan sebagai aktor utama yang berhak melakukan tindakan kepada negara anggotanya.

Melalui forum-forum yang dimiliki, ASEAN diharapkan dapat membuat Myanmar untuk mulai membuka diri dan berhubungan dengan dunia internasional. Misalnya ASEAN Regional Forum (ARF) yang berperan sebagai wahana untuk melakukan dialog mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, termasuk memasukkan agenda pentingnya yaitu memajukan demokrasi. ARF menjadi penting karena merupakan forum di level pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh negara kuat di Asia Pasifik, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa. Ini dapat mendorong Myanmar untuk memperbaiki sistem pemerintahan domestiknya.

Selanjutnya ada Bali Democracy Forum (BDF) yang semakin lama partisipan di dalamnya semakin meningkat. BDF adalah forum dialog antar pemerintah dimana negara-negara dapat berbagi pengalaman, pandangan, dan praktik-praktik terbaik dalam memajukan demokrasi di kawasan Asia pada khususnya dan tataran dunia pada umumnya. Untuk mendukung forum maka dibentuklah Institute for Peace and Democracy (IPD) sebagai lembaga pelaksana bagi hasil-hasil forum BDF. BDF menjadi wadah untuk *sharing experience* yang nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan positif mengenai pelaksanaan demokrasi di masing-masing negara. Forum ini menjadi momentum yang bersejarah dimana perwakilan negara-negara di Asia berbicara tentang demokrasi yang sebelumnya masih menjadi isu yang sensitif di kawasan ini. Untuk itu, forum ini dinilai sangat penting karena tidak hanya dihadiri oleh negara-negara demokrasi tetapi juga negara-negara yang mempunyai aspirasi untuk memajukan demokrasi. BDF pertama berlangsung pada tanggal 10-11 Desember 2008 di Bali.

Seluruh negara ASEAN mengirimkan delegasinya (termasuk Myanmar) dan negara-negara kawasan Asia lainnya seperti Tiongkok, Jepang, dan India.

Selain mengandalkan diplomasi multilateral, ASEAN juga menekankan pentingnya melakukan diplomasi bilateral untuk menunjang berbagai forum multilateral. Hubungan antarpemimpin dalam berbagai forum maupun informal serta kunjungan luar negeri turut memberi pengaruh secara tidak langsung terhadap sikap Myanmar. Myanmar akan merasa jauh lebih dihargai karena diperlakukan sebagai teman, bukan lawan.

1.1.1 Strategi ASEAN

Secara umum, garis kebijakan yang diambil ASEAN dalam menghadapi Myanmar ialah dengan pendekatan *tiptoe style of diplomacy*. Maksud diplomasi *tiptoe* ini adalah ASEAN akan melakukan pendekatan dengan memilih jalan dialog, baik secara multilateral maupun bilateral. Ini artinya ASEAN tidak mengharapkan hasil sekaligus melainkan perubahan sedikit demi sedikit dari pemerintah Myanmar. Diplomasi ASEAN ini merupakan bentuk pendekatan yang lebih lunak (*soft way*) dibandingkan pendekatan organisasi internasional lainnya seperti PBB atau negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Pendekatan *soft way* dalam bentuk *tiptoe style of diplomacy* yang dipilih ASEAN sangat penting dan cukup tepat dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, apabila ASEAN juga memilih bersikap keras terhadap Myanmar atau memilih jalan sanksi dan mengucilkan Myanmar dari ASEAN, maka Myanmar akan merasa bahwa ASEAN merupakan musuh. Akan semakin sulit bagi ASEAN sebagai organisasi regional untuk menyelesaikan masalah Myanmar, apalagi untuk mendorong Myanmar lebih terbuka terhadap ASEAN. Selanjutnya ASEAN justru akan semakin dipandang sebelah mata karena tidak bisa menyelesaikan masalah internal kawasan. Hal ini akan membuat kredibilitas ASEAN dipertanyakan oleh dunia internasional.

Kedua, jika ASEAN memilih mengucilkan Myanmar atau tidak merangkul Myanmar maka Myanmar bisa bersikap makin keras atau menganggap ASEAN sebagai lawan. Myanmar akan merasa sendiri dan menjadi dekat dengan Tiongkok. Tiongkok sebagai negara yang semakin besar di kawasan Asia Pasifik akan melihat kesempatan ini dan akan melirik Myanmar. Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam melihat kedekatan Myanmar dan Tiongkok ini. Kawasan Asia Tenggara memang merupakan kawasan yang cukup diperhitungkan oleh negara-negara besar karena secara strategis maupun ekonomi, kawasan Asia Tenggara bernilai sangat penting. Asia Tenggara merupakan salah satu jalur transportasi dan juga pasar penting bagi Tiongkok. Amerika Serikat tidak akan begitu saja membiarkan Tiongkok mendominasi kawasan ini. AS bahkan juga melibatkan Australia untuk ikut mengawasi keterlibatan Tiongkok di kawasan ini.

Kekhawatiran akan munculnya koalisi antara Myanmar dan Tiongkok bukan saja menjadi hal yang tidak diinginkan oleh Amerika Serikat, namun lebih jauh juga tidak diharapkan oleh ASEAN. Kedekatan antara Myanmar dan Tiongkok justru dapat menghancurkan stabilitas ASEAN. ASEAN sering menyebutkan bahwa cita-cita ASEAN adalah menciptakan kawasan damai dan terintegrasi melalui pembangunan demokrasi dan HAM di kawasan ASEAN (berdasarkan ASEAN Charter Bab I, Pasal 1, Ayat 7). Hubungan antara Tiongkok dan Myanmar akan merusak stabilitas yang selama ini ASEAN coba bangun melalui strategi *hedging*-nya. ASEAN dalam hal ini senantiasa berupaya menjaga hubungan baik dengan masing-masing *external powers* dan merangkul *great powers*, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Baik AS maupun Tiongkok, keduanya sama-sama dilibatkan dalam hampir semua kerjasama Asia Tenggara, contohnya melalui ARF dan ASEAN + 3 (Goh, 2008). Jika netralitas ASEAN pecah dan ASEAN terpecah, maka bukan tidak mungkin masa depan kawasan ASEAN akan terancam baik secara ekonomi maupun keamanan. Merangkul Myanmar bagi ASEAN sangat penting sebagai upaya untuk mempertahankan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang bisa menjaga keseimbangan perselisihan antarnegara *big powers*.

Ketiga, sikap hati-hati ASEAN sangat beralasan sejalan dengan prinsip ASEAN dalam TAC yang lahir pada 24 Februari 1976. Dalam TAC disebutkan bahwa norma yang seharusnya dijalankan antarnegara ASEAN ialah *mutual respect* dan *non-interference*. Dua norma tersebut menjadi alasan penting bagi ASEAN, bukan hanya dalam rangka menjaga prinsip TAC saja namun lebih dari pada itu. Catatan sejarah yang terjadi antarnegara ASEAN dari sejak sebelum ASEAN terbentuk hingga berkembang sampai saat ini telah menggambarkan bagaimana permusuhan antarnegara. Misalnya sengketa antara Malaysia dan Filipina dalam sengketa Sabah.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bagaimana pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di negara Myanmar tapi hampir pernah dialami oleh negara anggota ASEAN lainnya. Misalnya, di Malaysia. Isu pelanggaran terhadap hak-hak politik setiap warga negara lumrah dilakukan oleh partai penguasa United Malays National Organization (UMNO) terhadap lawan-lawan politiknya dalam setiap pemilihan umum, seperti meng kriminal Anwar Ibrahim dengan tuduhan kejahatan sodomi. Di Indonesia, kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi dalam beragama bentuk kekerasan, misalnya kasus penculikan dan penghilangan secara paksa para aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997. Dengan adanya berbagai kasus pelanggaran HAM seperti di atas dan masih statisnya negara anggota ASEAN dalam memaknai konsep *non-interference* (negara tidak boleh mengintervensi kebijakan negara lain) maka tidak mengherankan apabila sejumlah pihak, terutama masyarakat Barat, menyebut praktik penghormatan HAM di ASEAN

lamban, rentan disalahgunakan, lemah, tercemar korupsi, dan sebagainya. Hal ini pun menjadikan implementasi penegakan HAM tergolong rendah.

Kurang adil rasanya jika antarnegara ASEAN saling menuding dan merasa “paling bersih” di antara yang lain. Sikap seperti ini justru akan memperburuk kondisi, bahkan bisa menyulut konflik yang sejak lama telah dimiliki oleh antaranggota ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN berikut negara-negara di dalamnya cenderung lebih bersikap hati-hati dan lunak terhadap Myanmar.

Antara Dialog dan Kebijakan Berbeda dari Masing-Masing Negara Anggota

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya ASEAN untuk menegakkan demokrasi dan HAM masih dalam tahap promosi dan belum sampai pada tahap *monitoring*. Promosi yang dilakukan ASEAN khususnya dalam menghadapi kasus Myanmar dilakukan dengan pendekatan sangat hati-hati atau disebut dengan *tiptoe style of diplomacy*.

ASEAN melakukan pendekatan dengan merangkul Myanmar dan bukan malah mengucilkan atau memberikan sanksi. Oleh karena itu langkah yang dipilih ASEAN melalui dialog multilateral dan juga diplomasi bilateral. Secara perlahan, ASEAN “membujuk” Myanmar dan memberi tahu Myanmar akan kerugian jika tidak segera melakukan proses demokratisasi di dalam negeri.

Meskipun terus digugat dan diragukan kredibilitasnya dalam menyelesaikan masalah regionalnya, ASEAN tetap melakukan cara yang sangat hati-hati ini (*constructive engagement*) dalam menghadapi Myanmar. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, untuk membuat Myanmar merasa sebagai bagian dan teman ASEAN sehingga diharapkan lebih terbuka. Kedua, agar Tiongkok tidak mengambil Myanmar. Ketiga, untuk menjaga prinsip dalam TAC dan menghindari konflik antaranggota ASEAN.

Upaya penegakan demokrasi akan bergantung pada bagaimana ASEAN dapat menjadikan demokrasi sebagai nilai yang diterima bersama. Sulit untuk melembagakan demokrasi karena masing-masing negara di ASEAN pun memiliki masalah penegakan demokrasiya sendiri. Sulit bagi ASEAN mencapai satu komunitas dengan nilai demokrasi apabila masalah internal penegakan demokrasi di dalam ranah domestik belum dapat diatasi dan jika masih ada prinsip non intervensi karena ASEAN tidak akan memiliki daya paksa untuk menciptakan satu mekanisme *conflict resolution*.

Hingga saat ini ASEAN belum mencapai kemajuan dalam penegakkan HAM dan demokrasi. Dari segi visi, ASEAN telah memproyeksikan dirinya sendiri untuk menjadi suatu institusi yang terintegrasi, namun ASEAN belum mengubah interpretasi yang kaku terhadap prinsip kedaulatan dan non intervensi.

Hal ini menjadi hambatan bagi ASEAN untuk beranjak dari posisinya saat ini, terutama untuk menerapkan prinsip-prinsip baru dalam menegakkan demokrasi dan HAM (Jones & Smith, 2007).

Peran ASEAN nyatanya memang sulit diharapkan karenanya hal ini membawa dampak pada sikap masing masing negara anggota ASEAN yang memiliki kebijakan berbeda dalam merespon isu pengungsi Rohingya. Di satu sisi, sebagian negara menganggap bahwa etnis Rohingya merupakan imigran illegal. Namun di sisi lain, menerima etnis Rohingya sebagai pengungsi. Sebagian lainnya memberikan desakan bahwa Myanmar tetap harus bertanggung jawab terhadap masalah eksodus etnis Rohingya.

Instrumen ASEAN dalam Penegakan HAM

Isu HAM masih menjadi masalah yang sensitif di kawasan Asia Tenggara. Hal ini nampak dengan masih adanya sejumlah pelanggaran HAM di negara-negara anggota ASEAN. Institusionalisasi isu HAM merupakan upaya yang dilakukan ASEAN untuk melakukan penanganan krisis pelanggaran HAM yang terjadi di Asia Tenggara dengan lebih serius.

Prinsip utama dalam kerjasama ASEAN antara lain adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan (*equality*), tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Negara-negara anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar (*sovereignty*), sedangkan musyawarah (*consensus and consultation*), kepentingan bersama (*common interest*), dan saling membantu (*solidarity*) dengan semangat ASEAN merupakan ciri kerjasama ini. Namun, dalam kaitan ini yang menjadi persoalan kemudian hampir di setiap negara ASEAN memiliki persoalan terkait pelanggaran HAM, baik itu yang berat maupun ringan. Kondisi ini semakin diperparah dengan rendahnya komitmen negara-negara anggota dalam menyikapi isu-isu terkait HAM.

Dibentuknya *Working Group on ASEAN Human Rights Mechanism* (WGAHRM) yang beranggotakan tokoh-tokoh Asia Tenggara baik dari sektor pemerintahan maupun *civil society* menjadi upaya awal merintis mekanisme HAM di ASEAN. WGAHRM terdiri dari beberapa kelompok kerja nasional di Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura, dan Filipina. Walaupun bukan merupakan badan resmi ASEAN, WGAHRM telah bekerjasama dengan pemerintah beberapa negara anggota ASEAN dan menyelenggarakan beberapa *workshop* dan *roundtable discussion* untuk mempelajari kemungkinan pembentukan mekanisme HAM ASEAN dan memberikan rekomendasi ke pemerintah negara-negara ASEAN.

Pada tanggal 20 November 2007, dengan adanya *ASEAN Summit* ke-13 di Singapura maka dibentuklah ASEAN Charter. Melalui ASEAN Charter ini

kepedulian terhadap isu-isu HAM dinilai lebih komprehensif dibandingkan Deklarasi Bangkok karena terdiri dari pasal-pasal yang mengatur berbagai permasalahan di ASEAN. Misalnya dalam pasal 14 Piagam ASEAN disebutkan tentang pembentukan Badan HAM ASEAN yang diberi nama ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) pada tanggal 23 Oktober 2009. AICHR memiliki berbagai macam fungsi dalam penegakan HAM di ASEAN yang tercantum dalam poin ke-4 *Terms of Reference* (TOR) AICHR. Komitmen ASEAN terhadap HAM juga dapat dilihat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) dan *roadmap* komunitas ASEAN 2009-2015.

AICHR bertanggungjawab untuk perlindungan serta pemajuan HAM di ASEAN. Namun dalam perjalanan AICHR timbul pertanyaan terkait efektivitasnya untuk menegakkan HAM di wilayah ASEAN. Hal ini dikarenakan pasal 2 ayat 2 huruf e dalam ASEAN Charter menyebutkan adanya prinsip non-intervensi ke dalam persoalan internal negara-negara anggota ASEAN dan pasal 2 ayat 2 huruf f menyebutkan penghormatan terhadap hak-hak negara anggota dengan mengedepankan sikap bebas dari campur tangan asing, subversi, dan pemaksaan (*coercion*). Adanya pasal 2 ayat 2 huruf e dan f dari ASEAN Charter tersebut dikhawatirkan membuat penegakan HAM di ASEAN melalui AICHR tidak bisa berjalan efektif.

4. KESIMPULAN

Perluasan masalah etnis Rohingya tidak hanya menimbulkan dampak di domestik negara Myanmar, namun hingga di kawasan. Situasi dan kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya ASEAN dan negara anggotanya untuk menjadi kawasan yang ikut serta dalam mempromosikan dan menegakkan HAM. ASEAN memang tidak diam dalam menanggapi isu pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, namun pada akhirnya langkah ASEAN untuk terlibat dalam penanganan masalah ini tetap bergantung pada keinginan pemerintah Myanmar sendiri.

ASEAN tidak banyak melakukan langkah tegas dan tidak dapat mengambil tindakan hukum yang mengikat dikarenakan beberapa norma netralitas di Asia Tenggara seperti non intervensi dan konsensus. Pada akhirnya beberapa negara anggota ASEAN memilih bereaksi dengan cara masing-masing. Sejauh ini, hal yang bisa dilakukan oleh ASEAN adalah menyebut isu Myanmar adalah "masalah ASEAN" sebagai upaya penolakan terhadap intervensi yang berlebihan dari negara atau institusi lain di luar kawasan dan menyelesaikan masalah Myanmar melalui pendekatan dialog yang sangat hati-hati.

ASEAN memilih untuk melakukan pendekatan *soft way*. ASEAN adalah institusi yang bersifat *less institutionalized* sehingga secara legalitas tidak terlalu mengikat. Secara umum, garis kebijakan yang ditempuh ASEAN dalam

menghadapi Myanmar ialah dengan *tiptoe style of diplomacy*. Maksud diplomasi *tiptoe* ini ialah ASEAN akan melakukan pendekatan dengan jalan dialog baik secara multilateral maupun bilateral. Ini artinya ASEAN tidak mengharapkan hasil sekaligus melainkan perubahan sedikit demi sedikit dari pemerintah Myanmar.

Pendekatan *soft way* dalam bentuk *tiptoe style of diplomacy* yang dipilih ASEAN tersebut sebetulnya sangat penting dan cukup tepat. ASEAN tetap melakukan cara yang sangat hati-hati ini (*constructive engagement*) dalam menghadapi Myanmar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, untuk membuat Myanmar merasa sebagai bagian dan teman ASEAN sehingga diharapkan lebih terbuka. Kedua, agar Tiongkok tidak mengambil Myanmar. Ketiga, untuk menjaga prinsip dalam TAC dan menghindari konflik antaranggota ASEAN. Peran ASEAN nyatanya memang sulit diharapkan sehingga hal ini membawa dampak pada sikap masing masing negara anggota ASEAN yang memiliki kebijakan berbeda dalam merespon isu pengungsi Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

- Wibisono, A. N. (2013). ASEAN, Rohingya, dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar. *ejournal S1 Undip*. Retrieved from [ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/12035/11688](http://ejournal-s1.undip.ac.id:ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/12035/11688)
- Aungsan. (2012). *Salem news*. Retrieved from Salem news: <http://www.salem-news.com/articles/august112012/blood-trails-myanmar-tk.php>
- Analysis. (2013, Juli 26). *Reliefweb.int*. Retrieved from Reliefweb.int: <https://reliefweb.int/report/myanmar/analysis-search-regional-rohingya-solution>
- Hartati, A. Y. (2013). *Konflik Etnis Myanmar: Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah*. Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Charter, T. A. (2008). *Asean.org*. Retrieved from Asean.org: <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>
- Aguirre, D. (2013). Human Rights the ASEAN Way. *Jurist*.
- Nickel, J. (2016). *h2o law harvard*. Retrieved from h2o law harvard: https://h2o.law.harvard.edu/text_blocks/28861
- Iskandar, P. (2012). Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual. In P. Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual* (p. 51). Cianjur: Institute for Migrant Rights Press.

- Vasak, K. (1977). *Unesdoc.unesco.org*. Retrieved from Unesdoc.unesco.org: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000048063>,
- Nowak, M. (2003). *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*. Depkumham & Martinus Nijhoff Publisher.
- Hermann, M. G. (2008). Content Analysis. In A. Klotz, & D. Prakash, *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*. New York: Palgrave MacMillan.
- Ayatollah. (2012, Juli 28). *mataram.antaranews.com*. Retrieved from mataram.antaranews.com: <https://mataram.antaranews.com/berita/22673/ayatollah-kashani-membantai-rohingya-berarti-melawan-islam>
- Agustina, D. (2012, Agustus 3). *tribunnews.com*. Retrieved from tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/internasional/2012/08/03/tiga-rekomendasi-organisasi-konferensi-islam-untuk-rohingya>
- Baus, H. (2012, Juli 25). *Investor.id*. Retrieved from Investor.id: <https://investor.id/archive/asean-harapkan-penjelasan-myanmar-atas-konflik-rohingya>
- ASEAN. (2012, Agustus 9). *internasional.kompas.com*. Retrieved from internasional.kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2012/08/09/02590374/ASEAN.Tidak.Tinggal.Diam?page=all>
- Goh, E. (2008). Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Studies. *International Security*, 124-125.
- Jones, D. M., & Smith, M. L. (2007). Making Process, not progress : ASEAN and the evolving East Asian Regional Order. *International Security*, 148-184.

THE STRATEGY OF LOCAL GOVERNMENT IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF LAMPUNG SHRIMP EXPORT

Tety Rachmawati, Rahayu Lestari, Fisko Arya Kamandanu, Dani ^{a,1}

^a Universitas Lampung, Jalan Prof. Soemantri Brodjonegoro No. 1,
Bandar Lampung, 34597, Indonesia
tety.rachmawati@fisip.unila.ac.id¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategy of the local government in increasing the competitiveness of Lampung shrimp exports to be the National Shrimp Barn. The data was obtained by reviewing several primary and secondary documents and in-depth interviews with the Head of the Department of Marine Affairs and Fisheries in Lampung Province. In this study, we use a quantitative approach using RCA (Revealed Comparative Advantage) to find the competitiveness of Lampung shrimp export value and Diamond Porter theory to analyze the strategies in increasing the competitiveness of Lampung Shrimp Export. The results indicate that the competitiveness of Lampung shrimp exports is very strong. The strategy used by Lampung Government to increase the competitiveness of Lampung shrimp exports is by a collaboration between the central and district governments realized by providing access to capital through Kartu Petani Pintar (Smart Farmer Card), technical assistance by forming cross-sector Working Groups (Pokja), and intensive pond constructions in several areas in Lampung.

Keywords: *Competitiveness of shrimp export, Revealed Comparative Advantage, Local government's strategy.*

1. INTRODUCTION

Lampung is targeted to be the National Shrimp Barn because Lampung is one of the largest shrimp producing areas in Indonesia based on the results of the 2018 National Shrimp Cultivation Coordination Meeting in Bandar Lampung. This is a follow up on the President's orders to increase foreign exchange that one of which was through the export of shrimp commodities. Lampung supplies 40% of the national shrimp needs (Republika, 2018) and exports 2 trillion IDR in 2019 with the utilization of only 10% of the land (Republika, 2019). Shrimp also dominates exports with a percentage of 70% of Lampung's total exports (Republika, 2019). President Jokowi instructed to make a strategic plan for fishery production by prioritizing shrimp and tuna. In 2019, Indonesia was the fourth largest frozen shrimp exporter in the world with 17.2 billion USD or about 232.2 trillion IDR (Widowati, 2019). Shrimp contributes for about 42% of Indonesia's

balance of fisheries trade (Hadiyantono, 2018) and contributes 1.3 billion USD in foreign exchange or 36.96% of the total export value (Sholeh, 2018). The main destinations for Indonesian shrimp exports are the USA, Japan and the European Union countries.

In 2019, Lampung shrimp exports were only 144 thousand tons per year, while the government's target is to reach 450 thousand tons per year (Republika, 2019). Lampung shrimp exports are facing obstacles such as business licensing experienced by shrimp farmers in South Lampung (Republika, 2019) and shrimp diseases in several areas (Kompas, 2015). The land conversion in Pesisir Barat also affects Lampung shrimp exports (Republika, 2019). In addition, conflicts between shrimp farmers and companies such as those in Dipasena and Bratasena also affect shrimp production in Lampung. Besides, shrimp exports in the international market also faced obstacles that some countries have strict regulations on shrimp imports from Asia. For example, the European Union applies zero tolerance for the chloramphenicol content of shrimp products that enter the European Union. In addition, there are cases of rejection of Indonesian shrimp by USA because the shrimps contain salmonella and histamine, causing the shrimp to have a bad smell and pale color.

Regarding these problems, comprehensive efforts are needed to increase the competitiveness of Indonesian shrimp exports in the international market. This is because countries with high competitiveness can dominate the international market. According to Laursen (2015), many countries produce the same products with better quality so that the competition in the global market is getting tighter (Laursen, 2015). By increasing the competitiveness of shrimp in the quantity and quality of shrimp production, Indonesia can dominate the international market. Therefore, a strategy of the Lampung Provincial Government is needed to increase the competitiveness of Lampung shrimp exports. So, the government's target to make Lampung as a national shrimp barn can be realized.

2. LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT

This study refers to several previous studies. First, Ririn Aristiyani (2017) conducted a study aiming to determine the market structure, competitiveness, and prospects of Indonesian shrimp exports in the international market. This research shows that from 1991 to 1997, the Indonesian shrimp market was an oligopoly and from 1998 to 2014 it was a monopolistic competition market that is more likely to an oligopoly market. The results show that Indonesia has a competitive advantage with an RCA value which is greater than 1 (> 1). Second, research with the title "Competitiveness of Indonesian Shrimp in the International Market, An Analysis with a Market Share Approach Using an Econometric Model" in the Journal of Development Economics in 2004 which aims to analyze the

competitiveness of Indonesian shrimp in the international market and to formulate a market development strategy. The results show that Indonesian shrimp is relatively competitive, dominating the Japanese and UN markets.

Third, Ulfira Ashari, Sahara, and Sri Hartoyo conducted a study which aims to analyze the position of Indonesian fresh and frozen shrimp in the main export destination countries. In addition, this research analyzes the factors that affect the competitiveness of Indonesian fresh and frozen shrimp in the main export destination countries. The results indicate that the competitiveness of Indonesian fresh shrimp is lower than the frozen shrimp. Besides, the total production of Indonesian fresh shrimp is the factor that affect the short-term competitiveness of Indonesian fresh shrimp exports to Malaysia. Meanwhile, the competitiveness of Indonesian frozen shrimp to the USA was affected by the level of competitiveness of the shrimp exports to the USA in the previous period, frozen shrimp export price in Vietnam, and Indonesian frozen shrimp production.

Fourth, the research entitled "Dynamics of Export Competitiveness of Indonesian Frozen and Processed Shrimp in the International Market" conducted by Samsul Mashari, Rita Nuralina, and Suharno aims to analyze the level of competitiveness and the dynamic position of Indonesian products and frozen shrimp exports among competing countries in the international market. For the analysis, this research used RCA and Dynamic Revealed Comparative Advantage (DRCA). The results show that both Indonesian frozen shrimp and shrimp products have strong competitiveness in the international market. The competitiveness of Indonesian shrimp products tends to increase among the 9 main competitors in two periods. In the first period, it was in a falling star position while in the second period it reached the rising star position. Likewise, the competitiveness of Indonesian frozen shrimp in the first period was in the falling star position and reached the rising star position in the second period. Indonesia needs to increase exports of frozen shrimp and shrimp products by ensuring the availability of raw materials and increasing the quality in exporting frozen shrimps and shrimp products.

Fifth, the research entitled "Analysis of Export Competitiveness of Indonesian Shrimp Commodities in European Markets 2008-2016" was written by Puput Ayu Pudyastuti, Herman Sambodo, and Kikin Windhani. This study aims to analyze Indonesia's position of shrimp competitiveness in six destination countries in the European market from 2008 to 2016, namely UK, Germany, the Netherlands, France, Italy and Belgium. To analyze the competitive advantage of shrimp commodities, the Export Product Dynamic (EPD) was used in this study. This study indicates that Indonesian shrimp in UK, Germany, Holland, Italy and Belgium was in the "Failing Star" position, while in France it was in the "Rising Star" position. Then, from 2008 to 2016, the volume of Indonesian shrimp exports

in the European market fluctuated due to a decrease in volume in several export destination countries of shrimp exports in the European market and others.

Sixth, the research entitled "Strategy to Increase the Productivity of Pond Shrimp" was written by M. Syamsul Maarif, and Agus Somamiharja. This study aims to determine the success factor of shrimp farming for each component of its subsystem, determine the priority of activities carried out to increase the productivity of pond shrimp to support Gema Protekan 2003, and to determine a suitable cultivation system to be implemented in accordance with current capabilities of the government and the farmers. The analysis used in this study is Analytic Hierarchy Process (AHP). The results show that the quality of shrimp farmers is the first priority that must be improved to increase the productivity of pond shrimp. Then, the activities needed include increasing theoretical understanding of shrimp farming, improving technical skills and improving attitudes (value systems) including social and entrepreneurial value systems.

Seventh, a research entitled "Analysis of Export Competitiveness of Indonesian Shrimp Commodities" was conducted by Mufa'ah and Mardiyah Hayati. This study aims to determine the competitiveness and performance of Indonesia's shrimp export commodities and the factors that affect the competitiveness to form a strategy to increase the competitiveness of Indonesian shrimp commodities in the international market. In this study, the analysis used are RCA, Literacy Test, and SWOT analysis. The results of this study indicate that Indonesian shrimp export commodities have strong competitiveness ($RCA > 1$) and an increase in performance between the current year and the previous year ($RCA \text{ index} > 1$). Meanwhile, the most influential factors are labor, land, management program, amount of shrimp production, capital, product diversification, environment, human resources, raw materials, seeds, demand, price, competitors, standards and quality.

Eighth, the research entitled "Analysis of the Diversification of the Indonesian Shrimp Commodity Export Market" was conducted by Bagas Haryotejo. This study aims to analyze the diversification of the export market, the competitiveness of the shrimp commodity in the main export market and to formulate policy implications related to the development of the shrimp export market. In this study, the analysis used are the Aggregate Specialization Index (SPE), Hirschman Index (HI), and RCA. The results show that the shrimp export market had not been diversified. This is indicated by the SPE and the Hirschman Index. The SPE shows a value of close to 1, which means the market is not well diversified. Meanwhile, based on RCA analysis, Indonesian shrimp commodity has great competitiveness in the US and Japanese markets indicated by the RCA value which is much greater than 1. On the other hand, in the European Union market, the average RCA value is close to 1. This shows that the competitiveness

of Indonesian shrimp commodities is relatively weaker in the European Union market.

Ninth, the research entitled "Competitiveness Comparison between Indonesian Shrimp and Thailand Shrimp in Export Market" written by Lina Asmara Wati, Weni Chang, and Moch Muslich Mustadjab. This study aims to compare the competitiveness of shrimp exports between from Indonesia and Thailand to Japan and USA. The analysis used in this study is RCA. The results show that Indonesia's RCA value is greater than 1, which indicates the competitive advantage of Indonesian shrimp exports in the liberalized market. However, Indonesia was relatively disadvantaged than Thailand.

Tenth, the research entitled "Competitiveness Analysis and Factors That Influence The Export of Indonesian Shrimp Commodities" was conducted by Muryani, Dian Ratna Sari, and Erlangga Agustino Landiyanto. This study aims to analyze the competitiveness of countries in the shrimp market and the factors of shrimp export in major importing countries. In this study, the analysis used are RCA and Panel Gravity Model. The results indicate that GDP per capita and the distance of country have a relationship with shrimp commodity exports. Meanwhile, GDP per capita for importing countries, export prices, and population are positively related.

Those previous studies lead this study to continue with a more specific case study, namely the Regional Government's strategy in increasing the competitiveness of Lampung shrimp exports. This study was conducted from 2015 to 2019, or after the election of Lampung as the National Shrimp Barn.

3. RESEARCH METHODOLOGY

In this study, We use quantitative and qualitative approaches to answer two research questions. The quantitative approach involves estimating parameters, testing hypotheses, establishing a confidence interval, and the relationship between two or more variables for parameters that have a normal distribution. We use RCA to analyze the competitiveness of Lampung shrimp exports; and the Diamond Porter model to analyze the strategies used by the Lampung Government to increase the competitiveness of shrimp exports.

The conception of competitiveness is discussed at three levels of understanding, namely product competitiveness, national competitiveness and international competitiveness. These conception helps tracing the comparative advantage of shrimp products, product contribution in national export value, and product contribution as well as product urgency in international markets.

The competitiveness of export products in international competition can be seen from three aspects (Amir, 2003: 281):

- (1) Price, production costs that are lower than production in the export destination country create a comparative advantage of the product.
- (2) Product quality, the product must satisfy consumers
- (3) The forwarding time must suit the situation and market conditions in the destination country. Delays can be a reduced desire and loss of market.

The RCA index introduced by Bela Balassa is a method of measuring comparative advantage used in this study. RCA is a percentage of total exports from a country. At the world level, if the percentage is higher than the market share for the same goods, it means that the country has a comparative advantage on the production and export of a product (Tambunan, 2004: 110). The RCA formula is as follows:

$$RCA = \left(\frac{X_{IK}}{X_M} \right) / \left(\frac{X_{WK}}{X_{WM}} \right)$$

Where:

XIK = export value of product I in country K

XIM = total export value in country K

XWK = world export value of product I

XWM = total world export value

Peter Lang AG (2009) reviews various definitions of national competitiveness. He concludes that the concept of competitiveness does not have a standard definition. Many thinkers provide a measurement of competitiveness according to various indicators and depending on the researchers' needs. Peter Lang AG (2009: 28) underlines the approach of competitiveness in the book *National Competitiveness of Vietnam: Determinants, Emerging Key Issues and Recommendations* by Hien Phuc Nguyen. He takes the point that national competitiveness refers to the ability of a country to create and sustain economic growth, and improve the living standard of its people by increasing national productivity within the framework of a market economy. Therefore, this study analyzes the government's steps to increase the shrimp exports and its impact on people's welfare.

In the model of national competitiveness or the "Diamond" model by Porter (1990. P. 1-5), there are four environmental factors that can be considered in national competitiveness:

- a. The Factor Condition or the position of a country in production factors including labor factors, resources or infrastructure, and other factors in industry.
- b. The demand condition or the characteristics of domestic demand for certain industrial products and services.

- c. The related and supporting industries, i.e. the presence or absence of a provider, supporting and related industries that are competitive in the international level.
- d. The firm strategy, structure and rivalry or the strategy and control of a country in how a company manages domestic competition.

By reflecting on this model, the strategic position of shrimp products will be considered as an export products in the international market, particularly the contribution of Lampung as a national shrimp producer.

Data were collected through interview and documentation study. Interviews were conducted with the Head of the Lampung Marine and Fisheries Office. Documentation was done by collecting data from documents (document-based research). Document materials were taken from primary and secondary documents. Primary documents belong to the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries and the Lampung Office of Marine Affairs and Fisheries as well as annual reports from the Central Bureau Statistics (BPS) of Lampung.

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

Development of Export Products in Lampung Province

Lampung has several export commodities, such as fishery products, agriculture and coal. Among these commodities, three products are superior products of Lampung such as robusta coffee, pepper, and cassava. Meanwhile, shrimp products contribute to the largest national export (Lampost, 2020). Apart from agricultural products, fishery products have great potential for Lampung Province. In 2018, fishery product exports contributed 3% of national fishery exports with 2.7 trillion IDR. The fishery product exports consist of fresh shrimp, processed shrimp, processed crabs, processed squid, fish feed, seaweed and groupers (Lampost, 2019). The Lampung Provincial Government commit to develop aquaculture businesses. The government is also working on restocking endemic fish such as jelabat, baung and belida in rivers and retention basins (Lampost, 2020).

Commodity exports in Lampung Province from 2018 to January 2019 increased. The total of commodity exports in Lampung Province in 2018 were 256.23 million USD, and it increased 9.19 million USD to be 265.42 million USD in January 2019 (Republika, 2019). Several commodities that increased were coffee, tea, spices, pulp, and the products of fruit and vegetables. Export can increase economic growth in an area. The exported commodities from Lampung to other countries depend on the demand. There are five main commodity export destinations for Lampung Province including USA, China, South Korea, India and Pakistan. The export value of each country can be seen in the following table:

Table 1. Main Export Destinations of Lampung

No	Country	Export value (in USD)
1	USA	30,17
2	China	29,16
3	South Korea	25,57
4	India	24,04
5	Pakistan	21,61

Source: republika.co.id (Republika, 2019)

The Competitiveness of Lampung Shrimp Export

The competitiveness of a commodity can be seen from its price, product quality, and delivery time. The higher the export price of Indonesian shrimp, the lower the competitiveness of the shrimp exports and vice versa. Shrimp price fluctuation is influenced by many factors such as competition between shrimp exporting countries. The shrimp sales in the international market were still dominated by India, followed by Ecuador and Vietnam, while Indonesia was the fourth largest shrimp exporter. In 2019, shrimp prices declined in the international market due to intense competition between shrimp exporting countries (Maharani, 2020). The increase and decrease in demand for shrimp can also affect the shrimp prices. Also in 2019, the shrimp prices in Lampung declined so it negatively affected shrimp farmers because their income was less than the capital issued (Muklasin, 2019).

Apart from price, quality also determines the competitiveness of a commodity. Shrimp is a food commodity that is susceptible to disease in its cultivation process. As a result, shrimp are susceptible to contamination by bacteria such as Salmonella, E. Coli, and Vibrio parahaemolyticus which can cause a poor quality of the shrimp and be rejected by importing countries. Therefore, the quality of shrimp is essential to meet the strict import standards and requirements applied by importing countries. In this case, the role of quality assurance (certification) is very important. To ensure the quality of shrimp, the national shrimp industry applies the HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) system in shrimp cultivation and processing. Several shrimp industries in Lampung that have implemented HACCP are PT Central Pertiwi Bahari, PT Indomina Langgeng Sejahtera, and PT Bumi Menara Inetrnusa.

Besides, competitiveness is also influenced by the delivery time of export products to the destination country. The development of transportation technology is no longer an obstacle to the delivery of export products to destination countries. However, administrative procedures sometimes hamper the punctuality of export delivery. Currently, Indonesia has implemented the INSW (Indonesia National Single Window) to support the smooth process at ports. This is highly appreciated

by shrimp industries in Lampung, as conveyed by Rudi Siregar in the research interview at his office, PT Central Pertiwi Bahari, Tanjung Bintang.

These three factors can affect the competitiveness of shrimp exports. Even so, many other factors that affect the competitiveness of shrimp exports are production, exchange rates, export volume, and purchasing power. Therefore, regarding competitiveness, several factors need to be considered. To see the competitiveness of shrimp exports in Lampung, here is the data on the Lampung shrimp export value of and its comparison with the national shrimp export value (throughout Indonesia):

Table 2. Export value (USD) of Lampung Shrimp, Indonesian Shrimp, All Commodities of Lampung and Indonesia In 2015-2019

Year	Lampung Shrimp Export Value	Lampung Export Value for All commodities	Indonesian Shrimp Export Value	Indonesia Export Value for All Commodities
2015	154.308.963,00	387.141.000,00	1.390.000.000,00	150.393.300.000,00
2016	155.896.653,00	319.173.000,00	1.380.000.000,00	144.489.700.000,00
2017	194.170.852,00	387.341.000,00	1.380.000.000,00	168.828.200.000,00
2018	190.124.102,00	344.011.000,00	1.350.000.000,00	180.012.700.000,00
2019	161.536.011,00	292.948.000,00	1.231.530.957,00	167.497.000.000,00

Source: Central Bureau of Statistics and the Observatory of Economic Complexity

Table 2 shows that the shrimp export value in Lampung Province increased continuously. However, there was a decline of 0.98% from 2017 to 2018 and a decline of 1.18% from 2018 to 2019. In contrast, the export value of all commodities in Lampung Province tended to fluctuate. It declined in 2016, then increased in 2017, declined in 2018, and declined again in 2019. The increase in shrimp export value in Lampung from 2015 to 2017 is better than Indonesian shrimp export value, which declined continuously from 2015 to 2019. Indonesia's export commodities fluctuate from year to year.

The competitiveness of Lampung shrimp exports is calculated using the RCA method. This method is used to measure comparative advantage in an area. If the RCA value is more than 1 (> 1) then the competitiveness of Lampung shrimp exports is higher than the average competitiveness of Indonesia and vice versa. Meanwhile, if the RCA value is 1 ($= 1$), then the competitiveness of Lampung shrimp exports is the same as the average competitiveness of Indonesia. The following is the value of the competitiveness of Lampung shrimp exports:

Table 3. RCA Value of Lampung Shrimp in 2015-2019

Year	Lampung Shrimp Export Value	Lampung Export Value for All commodities	Indonesian Shrimp Export Value	Indonesia Export Value for All Commodities	RCA Value
2015	154.308.963	387.141.000	1.390.000.000	150.393.300.000	43,1256519
2016	155.896.653	319.173.000	1.380.000.000	144.489.700.000	51,1409096
2017	194.170.852	387.341.000	1.380.000.000	168.828.200.000	61,3276707
2018	190.124.102	344.011.000	1.350.000.000	180.012.700.000	73,6943552
2019	161.536.011	292.948.000	1.231.530.957	167.497.000.000	74,9964172

Source: Processed Secondary Data from The ministry of Marine Affairs and Fisheries and The Observatory of Economic Complexity

Based on the RCA value in the table 3, Lampung shrimp exports have very strong competitiveness seen from the very high RCA value. The highest RCA value was in 2019 at 74.99, while the lowest RCA was in 2015 at 43.12. Even though the export competitiveness in 2015 was the lowest, but the value was very high. So, in 2015, the competitiveness of Lampung shrimp exports was quite strong and increase continuously every year. With an RCA that is greater than 1 (> 1), it indicates that the export value of Lampung shrimp has a comparative advantage with very strong competitiveness and continues to increase from 2015 to 2019.

Government's Strategies in Increasing the Competitiveness of Lampung Shrimp Exports

The results of RCA calculations indicate that the competitiveness of Lampung shrimp exports in Province is very strong. Strategic efforts are required to increase it. Based on the Diamond Potter method, there are four factors that affect the competitiveness of a region, i.e supporting and demand conditions, supporting industries, firm strategy, as well as the role of the government.

The Factor Condition

a. Geographical Location

Lampung Province, especially South Lampung Regency, is one of the main pilot locations for national shrimp ponds. The South Lampung Regency is from Muara Way Sekampung in Sragi District in the North to Bawang Village, Punduh Pidada District, Pesawaran Regency in the South with a coastline length of 45 km. Geographically, South Lampung Regency is between 105 'to 105'45' East Longitude and 5'15 'to 6' South Latitude. Regarding shrimp cultivation, the potential pond land in South Lampung Regency is 15,000 hectares spread over 6 sub-districts including Sragi, Ketapang, Penengah, Kalianda, Sidomulyo and Katibung districts (Utojo, 2009: 413).

b. Land

The Lampung Government wants to again achieve success in the shrimp farming sector. This step begins by building demonstration ponds (demfarm) in three districts, which have been the centers for shrimp production in Lampung. Head of the Marine and Fisheries Service (DKP) of Lampung Province, Setiarto, said the three districts are South Lampung, East Lampung, and Pesawaran. The pilot ponds to be built in each regency are about 7-10 hectares. This pond belongs to fishermen and the government only helps facilitate cultivation needs such as waterwheels, plastics, feed, and others. In addition to building pilot ponds, the government assists for production facilities and pond infrastructure provided for shrimp farmers (Lampungprov.go.id, 2015).

In this case, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) designed a pilot-shrimp-cultivation area in South Lampung Regency. These activities are to support social forestry programs in various regions. The shrimp farming was chosen because in those areas, there had been existing cultivation area of approximately 312 hectares, but it had not been optimally and productively utilized. The Social Forestry program launched by President Jokowi is an attempt of the Government to provide access to the local people in utilizing Perhutani land for productive business activities that can improve their welfare. The Directorate General of Aquaculture said that the KKP is committed to the success of the social forestry program initiated by the President. He stated that the potential land owned by Perhutani in several regions can be optimized to be more productive and has a positive effect on the community's economy (Dirjen Perikanan Budidaya, 2020).

c. Infrastructure

KKP, through the Directorate General of Aquaculture, will be involved especially in designing the shrimp ponds, rehabilitating irrigation canals and supporting cultivation facilities. Meanwhile, other cross-sectoral sectors are expected to support with their authorities such as Perhutani related to land legality and community groups, State Electricity Company PLN related to access to electricity; The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) for access to infrastructure such as production roads; State-owned Enterprise (BUMN) of Banking for access to finance and other related Ministries. Currently, the local government is identifying and verifying locations to ensure that activities will run well. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries plans to build a pilot shrimp-cultivation area in social forestry activities of about 5 hectares for initial development,

with a productivity target of 6 tons/hectare (Directorate General of Aquaculture, 2020).

d. Employee

Apart from the availability of land and infrastructure, the number of fishermen/cultivators from 2015 to 2019 reached 42,729 people (KKP: 2018). Especially for the KKP, the government would appoint the Lampung Center for Aquaculture and Fisheries (BBPBL) to provide technical assistance and the necessary cultivation facilities. In addition, the Directorate General of Fisheries and Aquaculture also distributed 175 immune packages to BBPBL Lampung employees who got the impact of tidal flooding. This is expected that the assistance provided can increase morale and productivity (Directorate General of Aquaculture, 2020).

The Demand Condition

The Minister of Marine Affairs and Fisheries, Edhy Prabowo with the Chairman of Commission IV of The People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) visited East Lampung Regency on July 19, 2020. The government was ready to work on the potential of ponds through shrimp cultivation. Edhy said that the KKP would encourage for intensification and development of the wanamina or silvofishery system ponds. Edhy saw that the ponds in East Lampung has high productivity with an average harvest of about 20 tons. Besides, the price of shrimp during the Covid-19 pandemic is better than the pre-pandemic conditions. It is expected that the existing land can be utilized by paying attention to plants, especially mangroves because mangrove forests can also be used for other fisheries cultivation (Director General of Aquaculture, 2020).

In order to boost productivity to achieve the target of increasing shrimp production by 250% by 2024, KKP through the Directorate General of Aquaculture (DJPB) has designed a cultivation model by prioritizing a more-integrated technical management that is environmentally friendly. This pilot is expected to encourage farmers and investors to imitate the model. Then DJPB added that the government focus on improving productivity through intensification. By upgrading the productivity of traditional ponds with technology, productivity can be increased from 1 ton/ha/cycle to around 10 - 20 tons/ha /cycle. So, there will be an additional shrimp production of at least 400,000 tons per year. However, the Covid-19 pandemy also affects the economy, especially the performance of the national shrimp business. The decline in shrimp prices

due to falling export demand also suppressed the added value of shrimp cultivators in various regions in Indonesia.

The Related and Supporting Industries

a. PT Robert Bosch

Bosch, a leading technology and service provider company, presents a Smart Aquaculture: Aquaeasy. Aquaeasy is a holistic technology that can monitor water quality and shrimp pond management with complete solutions including sensors, software and services. Aquaeasy is more focused on increasing shrimp production that will help Indonesian farmers maintain quality while increasing their yields in a sustainable manner. Aquaeasy recommends optimal harvest periods, prevention of risk of failure and estimation of feed ratios. This technology is supported by Artificial Intelligence, which provides more in-depth information. The Aquaeasy also supports government programs that are going towards industry 4.0 in which digital use including digital use in the shrimp farming sector must be prioritized. Currently, Aquaeasy technology has been used in several Indonesian ponds, one of which is in Lampung. The sensors allow the pond owners to control parameters, pH, temperature, salinity and conductivity of water only via a smartphone because Aquaeasy technology can be downloaded with the subscription cost of IDR 1 million per month (Investor.id, 2019).

b. PT. Central Centralpertiwi Bahari

PT. Centralpertiwi Bahari was established on June 9, 1994, located in Tulang Bawang Lampung, with an area of more than 20,000 hectares. This company started by building several modules, irrigation systems to support the farmers. Then, this company provides special training to farmers and employees to cultivate shrimp with good results. As an integrated aquaculture company reputable worldwide, PT Central Pertiwi Bahari combines traditional and modern resources to support shrimp farming such as HDPE lined, high-tech laboratories, power plants, as well as the factory for processing fresh shrimp and food products. CP Prima as the parent company of PT Central Pertiwi Bahari supplies several high-quality and nutritious feeds for shrimp produced with high standards to prevent water pollution (CPP Prima, 2020).

The Firm Strategy, Structure and Rivalry

To improve the competitiveness of shrimp commodities, business actors play an important role in the shrimp commodity. Therefore, in order to succeed in the Lampung program as a national shrimp Barn, a strategy is

needed the shrimp companies in Lampung such as PT. Central Pertiwi Bahari (CPB), Bumi Menara Internusa (BMI), and INDOPOM.

In the global market, the high demand for shrimp and packaging of shrimp products to meet the standards of export destination country, so that the export value will be greatly influenced by market demand. If the company can meet this demand, it will further increase the export value of the product. In this case, the characteristics of the United States' demand for shrimp products are quite flexible. In contrast, European countries prioritize product quality that meets their standards. Then, in meeting the demand for shrimp in the global market, there are several obstacles faced by companies, i.e the certificates needed such as health certificates for exporting, dynamic market demand and raw materials to meet market demand. Therefore, there are several company's strategies in dealing with these problems, including:

- (1) Providing guidance and training for both technology and improving the quality of shrimp farmers. In this case, all companies engaged in the shrimp commodity in Lampung conducted training for shrimp farmers regarding shrimp farming, especially the use of technology to accelerate and produce sustainable and quality harvests.
- (2) Improving technological facilities such as laboratories to control water quality and manage shrimp ponds.
- (3) Cooperating with one another to support Lampung to be a national shrimp barn such as by sharing technology and the advantages of each company. It is expected that in the future, the results of such collaboration can be used as a strategy in supporting the shrimp cultivation in Lampung to produce quality and sustainable shrimp.
- (4) Understanding the global market, especially about the demand and trend of the global market. For example, PT. Central Pertiwi Bahari participated in the largest seafood exhibition in Europe, namely Boston Seafood for 25 years. This was done as an effort to follow the trend of global market development for the shrimp commodity.
- (5) Equally important, every company must always innovate on the shrimp products. Shrimp companies must always innovate their shrimp products. Not only to produce raw, the company needs to process the shrimp into various shrimp products.
- (6) Maintaining shrimp quality. In supporting the province of Lampung to become a national shrimp barn, the shrimp companies must also pay attention to the shrimp quality. With a good quality, it can meet all the standards of demand for the shrimp commodity market.

The Role of Government

Increasing national shrimp production is one of the programs major project in the RPJMN 2020-2024 realized by revitalizing shrimp ponds by optimizing existing land. This program is an implementation of President's Instruction Number 7 of 2016 concerning the Acceleration of National Fisheries Industry Development. Increasing the productivity of national shrimp is also expected to raise the people's economy that is affected by the COVID-19 pandemic (Presidential Staff Office, 2020).

Currently, the KKP is mapping potential land in various areas for optimization. Likewise, the Chairman of Commission IV DPR RI, Sudin, said that the DPR will provide full support in intensification and development of silvofishery system shrimp ponds, which means that the development of ponds does not damage mangroves because mangroves have ecological functions such as protecting the coast from abrasion. On the same occasion, the Governor of Lampung, Arinal Djunaidi, stated that in October, the Prosperous Farmers Card would be launched, including for fishpond farmers and fishermen. It was expected pond farmers could use it to maximize production results (Dirjen Perikanan Budidaya, 2020).

a. The Prosperous Farmers Card Program (PKPB)

The PKPB is a program, which connects all agricultural interests to achieve the welfare of farmers and all parties involved in the agricultural process. This program aims to increase productivity, farming income and increase the farmer exchange rate (NTP). PKPB is a program of the Governor of Lampung that aims to increase farmers' income and welfare by solving problems in a structured, systematic and integrated manner using information technology (PKPB, 2020).

With an application-based program, the PKPB membership system is closed. The members are Farmers as the main members who get convenience from access to capital, provision of agricultural facilities and sales of agricultural products; distributor of seeds, Fertilizer and Medicine needed by farmers in the cultivation process; farmer group as the manager of the distribution of agricultural facilities from suppliers to farmers, Managing agricultural products from farmers to buyers; Trainer as the maker of the Definitive Plan of Farmers Group (RDK); The stall of agricultural facilities as a place for supplying and selling agricultural facilities for farmers; Financial Institutions in the form of Banks, Cooperatives, BUMDES, which channel capital to farmers; Buyers of agricultural products from farmers; and Local Governments

that monitor regional agricultural conditions, make policies, ensure the stability of the selling price of agricultural products.

The PKPB can provide detailed and accurate information for producers of goods and services needed by farmers in the form of Profiles and Farming Business Plans to provide initial data for the production, stock and distribution, access to capital and markets for agricultural products in the form of harvest estimation. Besides, KKP and the government reallocate direct production input support for small-scale shrimp farmers affected by Covid-19. Through the Center for Brackish Water Cultivation Fisheries (BBPBAP) Jepara, a total of 2.2 million vannamei shrimp seeds were given to a shrimp farmer in Lampung Province.

b. Establishment of Cross-Sector Working Groups (POKJA)

The Covid-19 pandemic also caused an economic impact, especially on the performance of the national shrimp business. The decline in shrimp prices in the market due to falling export demand also suppressed the added value of shrimp cultivators in various regions in Indonesia. On the other hand, the increase in shrimp feed prices also increase the production costs. Meanwhile, to maintain shrimp productivity, KKP has provided support for quality-vannamei-shrimp seeds in various regions through the Technical Implementation Unit (UPT) of Directorate General of Aquaculture. The head of the Center for Brackish Water Cultivation Fisheries (BBPBAP) Jepara, Sugeng Raharjo, said that he had prepared various anticipations in facing the impact of the economic downturn due to the COVID-19 pandemic among fish farmers. He stated that Jepara BBPBAP as the center of national shrimp manipulation, has provided direct support for shrimp seeds for small-scale farmers. The KKP team went to Lampung to provide support for 2,208,000 vaname shrimp seeds for fosh-farming group of Citra Jaya. It is expected that this support can reduce production costs and maintain the added value of income in the current downturn of the national shrimp business (KKP, 2020).

The strategy that has been applied by the government and the KKP is to conduct a coordination meeting for Working Group (POKJA) regarding the National Shrimp Production Acceleration by starting the acceleration of shrimp farming development in several targeted areas. The team consisting of cross-sectoral elements immediately held a coordination meeting in South Lampung Regency on July 2, 2020. South Lampung Regency is one of the five districts/cities that are the target of shrimp cultivation development in 2020. Several supporting programs are being prepared by the Government to accelerate the

realization of the target. Meanwhile, the Regent of South Lampung, Nanang Ermanto, hopes that South Lampung can advance in the agriculture and fisheries sectors. He also hopes that the collaboration with the Central Government can realize South Lampung as one of the national shrimp barns (KKP, 2020). The main points in the Coordination Meeting held by the POKJA Team for the Acceleration of National Shrimp Production include (KKP, 2020):

- (1) The shrimp culture development program would be discussed at a ministerial level meeting to encourage the active involvement of other Ministries/Agencies because it is directly monitored by the President;
- (2) The status of social forestry land would be finalized in two weeks;
- (3) The formation of Regional Working Groups would be followed up that week to start working immediately;
- (4) The technical design and the to-do list of POKJA would be prepared by the KKP within two weeks; and
- (5) The second coordination meeting was scheduled for the fourth week of July to discuss design and fundraising besides the APBN (state budget) and APBD (local government budget).

5. CONCLUSION

Lampung Province is targeted to become the National Shrimp Barn based on the 2018 National Shrimp Cultivation Coordination Meeting. Lampung is considered to have great potential to advance national shrimp cultivation. This can be seen from several aspects such as large areas to maximize cultivation, strategic geographic location with many beaches, and the experience of long-established shrimp industries in Lampung. Therefore, the competitiveness of Lampung shrimp exports must be improved. Based on the results of RCA calculation, the competitiveness of Lampung shrimp exports is very strong. The Lampung Provincial Government made a collaboration with central government and the regional governments to increase the competitiveness of shrimp exports. This collaboration includes providing access to capital through Smart Farmers Cards, technical assistance by forming cross-sector Working Groups (Pokja), and intensive pond building in several areas in Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Acuto, M. (2016). City Diplomacy. Dalam C. M. Constantinou, P. Kerr, & P. Sharp (Penyunt.), *The SAGE Handbook of Diplomacy* (hal. 510-520). London: SAGE Publication Ltd.

- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Eiklenborg, M., Ioannou, S., King, G. II and Vilcheck, M. (2011), Taguchi Methods for Achieving Quality, School of Engineering, San Francisco State University, San Francisco, CA.
- Hocking, B. (2016). Diplomacy and Foreign Policy. Dalam C. M. Constantinou, P. Kerr, & P. Sharp, *The SAGE Handbook of Diplomacy*. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.
- Juran, J. (1974), *Quality Control Handbook*, McGraw-Hill, New York, NY
- Kementerian Luar Negeri. (2017). *ASEAN Selayang Pandang* (22 ed.). Jakarta: Sekretariat Direktorat Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.
- Kuznetsov, A. S. (2014). *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. London: Routledge.
- Mahi, A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah: Teori dan Aplikasi*. Kencana.
- Malhotra, Naresh K. (2007). *Marketing Research: an Applied Orientation*. 5th edition. Pearson Education. New Jersey
- Mukti, A. T. (2013). *Paradiplomasi Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- MS, Amir. (2003). *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PPM.
- Tambunan, Tulus T.H. (2004). *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Utojo, Akhmad Mustafa, Rachmansyah, dan Hasnawi. (2009), *Penentuan Lokasi Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan Dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Lampung Selatan*. J. Ris. Akuakultur Vol. 4 No. 3, Desember 2009: Hal. 407-423
- Utomo, A. B. (2015). Utilizing ASEAN Cooperation on Environmentally Sustainable City as A Tool to Achieve an Integrated Sustainable Region. *Proceedings Towards ASEAN Community: Assessing the Southeast Asia's Integration* (hal. 73-90). Yogyakarta: ICOSEAS

Internet:

- Antara Lampung. (2018, Desember 15). *BUMN Haidr Di Bumi Bratasena*. Dipetik Januari 31, 2020, dari Antara Lampung:

<https://lampung.antaranews.com/berita/308572/bumn-hadir-di-bumi-udang-bratasena>

Bartelson, J. (2000, June). Three Concepts of Globalization. *International Sociology*, 15(2), 180-196.

CP Prima. (2016, Maret 17). *PT. Central Pertiwi Bahari pengexport udang terbesar di Indonesia*. Dipetik Januari 26, 2020, dari <https://www.cpp.co.id/id/news-events/corporate/cpb-masih-yang-terbesar-sebagai-exporter-udang-di-indonesia>

CP Prima. (2016, Maret 17). *Lahan Pertambakan*. Dipetik Agustus 24, 2020, dari HYPERLINK "https://www.cpp.co.id/id/our-business/integrated-aquaculture/cpb-farm" <https://www.cpp.co.id/id/our-business/integrated-aquaculture/cpb-farm>

Criekemans, D. (2008). Are the Boundaries between paradiplomacy and diplomacy watering down? *Second Global International Studies Conference* (hal. 23-26). Slovenia: University of Ljubljana.

Damayanti, C. (2012). Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN. *Transformasi*, XIV(22), 1-9.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. (2020, Mei 29). *KKP Akan Bangun Percontohan Kawasan Tambak Udang Berkelanjutan di Perhutanan Sosial Lampung Selatan*. Dipetik Juli 21, 2020, dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya: HYPERLINK "https://kkp.go.id/djpb/artikel/19950-kkp-akan-bangun-percontohan-kawasan-tambak-%09udang-berkelanjutan-di-perhutanan-sosial-lampung-selatan" <https://kkp.go.id/djpb/artikel/19950-kkp-akan-bangun-percontohan-kawasan-tambak-udang-berkelanjutan-di-perhutanan-sosial-lampung-selatan>

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. (2020, 21 Juli). *Pemerintah Percepat Upaya Peningkatan Produksi Udang Nasional*. Dipetik Juli 23, 2020, dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya: HYPERLINK "https://kkp.go.id/djpb/artikel/22025-pemerintah-%09percepat-upaya-peningkatan-produksi-udang-nasional" <https://kkp.go.id/djpb/artikel/22025-pemerintah-percepat-upaya-peningkatan-produksi-udang-nasional>

Hadiyanton, T. (2018, September 23). *Banyak Potensi, Ekspor Udang Indonesia Berpotensi Kian Membesar*. Dipetik Januari 31, 2020, dari Kontan Co Id: <https://nasional.kontan.co.id/news/banyak-potensi-ekspor-udang-indonesia-berpotensi-kian-membesar>

Ivestor.id. (2019, November 06). *Bosch Perkenalkan Teknologi Smart Aquaculture, AquaEasy untuk Tambak Udang*. Dipetik Agustus 24, 2020, dari Investor.id: HYPERLINK "https://investor.id/business/bosch-perkenalkan-teknologi-smart-aquaculture-aquaeasy-" <https://investor.id/business/bosch-perkenalkan-teknologi-smart-aquaculture-aquaeasy-> untuk-tambak-udang

Kantor Staf Presiden. (2020, Juli 08). *Pemerintah Memulai Proyek Percontohan Tambak Udang*. Dipetik Juli 19, 2020, dari Kantor Staf Presiden: HYPERLINK "https://ksp.go.id/pemerintah-memulai-proyek-percontohan-tambak-udang/" <https://ksp.go.id/pemerintah-memulai-proyek-percontohan-tambak-udang/>

KBRI di Nairobi, K. (2009, Oktober 18). *Diplomasi Isu Lingkungan Hidup Bagi Indonesia?* 2009. Dipetik Maret 6, 2019, dari <https://www.kemlu.go.id/nairobi/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Diplomasi-Isu-Lingkungan-Hidup-bagi-Indonesia.aspx>

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2020, April 16). *Topang Ekonomi Pembudidaya Di Tengah Wabah Covid-19, KKP Bagikan 2,2 Juta Benur Udang Vaname Di Provinsi Lampung*. Dipetik Juli 27, 2020, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI: <https://kkp.go.id/artikel/18743-topang-ekonomi-pembudidaya-di-tengah-wabah-covid-19-kkp-bagikan-2-2-juta-benur-udang-vaname-di-provinsi-lampung>

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2020, Juli 04). *KKP Selenggarakan Rakor Pokja Percepatan Peningkatan Produksi Udang Di Lampung Selatan*. Dipetik Juli 29, 2020, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI: <https://kkp.go.id/artikel/21205-kkp-selenggarakan-rakor-pokja-percepatan-peningkatan-produksi-udang-di-lampung-selatan>

Kementerian Luar Negeri. (2017). *ASEAN Selayang Pandang* (22 ed.). Jakarta: Sekretariat Direktorat Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.

Kompas. (2015, Juni 3). *Diambil kembali dari Harga Udang Di Lampung Anjlok, Petambak Menjerit*: <https://money.kompas.com/read/2015/06/03/133016726/Harga.Udang.di.Lampung.Anjlok.Petambak.Menjerit>

Lampost. (2019, October 24). *Lampung Sumbang 3 Persen Nilai Ekspor Perikanan Nasional*. Diambil kembali dari lampost: <https://www.lampost.co/berita-lampung-sumbang-3-persen-nilai-ekspor-perikanan-nasional.html>

Lampost. (2020, July 21). *Lampung Terus Pacu Perkembangan Potensi Kelautan dan Perikanan*. Diambil kembali dari Lampost:

<https://www.lampost.co/berita-lampung-terus-pacu-perkembangan-potensi-kelautan-dan-perikanan.html>

Lampungprov.go.id. (2015, Juni 26). *Lampung Bangun Tambak Udang Percontohan*. Dipetik Juli 19, 2020, dari Lampungprov.go.id: HYPERLINK "https://lampungprov.go.id/index.php/detail-%09post/lampung-bangun-tambak-udang-percontohan"
<https://lampungprov.go.id/index.php/detail-post/lampung-bangun-tambak-udang-percontohan>

Maharani, P. (2020, Februari 15). *Analisis Kemampuan Indonesia Memproduksi Udang dan Persaingan Ekspor di Pasar Internasional*. Diambil kembali dari Asian Scenarios: <https://asianscenarios.com/2020/02/15/analisis-kemampuan-indonesia-dalam-memproduksi-udang-dan-persaingan-ekspor-di-pasar-internasional/>

Muklasin. (2019, Oktober 10). *Harga Udang Vaname di Lampung Timur Rp40 ribu Per Kilogram*. Diambil kembali dari Antara Lampung: <https://lampung.antaranews.com/berita/321219/harga-udang-vaname-di-lampung-timur-rp40-ribu-perkilogram>

PKPB. (2020). *Program Kartu Petani Berjaya*. Dipetik Juli 25, 2020, dari PKPB: <https://kpb.lampungprov.go.id/>

republika. (2018, Januari 17). *Lampung Pasok 40% Udang Nasional*. Dipetik Januari 30, 2020, dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/04/17/p7bw68384-lampung-pasok-40-persen-udang-nasional>

republika. (2019, November 16). Diambil kembali dari Penutupan Tambak Udang Ganggu Ekspor Lampung: <https://nasional.republika.co.id/berita/q17u4c366/ekonomi/pertanian/19/11/11/q0svwt370-penutupan-tambak-udang-ganggu-ekspor-lampung>

republika. (2019, Novemer 7). Diambil kembali dari Petambak Udang Lampung-Bengkulu Minta investasi Dipermudah: <https://republika.co.id/berita/q0k26e430/petambak-udang-lampungbengkulu-minta-investasi-dipermudah>

Republika. (2019, Februari 15). *Ekspor dan Impor Komoditas di Lampung Naik*. Diambil kembali dari Republika: <https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/19/02/15/pmysqb430-ekspor-dan-impor-komoditas-di-lampung-naik>

republika. (2019, November 7). *Ekspor Udang dari Lampung Capai Rp 2 Triliyun*. Diambil kembali dari Republika:

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/11/07/q0k5lc382-ekspor-udang-dari-lampung-capai-rp-2-triliun>

Setzer, J. (2014, November 28). How Subnational Governments are Rescaling Environmental Governance: The Case of the Brazilian State of Sao Paulo. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 19(5), 503-519. doi:<https://doi.org/10.1080/1523908X.2014.984669>

Sholeh, K. (2018, Oktober 19). *Kinerja Ekspor Produk Perikanan Indonesia 2018*. Dipetik Januari 30, 2020, dari Direktorat Jendral Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan: <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/7947-kinerja-ekspor-produk-perikanan-indonesia-tahun-2018>.

Widowati, H. (2019, Juni 12). *Indonesia Eksportir Udang Beku Terbesar Keempat di Dunia*. Dipetik Januari 30, 2020, dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/12/indonesia-eksportir-udang-beku-terbesar-keempat-di-dunia>

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG - INDONESIA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM PADA 2015-2020

Iwan Sulisty, Gita Karisma, Indra Jaya Wiranata^{a,1}

^a Universitas Lampung, Jalan Prof. Soemantri Brodjonegoro No. 1,
Bandar Lampung, 34597, Indonesia
gita.uai@gmail.com¹

ABSTRAK

Perubahan iklim membawa dampak bencana yang tak terhindarkan bagi tiap wilayah di dunia. Lampung menjadi salah satu daerah yang rawan bencana banjir terutama dapat menjadi kian memburuk akibat perubahan iklim. Artikel ini membahas berbagai potensi bencana di Kota Bandar Lampung dan melihat strategi pemerintah kota dalam mengatasi berbagai potensi bencana. Wawancara dan studi pustaka digunakan sebagai Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Kota Bandarlampung sudah berupaya melakukan berbagai kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemerintah kota membuat regulasi dan berinvestasi pada isu perubahan iklim. Kebijakan regulasi relevan misalnya tertuang dalam RPJMD Kota Bandar Lampung 2010-2015 dan *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021* (Perda Kota Bandar Lampung No. 09 Tahun 2018). Berbagai bentuk investasi terkait infrastruktur, pemerintah kota telah melakukan pembuatan peta-peta kepadatan penduduk dan lokasi genangan, pengembangan drainase dan sanitasi kota. Penyulingan air (2010 – masih berjalan) kedua, ada program Kampung Hijau, Rencana Induk Pengelolaan Sampah Terpadu, Pendidikan Bahan Ajar Perubahan Iklim di SD dan SMP, Konservasi Air Tanah Melalui Pembuatan Lubang Resapan Biopori, gerakan tanam pohon dan lain lain.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Pemerintah Bandar Lampung, Banjir, Adaptasi, Mitigasi.

ABSTRACT

Climate change brings the unavoidable catastrophic effects to the world. Lampung is one of the region that has flood risk and climate change vulnerability. This article discusses some of potential disasters in Bandar Lampung City and looking forward to the city government's strategies in overcoming various potential disasters. The interviews and literature study were used as data collection techniques in this study. The city of Bandarlampung has adapting to climate change by arranging some regulations and policies. The governments make some regulations and invest on infrastructure toward climate change issues. The most important regulations, basically contained in the Bandar Lampung City RPJMD 2010-2015 and the *Changes in the Bandar Lampung City Medium-Term Development Plan 2016-2021* (Bandar Lampung City Regulation No. 09/2018). For addition, the investment related to infrastructure where manifested on the development of urban drainage and sanitation, the water distillation (2010 – still running), maps of population density and inundation locations making, Green Village program, Master Plan for Integrated Waste Management, Education on Climate Change Teaching Materials in Elementary and Junior High Schools, Groundwater Conservation Through Making Biopori Infiltration Holes, Tree Planting Movements and others.

Keywords: Climate Change, Government of Bandar Lampung, Floods, Adaptation, Mitigation.

1. PENDAHULUAN

Lampung merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan samudera, dan memiliki garis pantai yang panjang dan menempati posisi paling selatan pulau Sumatera, sehingga memiliki potensi iklim ekstrem dan bencana yang besar. Menurut data Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lampung menjadi salah satu daerah dengan risiko tinggi dan menempati posisi ke-16 dari 33 provinsi yang memiliki wilayah rawan bencana di Indonesia (Lampost, 2020). Berdasarkan data BPBD Kota Bandar Lampung, terdapat 45 titik rawan bencana di Bandar Lampung yang didominasi oleh potensi banjir (Kompas, 2020). Banyak faktor yang menyebabkan bencana banjir, misalnya seperti debit air yang besar, penyumbatan saluran air hingga sistem drainase yang perlu peremajaan. Upaya tanggap bencana dan sadar potensi bencana memang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan lembaga terkait, tetapi dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan timbulnya kerugian dan korban akibat bencana (United Nations, 2015).

Dampak perubahan iklim dapat berupa kekeringan dan polusi, tetapi dapat juga berupa bencana alam kecil maupun besar. Semisal, kebakaran hutan di Australia memburuk dengan penyebaran api yang cepat dan luas yang mencapai 7,3 juta hektar disebabkan karena suhu panas bumi di daerah tersebut sebesar 40°C (CNN, 2020). Banjir Bandang yang terjadi di Australia setelah kebakaran hutan dan banjir bandang yang terjadi di Tanggamus, Lampung, merupakan dampak curah hujan dan perubahan iklim ekstrem yang terjadi. Bencana-bencana tersebut membuat kesadaran aksi tanggap perubahan iklim dan bencana menjadi penting dilakukan untuk mencegah adanya korban dan kerugian, mengingat kesadaran tersebut masih cukup rendah. Masyarakat Lampung selayaknya perlu menyadari dan dapat turut berpartisipasi mencegah dampak buruk dari perubahan iklim/*climate change* di masa depan sebagaimana dunia juga turut mengupayakan salah satunya melalui SDGs.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan dunia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs terdiri dari *global goals* yang mengajak secara universal untuk beraksi mengatasi kemiskinan, melindungi dunia, dan menjamin semua orang dapat menikmati perdamaian dan kesejahteraan. SDGs memiliki 17 program mulai dengan pengentasan kemiskinan dan kelaparan hingga promosi perdamaian dan keadilan dan prinsip kemitraan. Selain 17 Program, SDGs juga memiliki 169 target yang bersifat global yang saling terkait satu sama lain. Pada tujuan/*goal* nomor 13 SDGs, terdapat target yang menyerukan penguatan kapasitas daya tahan dan adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam dan iklim di semua negara (UN, 2015). Sehingga dari kondisi bumi yang semakin buruk, iklim yang semakin ekstrem, upaya dari tingkat lokal menjadi penting untuk dilakukan. Pemerintah dan masyarakat harus mengerti kondisi geografis daerahnya, lokasi

yang dekat dengan sungai, laut, dan perbukitan akan memiliki potensi yang lebih besar dari daerah lain (Thomas & Larry, 2000). Lampung memiliki kondisi geografis yang beragam, perbukitan, garis pantai yang panjang, bahkan lembah dan rawa, Bandar Lampung di provinsi Lampung juga memiliki kontur tanah perbukitan, sehingga air akan dengan mudah turun dari dataran yang tinggi apabila terjadi hujan dengan durasi yang lama. Dengan kondisi seperti itu rencana yang dibentuk sebelum terjadi bencana akan mengurangi jumlah potensi korban dan kerugian (Valcik & Tracy, 2013, hal. 3-7), dari sinilah mengapa upaya tanggap bencana perlu dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan analisis situasi di atas, dapat diidentifikasi masalah yaitu, berkaitan dengan upaya Provinsi Lampung sebagai provinsi, khususnya kota Bandar Lampung, yang rawan akan bencana alam. Artikel ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan pemahaman oleh masyarakat tentang potensi bencana di Kota Bandar Lampung. Artikel ini juga menjelaskan upaya-upaya yang sudah dan perlu dilakukan oleh Provinsi Lampung dalam menanggapi potensi bencana sebagai pencapaian tujuan nomor 13 SDGs.

2. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan analisis data sekunder. Penelitian ini akan menjelaskan kebijakan tanggap bencana Kota Bandar Lampung, yang kemudian akan memberikan penjelasan upaya yang telah dilakukan. Hasil temuan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan pemahaman oleh masyarakat tentang potensi bencana di Kota Bandar Lampung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan iklim sudah menjadi permasalahan global sejak dimulainya revolusi industri. Dengan semakin berkembangnya teknologi industri, dampak polusi menjadi semakin serius dikarenakan kuantitas sektor industri juga yang semakin meningkat. Sehingga permasalahan ini menjadi permasalahan global yang harus menjadi perhatian seluruh negara di dunia. Indonesia adalah negara dengan jumlah laut yang lebih banyak dari daratan menjadi salah satu negara yang sangat terdampak perubahan iklim. Lampung merupakan provinsi di Indonesia yang dikelilingi oleh lautan dan memiliki kontur tanah berbukit, sehingga memiliki potensi iklim ekstrem dan bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Dari 2 kota besar yang ada di Provinsi Lampung, Bandar Lampung memiliki kontur tanah yang sedikit bergelombang dibanding lainnya, sehingga potensi banjir besar. Berdasarkan data BPBD Kota Bandar Lampung, terdapat 45 titik rawan bencana di Bandar Lampung yang didominasi oleh potensi banjir (Kompas, 2020).

Banyak faktor yang dapat menyebabkan banjir, misalnya seperti debit air yang besar, penyumbatan saluran air hingga sistem drainase yang perlu

peremajaan. Kesadaran aksi tanggap perubahan iklim dan bencana menjadi penting dilakukan untuk mencegah adanya korban dan kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor seperti yang sudah pernah terjadi di Bandar Lampung. Beberapa himbauan pembersihan parit dari Walikota Bandar Lampung sudah diberikan kepada Camat dan Lurah di setiap titik rawan bencana banjir. Himbauan tersebut juga ditujukan Herman kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan memperhatikan kebersihan parit disekitar perumahan masyarakat, mengingat cuaca yang tidak pasti dan berubah-ubah. Pembersihan parit dari sampah dapat menghindari berkumpulnya air dan menjadi genangan di sekitar parit yang tersumbat (Tribun Lampung, 2016). Genangan air akibat penumpukan sampah akan menjadi sarang nyamuk serta menyebabkan bibit penyakit, sehingga dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat sekitar.

Kota Bandar Lampung memperoleh dampak secara fisik dari perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan peningkatan permukaan laut. Saat ini diperkirakan terdapat 19 kelurahan dengan indeks kerentanan yang tinggi; dan dari jumlah tersebut, ada 14 kelurahan yang mempunyai indeks kapasitas adaptasi yang rendah serta 5 kelurahan yang lainnya mempunyai indeks kapasitas adaptasi yang tinggi (Mercy Corps, 2020, hal. 136). Penelitian ACCCRN (2010) menyebut Kota Bandar Lampung mengalami perubahan variabilitas dan tren iklim seperti suhu dan curah hujan tinggi bahkan Bandar Lampung diperkirakan mengalami pemanasan global yang menyebabkan kejadian lebih ekstrim di masa mendatang (Tampubolon, Avenzora, & Hermawan, 2018, hal. 188). Perubahan suhu permukaan bumi ini menyebabkan lampung rentan terhadap peningkatan curah hujan dan penurunan curah hujan sehingga peluang mengalami kekeringan maupun banjir menjadi semakin besar. Irjen Suroso Hadi Siswoyo, Kapolda Lampung, menyatakan bahwa Lampung merupakan daerah potensi rawan bencana, seperti banjir, gempa bumi, pembakaran hutan, longsor, dan kekeringan (Lampung Post, 2017).

Kawasan yang rentan di Lampung dapat diklasifikasikan menjadi kawasan rawan bencana alam, kawasan rawan longsor dan gerakan tanah, kawasan gelombang pasang dan tsunami serta kawasan rawan banjir (ACCRN, 2010). Beberapa wilayah yang rawan banjir, berpotensi di beberapa kecamatan, seperti Teluk Betung Timur, Barat dan Selatan, Panjang, Kemiling, Kedamaian, Rajabasa, Langkapura, Labuanratu, Tanjungsenang, dan Sukabumi. Potensi ini berlaku akibat hujan deras, luapan air sungai, daya serap air yang rendah, hingga pecahnya bendungan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya banjir bandang terakhir pada tahun 2016 dan 2017 dengan beberapa wilayah terdampak yakni Teluk Betung Timur, Barat, dan Selatan, serta di Panjang, Bumiwaras, Kedamaian, Kemiling dan Tanjungkarang Barat.

Pada tahun 2016, kota Bandarlampung juga mengalami peningkatan suhu. Sebagaimana data BMKG Kota Bandar Lampung (2016) memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 2013-2018 telah terjadi peningkatan suhu (1,2 oC) dan

kelembaban (2,1%) di Kota Bandar Lampung (Tampubolon, Avenzora, & Hermawan, 2018, hal. 190). Dampak berikutnya adalah munculnya cuaca ekstrem menyebabkan masa panen buah juga sulit diprediksi, selama sepuluh tahun terakhir buah bisa muncul di awal, tengah, dan akhir tahun. Peningkatan curah hujan selain menguntungkan juga ternyata dapat merugikan beberapa tanaman.

Kemudian pada tahun 2017, kota Bandarlampung menghadapi banjir bandang di delapan kecamatan. Banjir ini terutama disebabkan oleh intensitas hujan tinggi dan air pasang pada 21 Februari 2017. Pada tahun 2018, panen manggis dan durian di Lampung juga terganggu biasanya panen pada Maret dan April- baru dapat dipanen pada Desember. Kekeringan juga semakin meningkat akibat perubahan iklim, dampaknya salah satunya adalah kian maraknya kebakaran. Tahun 2018, BPBD mendata pohon tumbang sebanyak 92 sedangkan tahun 2017 sebanyak 80, dan kebakaran hutan di tahun 2018 menjadi 134 dari 101 di tahun 2017 (Gatra, 2018).

Pada Juni 2020, juga kembali terjadi banjir akibat meluapnya sungai Kalibalau Bandarlampung. Bencana ini diakibatkan hujan lebat yang melanda Kota Bandar Lampung sejak 11 Juni 2020. Peristiwa banjir ini juga membawa dampak sosial dan ekonomi dengan mengakibatkan hingga ratusan rumah penduduk di Kelurahan Kali Balau Kencana Kedamaian, Bandar Lampung, terendam banjir dengan tinggi hingga dua meter. Ironisnya, hujan hanya terjadi selama tiga jam namun dampaknya telah mengakibatkan luapan sungai hingga banjir. Beberapa daerah terdampak meliputi 20 titik yaitu, Kali balok, Jalan Gajah Mada, Jalan Tamim, Olok Gading, Taman Makam Pahlawan, Seberang Bukopin, Kelurahan Kupang Teba, Pasir Gintung, Geruntang (Kuala), Kedaton, IAIN, JagaBaya, Kelapa 3, Cut Mutia, Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, , Pasar Kangkung, Kaliawi, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Bakung, dan Keteguhan Banjir Rob terendam banjir. Titik paling terdampak 2 meter yaitu di Kelurahan Kupang dan Kelurahan Pasir Gintung, sedangkan di Kelurahan Bakung dan Keteguhan terjadi Banjir Rob mengalami banjir setinggi 1 meter dan menyebabkan 3 korban jiwa.

Semua pihak di Kota Bandarlampung penting untuk melipatgandakan komitmen guna ketahanan kota dalam rangka menghadapi perubahan iklim. Sayangnya, masih terdapat kelemahan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan persoalan kompleks *climate change* ini ke dalam perencanaan pembangunan jangka-panjang (Mercy Corps, 2020, hal. 137). Manajemen sampah yang tidak baik berisiko tinggi bagi kehidupan kota, khususnya akibat dari sampah yang mengganggu aliran air di saluran drainase, sehingga menimbulkan banjir di banyak titik. Selain itu, ada keterbatasan jumlah pelayanan untuk pengumpulan sampah oleh pemerintah kota dan belum adanya sistem yang terintegrasi di dalam pengelolaan, juga terdapat faktor minimnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah serta, lebih dari itu, menuju ke arah proses daur-ulang sampah untuk menjadi bahan-bahan yang berguna untuk kehidupan (Mercy Corps, 2011,

hal.ii). Studi tentang sampah di Kota Bandar Lampung pernah dilakukan tahun 2010, melalui riset “Studi dan Model Pengelolaan Sampah Terpadu dalam Upaya Penanggulangan Kerentanan terhadap Dampak Perubahan Iklim” di Kelurahan Kangkung dan Pasir Gintung karena dua area ini rentan terhadap banjir serta terdapat persoalan sampah. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengkaji kapasitas adaptasi masyarakat dalam persiapan menghadapi efek perubahan iklim serta peran sinergitas mereka dengan pemerintah, para peneliti memiliki kesimpulan yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan setahun kemudian, bahwa terdapat kurangnya kapasitas dalam pengelolaan sampah; oleh karena itu, disarankan agar pemerintah menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta untuk pengelolaan sampah organik sehingga dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan tidak berdampak bagi kehidupan kota secara luas (Mercy Corps, 2010).

Stinson dan Taylor berkesimpulan bahwa, kota Bandar Lampung sesungguhnya memiliki cukup sumberdaya untuk membangun rencana jangka panjang serta kesempatan dalam mengatasi/membina dampak dari perubahan iklim, terdapat pula beragam tantangan yang dihadapi terkait pengelolaan jejaring kemasyarakatan secara menyeluruh agar berperilaku adaptif/tanggap terhadap risiko bencana, manajemen bencana, serta respon dan koordinasi yang padu oleh aparat di dalam pemerintah daerah (Stinson & Taylor, 2010, hal. 59). Kedepan beberapa prioritas kebijakan telah direkomendasikan misalnya oleh Mercy Corps sebagai bentuk mewujudkan ketahanan kota Bandar Lampung terhadap perubahan iklim, yakni: pemberdayaan masyarakat, pembuatan sumur resapan biopori, pembangunan drainase terpadu, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengelolaan sampah terpadu, dan lain-lain (Mercy Corps, 2010).

Pemerintah Daerah Dan Upaya Penanggulangan Bencana

Perjanjian Paris menetapkan bahwa negara harus menghormati, mempromosikan dan memiliki kewajiban mengenai hak asasi manusia ‘dalam hal ini termasuk mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim’. Pelestarian lingkungan hidup termasuk upaya menjaga lingkungan hidup menjadi salah satu tugas negara karena lingkungan yang berkelanjutan juga merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Selain merupakan isu hak asasi manusia, perubahan iklim ini juga memiliki risiko keamanan (*security risk*) bagi kelangsungan eksistensi negara.

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mendefinisikan perubahan iklim sebagai ‘perubahan apa pun dari waktu ke waktu, baik karena variabilitas alami atau sebagai hasil dari aktivitas manusia’ (IPCC 2007: 21). *Climate Change* (CC) diantaranya memiliki dampak, pertama, perubahan parameter iklim yang meliputi temperatur, sea level rise, Precipitation, Tropical cyclones, Sea-level rise. Kedua, dampak iklim terhadap *human well-being and society yang meliputi ketersediaan air bersih, vegetation and land use, storm and*

flood events, dan dampak tidak langsung terhadap ekonomi dan social Indirect economic and social. Ketiga, adalah dampak *Non-linear effects and tipping points Atlantic Current, Monsoon transformation, Instability of the continental ice sheets, Collapse of the Amazon rainforest* (Schellnhuber, 2010). Provinsi Lampung juga turut akan terpapar dampak dari perubahan iklim tersebut, terutama dalam beberapa waktu ini Provinsi Lampung cukup rentan dengan kekeringan, ketersediaan air, dan banjir. Beberapa kelurahan yang memiliki risiko tinggi atau sangat rentan dari dampak perubahan iklim serta berlokasi di tepi aliran Sungai Way Awi, yakni Kelurahan Kota Karang dan Kelurahan Pasir Gintung. Daerah ini rawan karena penumpukan sampah pada aliran drainase yang tidak tersebar merata ke semua lokasi yang tepat, terlebih, genangan yang terjadi juga diakibatkan oleh sampah serta sedimen yang menumpuk. Dalam mengatasi banjir ini berbagai upaya termasuk desain pola aliran drainase yang didukung oleh ketersediaan lobang biopori menjadi penting (Mercy Corps, 2010).

Isu perubahan iklim ini perlu direspon tidak hanya oleh peran pemerintah pusat namun pemerintah daerah juga perlu mengambil tindakan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim yang lebih masif di masa yang akan datang. Beberapa diskusi akademik akhir-akhir ini, telah menarik pemerintah daerah sebagai agen yang turut bertanggung jawab dalam mempromosikan dan merespon risiko perubahan iklim. Fakta bahwa kota harus beradaptasi dengan perubahan iklim tidak lagi diperdebatkan. *The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* telah mengindikasikan bahwa mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi tanggung jawab public dan private, termasuk local government (LG) yang bertumpu pada 3 pilar diantaranya adalah *the development of relevant policies, investments in infrastructure and technologies and behavioural change* (Namo & Agyepong, 2019).

Setidaknya ada dua pendekatan dalam merespon perubahan iklim, yaitu pertama, mitigasi yang berkenaan dengan aksi untuk menurunkan bahaya emisi karbon, dan kedua adalah adaptasi yang menyangkut proses belajar untuk menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan perubahan iklim (Namo & Agyepong, 2019). Adaptasi perubahan iklim didefinisikan dalam *the IPCC Third Assessment Report (IPCC 2001:653)* sebagai *the 'adjustment in natural or human systems in response to actual or expected climatic stimuli or their effects, which moderates harm or exploits beneficial opportunities* ('penyesuaian dalam sistem alam atau manusia dalam menanggapi perubahan iklim aktual dan dampaknya, yang mendorong kerusakan atau mengambil manfaat dari peluang yang ada'). Artinya, adaptasi perubahan iklim berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan yang memungkinkan oleh manusia untuk menerima kenyataan perubahan iklim dan membangun kapasitas untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim tersebut dan umumnya dikaitkan dengan membangun kota-kota yang kompatibel dengan iklim, pembangunan infrastruktur yang tangguh serta pembangunan sistem lain yang dapat menahan dampak cuaca ekstrem seperti banjir, hujan es, gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran liar (Namo &

Agyepong, 2019).

Negara termasuk pemerintah lokal harus dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim. Saat ini dalam respon dan adaptasi terkait perubahan iklim, memperlihatkan meski banyak pemerintah daerah yang mengutamakan perubahan iklim dalam agenda pembangunan mereka; namun, ada sejumlah besar yang belum bertindak (Ruwanza and Shackleton 2016) (Salon et al. 2014) (Hoppe et al. 2014) (Doelle and Belfry Munroe 2012) (Bulkeley and Kern 2006). Pemerintah daerah yang tengah berupaya dalam merespon perubahan iklim juga mengalami beberapa kendala. Beberapa hal yang menyebabkan desentralisasi perubahan iklim menjadi tidak efektif adalah *pertama*, kapasitas administrasi yang terbatas, berbagai tinjauan ilmiah menggambarkan bahwa pengaturan struktural, otonomi fiskal, rangkaian sumber daya organisasi Pemda secara signifikan memengaruhi kemampuan administrasi Pemda untuk melakukan tugasnya (Ryan 2015). Batasan administratif yang melekat ini memengaruhi kapasitas Pemda untuk menanggapi biaya tambahan dan kebutuhan investasi perubahan iklim. *Kedua*, masalah politik desentralisasi, yaitu banyak peneliti setuju bahwa sampai pemerintah pusat menyerahkan kewenangan yang diperlukan dan cara yang sesuai kepada Pemda, mereka akan tetap sangat tidak efektif. Banyak bidang di negara-negara berkembang, pemerintah pusatnya membatasi ruang lingkup kekuasaan yang ditransfer ke Pemda dengan melembagakan pola dan sistem pengawasan baru yang memperkuat resentralisasi kekuasaan atas urusan lokal. *Ketiga*, adalah masalah Kompleksitas aksi bersama dan integrasi kebijakan perubahan iklim di tingkat lokal (Musah-Surugu, Ahenkan, and Bawole, 2018, hal. 6).

Pressman dan Wildavsky (1984) mempelajari implementasi kebijakan dan mengusulkan kompleksitas teori aksi bersama atau the complexity of joint action theory (CJAT) (Musah-Surugu, Ahenkan, and Bawole, 2018, hal. 590). Teori ini, pertama, menunjukkan bahwa bahkan di bawah kondisi yang paling menjanjikan, kebijakan baru masih cenderung gagal jika terlalu banyak aktor dengan minat yang tertunda terlibat dalam implementasinya. Argumen yang menggarisbawahi CJAT adalah bahwa kegagalan adalah konsekuensi dari kompleksitas yang terkait dengan “aksi bersama” atau “aksi kelompok” atau “aksi kolektif”. Kedua, ia berpendapat bahwa melibatkan banyak pemain yang mandatnya berasal dari undang-undang yang berbeda menciptakan begitu banyak “keputusan” dan “izin” yang secara simptomatis menunda tindakan kebijakan atau menyebabkan tidak adanya kebijakan. Ketiga, mereka berpendapat bahwa ketidakpastian atas hasil kebijakan pada arti-penting kelembagaan, aktor, status organisasi dan kepentingan pribadi menciptakan stagnasi kebijakan dan kebuntuan (van Bueren et al. 2003). Dengan menggunakan CJAT, kami berpendapat bahwa sifat kebijakan perubahan iklim, politik desentralisasi, serta sumber daya organisasi yang terbatas dari Pemda dan ketidakpastian perubahan iklim seperti berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan strategi adaptasi ke dalam tata kelola lokal (Musah-Surugu, Ahenkan, and Bawole, 2018).

Para scholars menyadari bahwa tingkat kerentanan perubahan iklim di tempat tertentu dalam hal ini menyangkut frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir, porsi penduduk kota yang terpapar, tingkat perkembangan kota, kekayaannya dan kondisi ekonominya serta institusi politik dan kemauan politik yang ada untuk memprioritaskan strategi adaptasi perubahan iklim (Nhamo & Agyepong, 2019, hal. 3). Selain itu, pendapat lain juga diungkapkan Filho (2018) bahwa kota-kota cenderung mengadopsi kebijakan iklim sebagai turunan dari tingkat nasional, dan hanya sejumlah kecil dari mereka yang memiliki mekanisme di tingkat kota (Filho, 2018). Situasi ini dikaitkan dengan pendanaan dan bantuan adaptasi iklim yang banyak bersumber dari internasional adalah fokus di tingkat negara, alih-alih berfokus pada lapisan di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, skenario ini membuatnya sulit untuk menerapkan dan mempertahankan kebijakan iklim di seluruh kota. Dalam artikelnya, Nhamo dan Agyepong menjelaskan bahwa di antara faktor-faktor kunci untuk meningkatkan adaptasi iklim adalah dengan penguatan institusi, yang dirancang secara nasional baik dalam level kota maupun pemerintahan nasional (Nhamo & Agyepong, 2019, hal. 3). Permasalahan biaya untuk adaptasi perubahan iklim ini telah dicatat sebagai kendala paling signifikan yang dihadapi sebagian besar Pemerintah daerah di negara berkembang (Cook dan Chu, 2018).

SDG's Dan Pemerintah Lampung

Pemerintah negara-bangsa menanggapi pelbagai persoalan dunia di abad 21 ini dengan formulasi yang disebut Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*, MDGs) 2000-2015. Sebagai suatu agenda yang masih belum terimplementasi dengan sukses, ia masih dilanjutkan dengan apa yang hingga kini dinamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) mencakup tahun 2015-2030. Berbeda dengan MDGs yang mencakup 8 tujuan, SDGs yang sekarang tengah diterapkan memperluas cakupannya menjadi 17 tujuan dan diikuti oleh 169 target serta begitu banyak indikator SDGs.

Sebagai sebuah agenda universal untuk secara gradual berupaya menjawab ragam persoalan di hampir semua segi kehidupan, sudah tentu kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan antarpemangku kepentingan mulai dari level global, nasional, dan provinsi, hingga ke kota sangat diperlukan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Implementasi SDGs, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) berperan dalam upaya koordinasi “bantuan untuk persiapan 5 tahun Rencana Aksi SDGs Daerah (Provinsi)”; “Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pencapaian SDGs nasional dan lokal”; dan “sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber hukum dan tidak mengikat lainnya”.

Sebagai pendukung dari segi legal-formal, juga ada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Implementasi SDGs yang merupakan regulasi yang sangat operasional dan urai memuat pedoman untuk menerapkan SDGs pada tingkat negara-bangsa. Inilah yang diacu oleh baik pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, terdapat pula Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs guna mendukung tujuan nasional dalam konteks rencana kerja dalam masa lima tahun terkait program serta kegiatan bermuatan SDGs. Adapun dokumen serupa juga berlaku untuk Rencana Aksi SDGs di tingkat provincial dan kabupaten/kota yang juga memuat rencana kerja 5 tahun.

Pada level negara-bangsa, Indonesia secara bertahap juga sudah menjadikan SDGs 2015-2030 sebagai suatu agenda nasional yang harus diimplementasikan, yakni melalui *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Implementasi SDGs*. Regulasi ini mendasarkan diri pada dokumen *Transforming Our World: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Secara praktis, peraturan presiden tersebut telah juga diterjemahkan menjadi Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (dan Jangka Menengah) Indonesia. Adapun pada tingkat daerah, dapat dikatakan, bahwa hampir semua calon kepala daerah telah mengisikan ‘nuansa’ SDGs ke dalam visi dan misinya saat berkampanye dan, begitu terpilih, telah pula menetapkan visi misi itu menjadi rencana kerja setelah melalui mekanisme politik di parlemen daerah yang bersangkutan.

Pola serupa juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Adapun *goals* ke-13 SDGs dalam konteks upaya “mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya” secara nyata terhubung dengan Misi ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2016-2021, yaitu “Meningkatkan daya dukung infrastruktur pada skala yang kuat untuk mendukung pengembangan ekonomi dan layanan sosial”. Dari segi koordinasi antarlembaga di Kota Bandarlampung soal masalah lingkungan, Koordinasi antar lembaga di Kota Bandarlampung yang membahas Masalah Lingkungan dilakukan dengan keterlibatan Tim Perubahan Iklim yang sudah terbentuk dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 381/23/HK/2009 Tanggal 12 Agustus 2009 tentang Tim Koordinasi Ketahanan Perubahan Iklim Kota Bandarlampung, dimana Tim Perubahan Iklim Kota Bandarlampung dalam perjalanannya sudah beberapa kali berganti Surat Keputusan Walikota Bandarlampung. Terakhir Tim Perubahan Iklim Kota Bandarlampung dengan Nomor : 67/IV.01/HK/2020 tentang Penunjukan Tim Koordinasi Perubahan Iklim Kota Bandarlampung Tahun 2020. Tim Perubahan Iklim terdiri dari Dinas Instansi Terkait, Perguruan Tinggi, LSM Lingkungan, Pemerhati Lingkungan, dll. Dengan adanya Tim Perubahan Iklim Kota Bandarlampung sampai dengan saat ini koordinasi berjalan dengan lancar (Juhandi Goeswi, Komunikasi Pribadi, 20 Agustus 2020).

Berisi pelbagai pihak secara lintas-dinas dan juga melibatkan kalangan

akademisi dan LSM yang memiliki fokus pada isu-isu lingkungan, tim ini bertugas untuk memformulasikan *roadmap* perubahan iklim yang terdiri dari target, program prioritas, dan pelaku kegiatan, termasuk pula melakukan pemantauan ke lapangan. Hal yang paling sentral ialah tugas untuk memberikan rekomendasi kepada Walikota. Dengan adanya tim ini, berarti Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah mempunyai basis gagasan dan inovasi yang kuat.

Perencanaan Kota Bandarlampung sudah dirancang untuk mekanisme adaptasi terhadap perubahan iklim, akan tetapi belum semuanya bisa direalisasikan karena beberapa hal diantaranya kendala anggaran dan kebijakan-kebijakan pimpinan daerah lainnya. Beberapa kegiatan/tindakan lebih untuk mempersiapkan respon. Sudah ada beberapa kegiatan dalam rangka Rencana Mitigasi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandarlampung Tahun 2016-2021 diantaranya penurunan GRC (*Glass Rainforced Concrete*/Efek Rumah Kaca) seperti biopori, penanaman pohon dan pengelolaan sampah. Selain itu penurunan GRC bisa dikorelasikan dengan prosentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbanding dengan luas wilayah Kota Bandarlampung. Dalam pelaksanaannya penanaman pohon saja tidak cukup karena disatu sisi jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) tiap tahun berkurang. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandarlampung terus tumbuh yang berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah kendaraan di Kota Bandarlampung. Situasi ini memerlukan kebijakan daerah yang konprehensif dengan lebih mendorong pertumbuhan moda transportasi massal dibandingkan dengan pertumbuhan kendaraan pribadi (Juhandi Goeswi, Komunikasi Pribadi, 20 Agustus 2020).

Tabel 5.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Periode 2016-2021 dan SDGs

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung 2016-2021	Sasaran dalam SDGs
Misi 1 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Sasaran 3: Memastikan hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia Sasaran 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
Misi 2 Tingkatkan kualitas layanan pendidikan masyarakat	Sasaran 4: Memastikan pendidikan berkualitas inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
Misi 3 Meningkatkan daya dukung infrastruktur pada skala yang kuat untuk mendukung pengembangan ekonomi dan layanan sosial	Sasaran 6: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua Sasaran 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi Sasaran 11: Membuat kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan Sasaran 13: Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya

	Sasaran 15: Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
Misi 4 Mengembangkan dan memperkuat ekonomi regional berdasarkan pada ekonomi rakyat	Sasaran 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana
	Sasaran 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan
	Sasaran 7: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
	Sasaran 8: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua
	Sasaran 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara
	Sasaran 12: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
	Sasaran 14: Melestarikan dan menggunakan sumber daya laut, laut, dan laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 5 Mengembangkan Masyarakat yang Beragama dan Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Lokal	Goal 17: <i>Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development</i>
Misi 6 Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan sektor bisnis	Sasaran 16: Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

Sumber: (Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2018)

Upaya Tanggap Bencana Pemerintah Kota Bandar Lampung

Upaya pemerintah Kota Bandarlampung dilakukan melalui beragam bentuk mulai dari penetapan peraturan formal, sosialisasi, mitigasi dan adaptasi. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian Daerah dan Kota, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung. Kerjasama dilakukan baik dalam level kebijakan dan implementasinya maupun masalah anggaran. BPBD Bandar Lampung mendapatkan dukungan dari kepala daerah. Eddy menceritakan saat pertama memimpin BPBD, anggaran masih sekitar Rp 4 milyar. Tiga tahun kemudian, anggaran dinas dengan dukungan 3 pleton ini mendapatkan anggaran mencapai Rp 29 milyar. Besarnya anggaran tersebut dialokasikan tidak hanya untuk tanggap darurat tetapi pada kesiapsiagaan. Menurut Eddy, kesiapsiagaan lebih penting dibandingkan pada upaya tanggap darurat bencana (BNPB, 2017).

Upaya merespon perubahan iklim, setidaknya telah dimulai sejak tahun 2009. Pada 2009 kota Bandarlampung dipilih oleh Mercy Corps Indonesia dan Rockefeller Foundation sebagai salah satu kota di Indonesia --selain Kota Semarang-- bersama dengan delapan kota lain di Asia Tenggara sebagai kota dampingan *Asian Cities Climate Change Resilience Network* (ACCCRN) (Maulana Mukhlis, 2016, hal. 7). Dukungan ACCCRN di Kota Bandar Lampung melampaui sejumlah capaian dengan dihasilkannya kajian kerentanan (Vulnerability Assesment), penerapan proyek percontohan (Pilot Project) adaptasi perubahan iklim, studi sektoral (Sector Studies) dan disisipi dengan sejumlah dialog pembelajaran (SLDs) secara berkelanjutan. Sebelum dilakukannya implementasi perubahan iklim dalam skala kota, capaian tersebut ditinjau lebih mendalam dan ditindaklanjuti melalui penyusunan Strategi Ketahanan Kota (City Resilience Strategy/CRS, serta dokumen Indikator Ketahanan Kota (City Resilience Indicator) dan kumpulan catatan naskah (concep note) sebagai alternatif upaya lain pada skala yang lebih kecil (sekolah, kawasan nelayan, permukiman padat, dsb) (Maulana Mukhlis, 2016,hal 8).

Pada 2010 Pemerintah Lampung membuat Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bandar Lampung. Perda ini berisi tentang rencana aksi adaptasi perubahan iklim kurun waktu 2010- 2015. Pada pertengahan tahun 2010, ACCCRN telah memasuki tahap ke-3 yang dilaksanakan hingga 2016. Tahap ini menitikberatkan pada upaya implementasi program adaptasi dalam rangka membangun ketahanan perubahan iklim perkotaan. Pada tahun 2011, telah dilaksanakan satu proyek intervensi adaptasi skala kota mengenai “Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah Padat Terpadu untuk Meningkatkan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim”. Kemudian, pada 2012-2014, tercatat dua proyek intervensi adaptasi lain dilaksanakan meliputi, pertama, Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Guru dan Siswa dalam Ketahanan Kota terhadap Perubahan Iklim. Kedua, Konservasi Air Bawah Tanah dengan Penerapan Teknologi Lubang Resapan Biopori.

Pemerintah Kota Bandarlampung salah satunya pada tahun 2015, telah berhasil membuat instrument formal terkait pengaturan sampah melalui peraturan daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015. Perda ini berisi ketentuan agar setiap pihak memiliki pengaturan dan pengelolaan sampah. Pemerintah juga bahkan mengatur sanksi atas pelanggaran pembuangan sampah tidak pada temaptanya maupun terhadap industry yang tidak memperhatikan masalah pengelolaan limbah dan sampah. Bentuk sanksi meliputi sanksi administrasi, sanksi social, dan sanksi pidana.

Sayangnya hingga 2020, belum ada bentuk sanksi yang direalisasikan (Khaidar, Komunikasi Pribadi, 2020). Perilaku membuang sampah di aliran sungai, hingga berujung pada dampak banjir di tahun 2017 dan 2020 sepertinya

tidak ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi. Hal ini dapat dimaklumi karena mencari siapa yang bertanggungjawab dalam kasus lingkungan adalah kolektif, sehingga upaya yang dilakukan lebih baik menitikberatkan pada pencegahan ketimbang sanksi setelah dampak dirasakan. Pemerintah Bandarlampung saat ini fokus pada *CRIC Project (Climate Resilient and Inclusive Cities)* Beberapa strategi prioritas yang menjadi agenda kota Bandarlampung adalah pelibatan kelompok perempuan, program kotak, satgas penanggulangan bencana (BPPD), penyediaan air bersih, pembangunan talud di wilayah rawan bencana, dan kegiatan kampung hijau yang dimulai sejak 2013 (Herman HN, 2020).

Upaya Pemerintah kota Tahun 2015-2016

Pada tahun 2016, beberapa kali terjadi banjir besar di beberapa kecamatan di Bandar Lampung. Dengan ketinggian air mencapai sekitar satu setengah meter, mengakibatkan banyak korban dan kerugian materi. Banjir tersebut terjadi karena volume hujan yang tinggi dan waktu hujan yang lama. Menanggapi bencana tersebut walikota Bandar Lampung memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar 10 sampai 30 juta rupiah untuk setiap warga (Kabar 24, 2016). Selain diakibatkan volume air yang tidak tertampung oleh parit-parit kota, banjir juga dapat terjadi dari volume air sungai yang terlalu besar, seperti kasus banjir yang sudah sering terjadi di sekitar Sungai Way Awi (Tribun News, 2016). Bencana banjir tidak hanya terjadi di daerah pinggir aliran sungai atau pinggir perkotaan, di tahun 2016 banjir juga pernah terjadi di jalan protokol Bandar Lampung, setinggi sekitar 40cm (Tribun News, 2016). Dengan catatan banjir yang sudah sering terjadi di Bandar Lampung, Pemerintah bersama badan meteorology dan geofisika telah memantau curah hujan serta potensi-potensi lain yang dapat menyebabkan banjir serta bencana lain seperti tanah longsor (Tribun News, 2016). Upaya pencegahan ini memang menjadi penting bagi daerah yang berpotensi bencana banjir dan longsor, dengan curah hujan dan iklim yang tidak menentu.

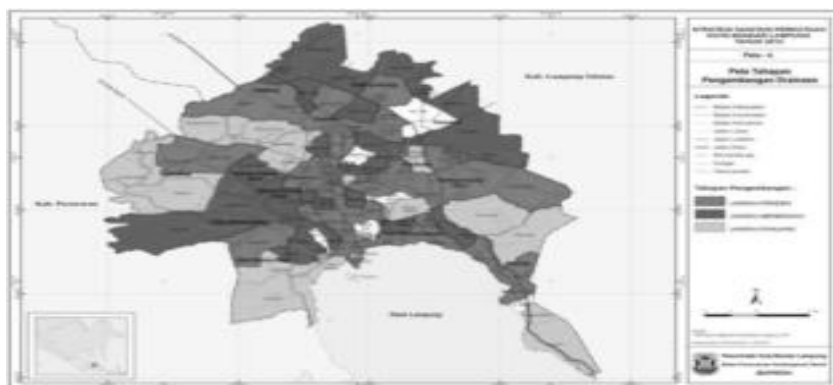
Proses penumpukan limbah dan sampah kecil yang terjadi bertahun-tahun menjadi permasalahan yang dianggap tidak serius. Banjir yang terjadi di daerah Telukbetung Selatan pada Maret 2016 lalu belum pernah terjadi sebelumnya sejak terakhir kali terjadi tahun 1983. Pada bencana kali ini, BPBD Kota Bandar Lampung mengerahkan 70 anggotanya untuk membantu proses evakuasi (VIVA, 2016). Berdasarkan pengalaman-pengalaman banjir yang sudah terjadi, Sekretaris BPBD Kota Bandar Lampung menyampaikan terdapat beberapa Kelurahan yang berpotensi banjir, yaitu Kalibalok Kencana, Kaliawi, Way Lunik, Pasir Gintung, Negeri Olok Gading, Kuripan, dan Pakuan. Bersama ini BPBD juga menyiapkan 50 personel untuk berjaga 24 jam sebagai bentuk upaya siaga (Okezone, 2016). Dikarenakan sistem drainase kota merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan untuk mencegah banjir, Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Dinas Pekerjaan Umum mengerjakan pengerukan drainase di

Kecamatan Panjang yang selalu menjadi langganan banjir. Pekerjaan pengerukan drainase tersebut disampaikan Walikota dilakukan di jalan Yos Sudarso dan Moch Salim (Harian Pilar, 2015).

Upaya-upaya tersebut di atas merupakan beberapa upaya pemulihan dan pencegahan yang bersifat langsung dan kondisional. Terdapat beberapa upaya tertulis Kota Bandar Lampung dalam merespon perubahan iklim, yang mana searah dengan tujuan ke 13 SDGs, seperti pembuatan peta-peta kepadatan penduduk, lokasi genangan, pengembangan drainase dan sanitasi kota (BAPEDA, 2016). Berdasarkan peta Area Beresiko Sanitasi Kota Bandar Lampung misalnya wilayah pesisir Kota Bandar Lampung (Kec. Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Panjang, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat dan Sukabumi memiliki tingkat resiko sedang untuk permasalahan sanitasi, dan 7 Kecamatan lainnya termasuk pada resiko rendah.

Selain itu, telah dibuat juga lokasi potensi genangan-genangan di Kota Bandar Lampung, yang dapat memberikan peringatan dini bagi masyarakat dan pemerintah untuk memperhatikan lagi keselamatan dan upaya pemulihan bagi daerah-daerah yang menjadi titik genangan. Penentuan titik genangan ini mampu menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan tindakan pencegahan berupa memperbaiki sistem drainase dan kebersihan sungai. Mengetahui lokasi padat penduduk di Kota Bandar Lampung dapat juga menjadikan prioritas program peremajaan sanitasi dan drainase ditentukan di titik mana. Dikarenakan semakin padat penduduk akan semakin banyak pula aktifitas dan limbah yang dihasilkan. Kondisi ini membutuhkan prioritas kebijakan dari pemerintah. Program-program peremajaan jalur air dan limbah sangat penting untuk diterbitkan di Bandar Lampung, seperti program pengembangan drainase perkotaan yang menjadi andalan pemerintah kota, dibawah ini merupakan peta pengembangan drainase.

Gambar 1. Peta Pengembangan Drainase Kota Bandar Lampung



Adapun lokasi-lokasi yang menjadi target pengembangan drainase jangka pendek, menengah dan panjang di Kota Bandar Lampung adalah:

Tabel. Lokasi Pengembangan Drainase di Bandarlampung

No	Nama Kelurahan Dalam Target Cakupan Layanan		
	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1	Pesawahan	Bakung	Sukamaju
2	Kankung	Kuripan	Keteguhan
3	Teluk Betung	Negeri Olok Gading	Pewata
4	Bumi Waras	Talang	Kota Karang
5	Garuntang	Sumur Putri	Gunung Mas
6	Sukaraja	Batu Putuk	Kedaung
7	Way Lunik	Sukadana Ham	Sumber Agung
8	Pidada	Susunan Baru	Pinang Jaya
9	Panjang Utara	Durian Payung	Kemiling Permai
10	Kupang Kota	Gotong Royong	Langkapura
11	Gulak-Galik	Rawa Laut	Gunung Terang
12	Pengajaran	Pecoh Raya	Segala Mider
13	Sumur Batu	Ketapang	Gedong Air
14	Pahoman	Sawah Berebes	Kebung Jeruk
15	Enggal	Jagabaya II	Kalibalau Kencana
16	Pelita	Jagabaya III	Tanjung Gading
17	Palapa	Gunung Sulah	Way Gubak
18	Kaliawi	Sukamenanti	Way Laga
19	Kelapa Tiga	Sepang Jaya	Karangan Maritim
20	Sukajawa	Kampung Baru	Serengsem
21	Penengahan	Labuhan Dalam	
22	Pasar Gintung	Rajabasa Raya	
23	Gunung Sari	Rajabasa Jaya	
24	Sawah Lama	Way Kandis	
25	Tanjung Agung	Perumnas Way Kandis	
26	Kota Baru	Harapan Jaya	
27	Tanjung Baru	Sukarame	
28	Kedamaian	Sukabumi	
29	Campang Raya		
30	Sukabumi Indah		
31	Sidodadi		
32	Surabaya		
33	Kedaton		
34	Way Halim Permai		
35	Perumnas Way Halim		
36	Labuhan Ratu		
37	Tanjung Senang		
38	Gedung Meneng		
39	Rajabasa		
40	Sumber Rejo		
41	Beringin Raya		

Upaya Pemerintah kota Tahun 2017-2018

Pemerintah Kota Bandarlampung telah menjalankan upaya adaptasi setidaknya sejak tahun 2010. Beberapa upaya seperti penanaman pohon digalakan oleh pemerintah provinsi termasuk juga pemerintah kota. Pemerintah Provinsi

membuat Program Gerakan Lampung Menghijau (Gelam) pada tahun 2017. Dalam Program Gelam ini, setiap orang yang tinggal di Lampung harus menanam lima sampai enam pohon dan hal ini juga turut diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung. Tidak hanya itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung juga banyak memberi bantuan kepada berbagai pihak untuk dalam rangka menunjang ruang terbuka hijau. Salah satunya, dengan melakukan penanaman ratusan bibit pohon di Universitas Lampung (Unila), Pemkot Bandarlampung memberi bantuan 200 bibit pohon, dan juga melepas 600 ekor burung untuk di Unila pada 17 Maret 2017. Kemudian sejak tahun 2018, Pemerintah kota juga mulai melaksanakan kegiatan penyediaan air bersih dengan mekanisme KPBU yang menyasar 60.000 SR.

Pada kasus Banjir yang terjadi tahun 2017, terlihat peran besar dari BPBD Kota Bandarlampung. BPBD Kota bandar Lampung membentuk pos komando (posko). Posko dibentuk untuk memberikan arahan terkait pekerjaan setiap hari. Koordinasi berlangsung dan distribusi bantuan diarahkan ke Posko sehingga tidak ada tumpang tindih. Pada tahun 2017, ada upaya pengecekan tanggul secara rutin. Pemantauan tanggul sungai akan selalu dilakukan guna mencegah bencana. Tim BPBD berkoordinasi dengan tim di pos penjagaan bila melihat banyak lokasi tergenang dan berpotensi banjir, termasuk membersihkan sumbatan pada drainase misalnya dengan menyedot air menggunakan mesin pompa ketika banjir (BNPB, 2017). Berdasarkan kasus banjir tahun 2017 ini, memperlihatkan upaya pemerintah masih sangat reaktif, dikarenakan memang dampak perubahan iklim belum dapat dideteksi dengan baik.

Selain itu, dikenal juga Program Kelurahan Tanggap bencana. Kota Karang dan Kota Karangraya menjadi percontohan kelurahan tanggap bencana. Kelurahan tanggap bencana merupakan bentukan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPPD juga membentuk relawan, yang tugasnya bertindak sebagai tim respons cepat sebelum BPBD datang saat bencana terjadi. BPBD juga bakal berkeliling di daerah rawan banjir, terutama pada saat hujan.

Bandarlampung sejak 2009 berupaya menjadi *resilient city on climate resilience* dengan aktifitas adaptasi. Adaptasi adalah upaya untuk dapat hidup berdampingan dengan perubahan iklim. Target di tahun 2015- 2020 adalah menjadi kota yang responsif dan dapat cepat pulih saat terjadi bencana. Sejak tahun 2010, beberapa kegiatan berhasil dijalankan pemerintah dalam rangka bentuk adaptasi perubahan iklim. Kegiatan tersebut diantaranya, pertama, Penyulingan air (2010 – masih berjalan) yang berlokasi Kelurahan Panjang Selatan dengan target Penerima Manfaat :12.107 penduduk kelurahan. Sayangnya penyulingan air ini dikelola oleh individu, selain itu kedua, ada program Kampung Hijau- di Panjang Selatan, membuat kerajinan tangan dari daur ulang sampah plastik, pupuk kompos, demplot vertikultur (tanaman sayur/buah/bunga dalam pot

plastik atau *poly bag*), ketiga, Rencana Induk Pengelolaan Sampah Terpadu merupakan pengembangan dari Studi dan Model Pengelolaan Sampah Terpadu dalam Upaya Penanggulangan Kerentanan terhadap Dampak Perubahan Iklim yang disusun pada tahun 2010 oleh Tim dari Universitas Lampung. Keempat, Pendidikan Bahan Ajar Perubahan Iklim di SD dan SMP (2012-2015). Lokasi: SDN 1 Langkapura, SDN 1 Karang Maritim, SMPN 7, dan SMPN 27 Bandar Lampung, dan target implementasi di seluruh Bandar Lampung. Kelima, Konservasi Air Tanah Melalui Pembuatan Lubang Resapan Biopori (2012-2014) Lokasi: Kelurahan Percontohan Langkapura dan 4 kelurahan perluasan (Sidodadi, Tanjung Seneng, Tanjung Karang Pusat, Beringin Jaya) di Bandar Lampung, Target Penerima Manfaat: 295.798 penduduk kelurahan. Biopori sebagai gerakan bersama untuk konservasi air tanah di Bandar Lampung dengan Komitmen pemerintah kota melalui pendanaan APBD sejak 2012-sekarang. Keenam, Pencanangan Lingkungan Hijau sebagai bagian dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 2013 Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan jumlah Ruang Terbuka Hijau di Bandar Lampung.

Selain itu, berbagai upaya pengelolaan kota yang ramah lingkungan terus dilaksanakan di Bandar Lampung seperti, kegiatan tanam pohon rutin dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta di kota Bandar Lampung. Mulai tahun 2010 hingga sekarang, lebih dari 40.000 pohon telah ditanam di berbagai wilayah kota Bandar Lampung. Mulai tahun 2010, DLH Kota Bandar Lampung rutin melaksanakan kegiatan kali bersih. Sebanyak 45 orang tenaga kerja, 1 *dump truck*, 2 mobil *pick up*, dan 5 motor roda-3 dikerahkan dalam setiap kegiatan bersama. Sejak tahun 2011, Dinas Kebersihan juga rutin melaksanakan kegiatan bersih pantai dengan dukungan dana APBD tidak kurang dari Rp. 1,75 M (Herman HN, 2020).

Meskipun, pemerintah Kota Bandarlampung sudah membuat berbagai instrument formal sejak tahun 2010 namun implementasi dan hasilnya belum dapat terlihat. Salah satu contohnya pada penilaian Adipura Periode 2017-2018, Bandarlampung nyatanya masih dikategorikan sebagai kota besar terkontaminasi di Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Radar Lampung, 2019). Berbagai masalah perlu mendapat perhatian terkait hal ini seperti, persoalan sampah, pemukiman warga hingga TPA 'berwarna merah'. Kedua, masalah sungai yang seringkali menjadi tempat pembuangan limbah, mulai dari limbah tinja, sampah rumah tangga, perusahaan, dan lainnya yang menyebabkan pencemaran sungai. Ketiga, sistem drainase yang belum baik, mengakibatkan sering terjadi banjir saat musim hujan terjadi. Beberapa masalah ini dapat menyebabkan dampak perubahan iklim semakin mudah dan berpotensi besar terjadi di Bandarlampung. Setidaknya ada 21 sungai yang keadaan dan kualitas airnya sangat buruk (Radar Lampung, 2019).

Berdasarkan pemaparan upaya di atas dapat dilihat bahwa, upaya adaptasi memang baru banyak dilakukan sejak tahun 2010, sehingga hasil implementasi tersebut masih belum terlihat. Peran pemerintah kota di masa depan tetap menjadi utama dalam mendorong keberlanjutan upaya adaptasi. Selain itu, tidak semua program adaptasi melibatkan pemerintah kota Bandarlampung secara langsung. Kedepan, pemerintah dapat lebih banyak terlibat dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada individu penggiat lingkungan agar upaya adaptasi perubahan iklim dapat terus berkelanjutan.

Upaya Pemerintah kota Tahun 2019-2020

Sumber pendanaan untuk pembangunan kota terdiri dari dua. *Pertama*, Sumber utamanya berasal dari Pemerintah Pusat berupa DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak & Non Pajak, dan DID (Dana Insentif Daerah). *Kedua*, PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan lain lain Daerah, Pendapatan Asli yang dipisahkan (Juhandi Goeswi, Komunikasi Pribadi, 20 Agustus 2020).

Sementara itu, dari segi mitigasi, implementasi Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan belum berjalan optimal bahkan bisa dikatakan sanksi belum diterapkan. Padahal, ia mengamanatkan bahwa terdapat tiga sanksi terhadap perorangan ataupun badan hukum yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan termasuk membuang sampah sembarangan dengan sanksi yang bersifat administratif, sosial, dan pidana (Juhandi Goeswi, Komunikasi Pribadi, 20 Agustus 2020).

Upaya mitigasi yang berwujud pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor serta pembatasan jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan jalan raya di Kota Bandar Lampung pun, sejauh yang peneliti amati, juga belum dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Padahal, di sisi lain, menurut Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung, tutupan hutan kota yang dimiliki luasnya masih di bawah 20 persen, tentu jauh dari upaya untuk merespon perubahan iklim yang ekstrem.

Selanjutnya, untuk menelusuri apa saja upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 13 ini, khususnya tahun 2019 hingga 2020, penting juga untuk mengacu pada dokumen *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021* (Perda Kota Bandar Lampung No. 09 Tahun 2018).

Dari segi kebijakan yang adaptasi, terdapat begitu banyak strategi prioritas dalam upaya ketahanan Kota Bandar Lampung menghadapi perubahan iklim yang pada dasarnya telah mulai dilakukan sejak tahun 2010 hingga penelitian ini dilakukan, yaitu (Walikota Bandar Lampung, 2020):

1. Pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim
2. Perkembangan daya serap dan pori pori dengan baik
3. Pemeliharaan dan pembangunan drainase terintegrasi
4. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
5. Pembentukan UPT (Unit Pelayanan Terpadu)
6. Meningkatkan cakupan layanan air bersih
7. Pembangunan dinding penahan (talud) di daerah rawan longsor
8. Pengaturan permukiman yang tahan terhadap iklim dan bencana.
9. Pengelolaan limbah padat yang terintegrasi
10. Penegakan peraturan kota
11. Penghematan air dan gunakan kembali
12. Pertanggungan
13. Pengelolaan sampah terpadu (rumah tangga, pasar,
14. industri)
15. Filter air payau
16. Konstruksi tanggul pemecah air
17. Mengontrol intrusi air laut
18. Penyelamatan biota laut

Kebijakan lain yang bersifat adaptasi (dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang) ialah kegiatan tanam pohon rutin dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta di kota Bandar Lampung. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung secara rutin sejak tahun 2010 telah melaksanakan “kegiatan kali bersih” yang didukung oleh 45 orang tenaga kerja, 1 *dump truck*, 2 mobil *pick up*, dan 5 motor roda-3 dikerahkan dalam setiap kegiatan bersama. bahkan, mulai tahun 2011, Dinas Kebersihan Kota juga secara rutin telah melaksanakan “kegiatan bersih pantai” dengan dukungan dana APBD sekitar Rp1,75 miliar (Walikota Bandarlampung, 2020). Tindakan nyata adaptasi lainnya yang telah dan tengah dilakukan hingga kini ialah penyulingan air dan kampung hijau di Kelurahan Panjang Selatan, pengelolaan sampah terpadu, termasuk pula Pendidikan Bahan Ajar Perubahan Iklim di SD dan SMP (yang pada tahun 2012-2015 berlokasi di SDN 1 Langkapura, SDN 1 Karang Maritim, SMPN 7, dan SMPN 27 Bandar Lampung) serta Konservasi Air Tanah Melalui Pembuatan Lubang Resapan Biopori (Kelurahan Percontohan Langkapura dan 4 kelurahan perluasan (Sidodadi, Tanjung Seneng, Tanjung Karang Pusat, Beringin Jaya) (Walikota Bandarlampung, 2020).

4. KESIMPULAN

Bandar lampung merupakan kota yang cukup rawan dampak perubahan iklim. Beberapa dampak perubahan iklim dirasakan dengan terjadinya beberapa

bencana seperti banjir, pembakaran hutan, longsor, dan kekeringan, serta polusi udara akibat perkembangan industri dan ekonomi. Perencanaan Kota Bandarlampung sudah dirancang untuk mekanisme adaptasi terhadap perubahan iklim, akan tetapi belum semuanya telah direalisasikan karena beberapa hal diantaranya kendala anggaran dan kebijakan-kebijakan pimpinan daerah lainnya. Beberapa kegiatan/tindakan cenderung berupa respon yang dilakukan untuk pemulihan dan pencegahan yang bersifat langsung dan kondisional melalui berbagai program dan juga mengembangkan strategi jangka menengah dan panjang untuk mengelola bencana. Rencana untuk meningkatkan infrastruktur untuk pengendalian bencana iklim seperti sistem drainase dan tanggul di pesisir pantai telah disiapkan Terdapat beberapa upaya tertulis Kota Bandar Lampung dalam merespon perubahan iklim, yang mana searah dengan tujuan ke 13 SDGs, seperti pembuatan peta-peta kepadatan penduduk, lokasi genangan, pengembangan drainase dan sanitasi kota, tanam pohon, kegiatan bersih sungai dan berbagai upaya konservasi. Pemerintah juga membuat sanksi bagi perorangan ataupun badan hukum yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan termasuk membuang sampah sembarangan dengan sanksi yang bersifat administratif, sosial, dan pidana.

Tantangan masih banyak dihadapi oleh pemerintah terutama terkait kesadaran masyarakat desain drainase menjadi tidak efektif tanpa pemeliharaannya kebersihan Bersama. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kesadaran yang sangat penting untuk mempertimbangkan perubahan iklim dalam merancang sistem kontrol bencana iklim tersebut dalam dokumen yang lebih formal dan menyeluruh.

Pada Tahun 2010, terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bandar Lampung 2010-2015 yang di mana di dalamnya telah memuat secara eksplisit tentang aksi adaptasi perubahan iklim yang akan dilakukan. Penentuan kegiatan dalam CRS yang dapat diintegrasikan ke dalam program pemerintah kota dilakukan dengan menentukan program yang sesuai dengan sektor-sektor pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka pelaksanaan yang tidak terlalu panjang, dan mampu dilaksanakan dengan memanfaatkan kapasitas lokal. Pemilihan strategi alternatif ini dilakukan dengan mengadakan berbagai workshop atau rapat internal antara Tim Koordinasi Ketahanan Perubahan Iklim Kota Bandar Lampung yang dibentuk oleh Walikota Bandar Lampung dengan tim penyusun RPJMD Kota Bandar Lampung 2010-2015 hingga disepakatinya Perda No. 10 Tahun 2010 tersebut. Hingga tahun 2020 beberapa strategi prioritas yang menjadi agenda kota Bandarlampung adalah pelibatan kelompok perempuan, program kotaku, satgas penanggulangan bencana (BPPD), penyediaan air bersih, pembangunan talud di wilayah rawan bencana, dan kegiatan kampung hijau yang dimulai sejak 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Cities Climate Change Resilience Network, (2010), diakses dari <https://accrnindonesia.files.wordpress.com/2012/08/4-strategi-ketahanan-kota-bandar-lampung-2011-20301.pdf>
- BNPB, 2015, Strategi Sanitasi Kota Bandar Lampung, POKJA AMPL Kota Bandar Lampung (<https://bnpb.go.id/berita/koordinasi-efektifkan-penanganan-bencana-di-kota-bandar-lampung>)
- CNN, (18 Februari 2020), Jessie Yeung to Australia's deadly wildfires are showing no signs of stopping. Here's what you need know, diakses <https://edition.cnn.com/2020/01/01/australia/australia-fires-explainer-intl-hnk-scli/index.html>,
- Deni Zulniyadi, (2017), Lampung Post: diakses dari <https://www.lampost.co/berita-lampung-masuk-zona-merah-rawan-bencana-alam.html>).
- Gatra, (2018), Diakses dari (<https://www.gatra.com/detail/news/372095-Bencana-di-Lampung-Tahun-2018-Didominasi-Kebakaran-dan-Pohon-Tumbang>)
- Godwell Nhamo and Adelaide O. Agyepong, (June 26, 2019) "Climate Change Adaptation and Local Government: Institutional Complexities Surrounding Cape Town's Day Zero," *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies* 11, no. 3: 2, <https://doi.org/10.4102/jamba.v11i3.717>. P.2
- Hans Joachim Schellnhuber, (Routledge, 2010), *Climate Change as a Security Risk*, 0 ed., <https://doi.org/10.4324/9781849775939>
- Harian Pilar. (2016) Antisipasi banjir, Drainase Yos Sudarso Dikeruk, Harian Pilar: Bandar Lampung. Di akses dari <http://www.harianpilar.com/2015/02/04/antisipasi-banjir-drainase-yos-sudarso-dikeruk/>
- Kompas, (2020), 45 Titik Rawan Bencana Kepung Bandar Lampung, Bahaya Banjir hingga Tsunami Mengintai, Kompas Regional, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/07/10565461/45-titik-rawan-bencana-kepung-bandar-lampung-bahaya-banjir-hingga-tsunami>
- M. Syahrani W. Lubis. (2016). Hujan Deras, Bandar Lampung Dihantam Banjir, Kabar 24: Bandar Lampung. diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20161027/15/596725/hujan-deras-bandar-lampung-dihantam-banjir>

- MercyCorps. 2020. 'Kajian Kerentanan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Kota Bandar Lampung', hlm. 136.
- MercyCorps. (2020). 'Kajian Kerentanan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di Kota Bandar Lampung', hlm. 137.
- MercyCorps. (2011). "*Masterplan* Pengelolaan Sampah Padat Terpadu dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim di Kota Bandar Lampung", hlm. ii.
- MercyCorps. (2010). "Studi dan Model Pengelolaan Sampah Terpadu dalam Upaya Penanggulangan Kerentanan terhadap Dampak Perubahan Iklim".
- MercyCorps. (2010) "Studi Pengelolaan Drainase dengan Model Resapan Air untuk Menunjang Ketersediaan Air Tanah".
- MercyCorps. (2010). "Strategi Ketahanan Kota Bandar Lampung terhadap Perubahan Iklim 2011- 2030".
- Muharram Candra Lugina, (18 Februari 2020) Lampung Masuk Daerah Risiko Tinggi Rawan Bencana di Indonesia, Lampung Post, diakses dari lampost.co/berita-lampung-masuk-daerah-risiko-tinggi-rawan-bencana-di-indonesia.html, diakses
- Musah-Surugu, Albert Ahenkan, and Justcie Nyigmah Bawole, (April 2019) "Too Weak to Lead: Motivation, Agenda Setting and Constraints of Local Government to Implement Decentralized Climate Change Adaptation Policy in Ghana," *Environment, Development and Sustainability* 21, no. 2: 587–607, <https://doi.org/10.1007/s10668-017-0049-z>.
- 45 Titik Rawan Bencana Kepung Bandar Lampung, Bahaya Banjir hingga Tsunami Mengintai, Kompas Regional, (18 Februari 2020) diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/01/07/10565461/45-titik-rawan-bencana-kepung-bandar-lampung-bahaya-banjir-hingga-tsunami>
- Novelina Tampubolon, Ricky Avenzora, Rachmad Hermawan. 2018. Orientasi Perempuan dalam Mendukung Perbaikan Iklim Global Indonesia: Studi Perbandingan Kota Bandarlampung dan Bogor. *Media Konservasi*. Vol. 23 No. 2 Agustus 2018: 187-193
- Olivia Stinson and John Taylor, (August 2010), Mercy Corps Indonesia, "Synthesis Report: Bandar Lampung", hlm. 59.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung, (2018) *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021* (Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung).

- Prabu Adi. (2016) Banjir Bandang Terjang Kota Bandar Lampung, VIVA.CO: Bandar Lampung. Di akses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/748058-banjir-bandang-terjang-kota-bandar-lampung>
- Presentasi Walikota bandarlampung, (30 Januari 2020), Drs. H. Herman HN, Balai Agung Jakarta City Hall.
- Radar Lampung, (2019), Radar Lampung: Bandar Lampung. Di akses dari <https://radarlampung.co.id/2019/10/16/9-tahun-tak-raih-adipura-ada-apa-dengan-bandarlampung/>
- Ramadhan Nurpambudi. (2016) Ini Penyebab Banjir Lampung, Tribun News: Bandarlampung. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/tribunners/2016/06/16/ini-penyebab-banjir-lampung>
- Sustainable Development Goals, (18 Februari 2020) Tujuan 13, diakses dari <https://www.sdg2030indonesia.org/page/21-tujuan-tigabelas>,
- Schneid, Thomas D., Collins, Larry.(2020). Disaster Management and Preparedness. United States: Lewis Publisher. Hal. 43-47
- Tribun News, (2016), Camat dan Lurah Diimbau Bersihkan Parit dari Sampah, <https://lampung.tribunnews.com/2016/09/29/camat-dan-lurah-diimbau-bersihkan-parit-dari-sampah>
- Tri Puna Jaya. (2016) Banjir Bandang Intai Tiga Kleurahan di Bandar Lampung, Oke Zone TV: Bandar Lampung. Di akses dari <https://news.okezone.com/read/2016/09/27/340/1499698/banjir-bandang-intai-tiga-kelurahan-di-bandar-lampung>
- United Nations, (2015), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, Hal. 19-20
- Valcik, Nicolas A., Tracy, Paul E.. (2017) Case Studies in Disaster Responses and Emergency Management. Boca Raton: CRC Press. Hal. 3-7
- Wakos Reza Gutama, (2016) Ini Penyebab Banjir Terjadi di Pinggiran Sungai Bandar Lampung, Tribun News: Bandar Lampung. Di akses dari <https://www.tribunnews.com/regional/2016/02/10/ini-penyebab-banjir-terjadi-di-pinggiran-sungai-bandar-lampung>

Jurnal Hubungan Internasional Indonesia

<http://jhii.fisip.unila.ac.id/ojs/index.php/jhii>

Potensi Ekspor Sarang Burung Walet Provinsi Lampung

Roby Rakhmadi^{1*}, Agus Hadiawan², Daffa Muhammad³, Siti Zahratun^{4a}

Universitas Lampung, Jalan Prof. Soemantri Brodjonegoro No. 1,
Bandar Lampung, 34597, Indonesia
robby.rakhmadi007@fisip.unila.ac.id¹

ABSTRAK

Besarnya jumlah ekspor sarang burung walet dari Indonesia harus dianalisis agar mampu memberikan kebijakan yang tepat atas pengelolaannya. Lampung sebagai provinsi yang mengandalkan pertanian memiliki cukup banyak lahan yang dipakai untuk menghasilkan sarang burung walet. Penelitian ini akan dilakukan melalui metode kualitatif dan studi pustaka guna mendapatkan data sekunder. Agar perdagangan internasional terus terkelola dengan baik, para petani harus mampu beralih ke perekonomian digital melalui e-commerce, Teknologi ini dapat memberikan solusi terhadap pemasaran barang. Pemasaran barang akan menjadi lebih mudah dalam pola yang baru. Oleh karena itu perubahan pemasaran dari cara lama menjadi baru menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

Kata Kunci: perdagangan internasional; sarang burung walet; e-commerce

ABSTRACT

The large number of swallow's nest exports from Indonesia must be analyzed to be able to provide the right policy on its management. Lampung as a province that relies on agriculture has quite a lot of land used to produce swallow nests. This research will be conducted through qualitative methods and literature studies to obtain secondary data. In order for international trade to continue to be well managed, farmers must be able to switch to the digital economy through e-commerce, this technology can provide solutions to marketing goods. Marketing of goods will be easier in new patterns. Therefore marketing changes from the old way to new things to be interesting to study.

Keywords: international trade; swallow nest; e-commerce

1. PENDAHULUAN

Burung walet adalah burung yang hidup di wilayah tropis dan lembab serta memangsa serangga dengan habitat gua atau rumah lembab dan gelap. Spesies ini hidup berkelompok dengan membuat sarang dari air liur. Berkat khasiatnya di bidang kesehatan, harga sarang walet menjadi sangat mahal sehingga menjadi komoditas yang diperdagangkan ke luar negeri untuk konsumsi. Menurut penelitian ahli gizi, senyawa glyco protein yang ada dalam sarang burung walet merupakan zat yang sangat baik dalam membantu perkembangan tubuh manusia.

Selain itu penelitian Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa sarang burung walet mengandung mayoritas protein, mineral, karbohidrat, lemak dan abu. Pada saat ini para peneliti Eropa dan Amerika sedang mengembangkan komoditas ini sebagai obat untuk menghadapi kanker dan stroke karena kandungan asam aminonya yang lengkap.

Jumlah burung walet yang ada di Indonesia sangat banyak karena ditunjang oleh iklim tropis pada negara dan manusia berhasil mengembangkan teknik budidaya rumah burung walet untuk diambil sarangnya. Ketertarikan investor pada pembangaunan gedung untuk budidaya burung walet semakin tinggi seiring dengan besarnya potensi ekonomi yang ada. Peningkatan tren persyaratan kesehatan dan higienitas akan meningkatkan hambatan non tarif untuk perdagangan sehingga pemerintah melalui kementerian perdagangan udah mengantisipasi standar kesehatan produk di negara pembeli melalui perjanjian bilateral maupun multilateral.

Penelitian ini menganalisis potensi ekspor sarang walet di Indonesia khususnya provinsi Lampung. Tingginya permintaan terhadap sarang burung wallet menjadikan bisnis ini sangat menguntungkan.

Tujuan dan manfaat penelitian ini antara lain:

1. Hasil analisis pada penelitian ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam strategi pengembangan bisnis, khususnya di bidang bisnis sarang walet.
2. Menambah kajian dan memperkaya ilmu tentang studi bisnis, khususnya bidang pengembangan bisnis sarang walet di Indonesia
3. Investor dapat mengetahui dengan lebih baik mengenai kelayakan bisnis pada penelitian ini, diantaranya seperti mengetahui berapa besar modal yang diinvestasikan dalam bisnis ini, pemilihan lokasi pembangunan rumah walet yang baik, keuntungan yang diperoleh, dan berapa lama modal investasi tersebut dapat kembali.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai ekspor sarang burung walet dari Indonesia khususnya provinsi Lampung. Dengan demikian diharapkan akan menjadi landasan kebijakan yang akan membantu perdagangan internasional khususnya terhadap komoditas pertanian. Artikel yang dihasilkan akan menjadi bahan informasi bagi semua kalangan yang memerlukan baik akademisi maupun pemangku kebijakan.

2. PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perkembangan globalisasi memudahkan negara di dunia dalam menjalankan berbagai kegiatan dan aktivitas yang melewati lintas batas. Kegiatan yang melewati lintas batas yaitu seperti hubungan kerjasama dengan negara lain,

kegiatan pertukaran informasi, dan berbagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sosial, budaya, hukum, pertahanan dan ekonomi. Kegiatan dan aktivitas ekonomi yang sering negara-negara lakukan yaitu investasi dan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor.

Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan barang dari dalam dan luar negeri. Istilah impor yaitu memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan istilah ekspor yaitu mengeluarkan barang dari dalam ke luar negeri. Tujuan dari kegiatan ekspor adalah untuk mencari keuntungan dari barang yang berlebih dalam produksinya yang memiliki keunggulan dan negara lain tidak dapat memproduksi barang tersebut seperti sarang burung walet Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman lingkungan, budaya dan lainnya. Selain itu juga Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis dan memiliki 2 musim yaitu penghujan dan panas sehingga menjadikan Indonesia cocok untuk budidaya dan pengembangan sarang burung walet. Perkembangan perdagangan sarang burung walet Indonesia tidak hanya di dalam negeri tapi di berbagai negara lainnya seperti Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, dll di Asia dan Eropa.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia

No	Tahun	Nilai (dalam us \$ 1000) global	Angka pertumbuhan (dalam%) global	Nilai (dalam us \$ 1000) Indonesia	Angka pertumbuha n (dalam%)
1	2015	105	24,7	72	-13,5
2	2016	92	12,6	91	26,2
3	2017	382	316,8	319	249,8
4	2018	235	38,6	199	-37,6
5	2019	186	20,6	183	-8,2
6	2020	170	8,9	141	-22,6

Sumber: <http://stat.kita.net/>

E-commerce adalah istilah yang sering digunakan dalam hubungannya dengan internet dengan berbagai macam pengertian. Menurut Jony Wong (2010 : 33) pengertian dari *electronic commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik dengan radio, televisi dan jaringan komputer atau internet. Oleh karena itu *e-commerce* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dengan penggunaan website sebagai wadah

untuk prosesnya.

Menurut karakteristiknya E-commerce dibagi menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Business to Business (B2B) dengan ciri antara lain:
 - a. Mitra dagang sudah saling mengenal dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Informasi yang dimiliki hanya ditukar dengan mitra tersebut.
 - b. Pertukaran data terjadi berulang dan berkala dengan format data bersama.
 - c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka untuk mengirimkan data.
 - d. Model umum adalah peer to peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
2. Business to Consumer (B2C) memiliki karakteristik antara lain:
 - a. Terbuka untuk umum dengan penyebaran informasi yang dapat diakses bebas.
 - b. Servis bersifat umum sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang banyak.
 - c. Servis yang dipakai berdasarkan permintaan sehingga respon yang diberikan harus sesuai dengan permintaan konsumen.
 - d. Sering dilakukan sistem pendekatan client-server.
3. Consumer to Consumer (C2C)

Dalam C2C seorang konsumen dapat menjual produk dan jasa satu sama lain. Berbagai situs pelelangan memungkinkan perorangan untuk memasukkan item-item agar disertakan dalam pelelangan.
4. Customer to Business (B2C)

Customer to Business adalah model bisnis ketika konsumen (individu) menciptakan nilai yang kemudian dikonsumsi perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk potensi ekspor sarang burung walet di provinsi Lampung dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur antara lain buku, jurnal, internet ataupun artikel ilmiah lainnya. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Matthew B Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana yang terdiri dari tiga aktivitas, yaitu data *condensation*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

4. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Provinsi Lampung

Lampung merupakan provinsi paling selatan di Pulau Sumatera yang berada pada garis lintang 103.40⁰-150.50⁰. Perbatasan provinsi ini terdiri atas sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda yang berhadapan dengan Provinsi Banten, sebelah Barat dengan Samudra Hindia, sebelah Timur dengan Laut Jawa dan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Lampung memiliki total luas 51.991 km², dengan luas daratan sebesar 35.376 km² dan luas perairan pesisir 16.625 km². Jumlah penduduk Lampung pada tahun 2021 mencapai 9.081.792 jiwa dengan penduduk terbanyak berada di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1.477.395 jiwa. Potensi pengembangan Sarang Burung Walet di Kabupaten Lampung tengah cukup besar (Ananda dkk, 2022).

Potensi Pengembangan Sarang Burung Walet di Provinsi Lampung

Lampung memiliki kekayaan alam yang sangat besar untuk komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan darat dan laut, peternakan bahkan industri. Salah satu komoditas peternakan yang saat ini menjadi sorotan adalah komoditas Sarang Burung Walet (SBW). Komoditas SBW merupakan salah satu komoditas sektor peternakan yang sangat menguntungkan saat ini. Sejak tahun 2015, komoditas SBW sudah menjadi salah satu komoditas ekspor di Lampung walaupun proses ekspor dilakukan di daerah lain seperti dari Jawa Barat.

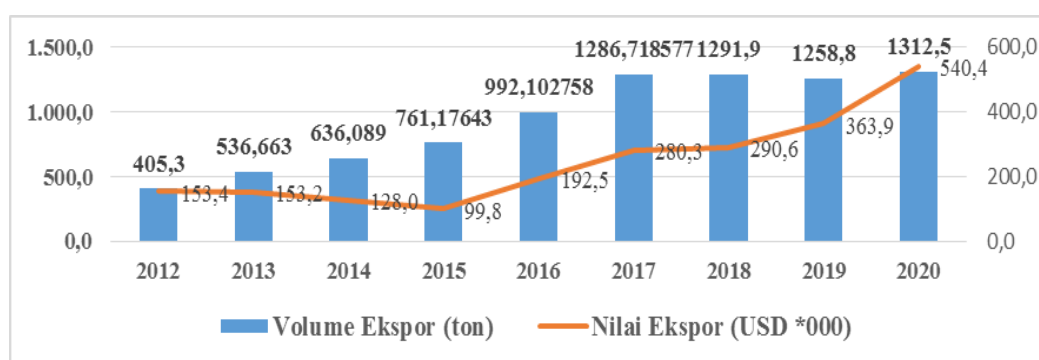
Berdasarkan data BPS tahun 2020 nilai ekspor SBW nasional sebanyak 1300 ton, dan Lampung mampu memasok sekitar 5% dari nilai total yaitu sebanyak 62 ton. Data potensi pengembangan SBW di Provinsi Lampung belum terdata dengan baik, salah satu sebabnya karena peternak SBW di Lampung belum teregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian sehingga pelaporan produksi dan volume penjualan serta nilai penjualan tidak terdata dengan baik.

Potensi Ekspor Sarang Burung Walet Nasional

Menurut keterangan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah, pengembangan SBW adalah program super prioritas di Kementerian Pertanian (Kementan). Pendampingan terus dilakukan kepada para pelaku usaha sarang burung walet untuk mendorong peningkatan ekspor dan meningkatkan skala usahanya. Skema pembiayaan yang dipakai adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk peningkatan skala usaha dan pengadaan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas produksi. Menurut data BPS tahun 2021, Indonesia telah mengekspor 1.510 ton SBW (peningkatan 15% dibandingkan tahun 2020/YoY) dengan nilai USD 517 juta atau setara dengan Rp

7,1 triliun ke beberapa negara di dunia antara lain Tiongkok, Hongkong, Vietnam, Singapura, USA, Kanada, Thailand, Australia, Malaysia, Jepang, Laos, dan Korea (<https://mediaindonesia.com/ekonomi/488540/mentan-dorong-ekspor-sarang-burung-walet-indonesia-tembus-pasar-as-dan-eropa>).

Dalam sisi perdagangan internasional (ekspor) Indonesia merupakan negara produsen Sarang Burung Walet terbesar di dunia dengan pasokan lebih dari 78% kebutuhan pasar dunia. Sedangkan di urutan kedua adalah Malaysia dengan porsi sebesar 10% kemudian diikuti Thailand dengan porsi sebesar 9% dan sisanya Vietnam dan beberapa negara lainnya. Ekspor yang tercatat selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan



Gambar 1. Jumlah dan Nilai Ekspor Sarang Burung Walet Indonesia

Hampir semua pasokan Sarang Burung Walet dunia dikirim ke Tiongkok dan Hong Kong sebagai negara dengan jumlah konsumen terbesar di dunia yang disusul oleh Amerika Serikat. Tujuan ekspor Sarang Burung Walet asal Indonesia selain Tiongkok dan Hong Kong adalah ke Kanada, Italia, Jepang, Kamboja, Filipina, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Belgia, Belanda dan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk Sarang Burung Walet dibutuhkan banyak negara di dunia.



Gambar 2. Persentase Peningkatan Produksi Sarang Burung Walet 2012-2022

Produksi SBW Indonesia yang diekspor sejak tahun 2012 jika dianalisis selalu mengalami peningkatan produksi antara 4-32%, namun demikian pernah terjadi penurunan produksi ekspor pada tahun 2019 sebesar hamper 3%. Rata-rata trend peningkatan produksi ekspor yang dipasarkan sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 sebesar 14,75%. Data produksi eksport tahun 2012 baru mencapai 405,3 kg sedangkan pada tahun 2020 telah mencapai 1312,5 kg sehingga dalam kurun waktu delapan tahun mampu meningkatkan produksi ekspor SBW sebesar 225%.

Potensi Wilayah untuk Pengembangan Sarang Burung Walet di Provinsi Lampung

Sampai saat ini wilayah pengembangan SBW di Provinsi Lampung tersebar di beberapa Kabupaten. Data hasil penelusuran digital menyebutkan bahwa wilayah yang memiliki peternakan sarang burung walet berada di Kabupaten Lampung Tengah,

Analisis SWOT

Berdasarkan data Badan Karantina Pertanian (Barantan), di Indonesia terdapat 18 provinsi penghasil SBW dengan potensi lebih dari 800 unit rumah walet per provinsinya, dan sebanyak 520 rumah walet yang telah terdaftar oleh Barantan. Propinsi Lampung yang merupakan daerah potensial disektor pertanian juga memiliki keunggulan pada komoditas sarang burung walet. Komoditas SBW asal Lampung ini setiap hari nya dikirim keberbagai daerah di Indonesia diantaranya adalah Jakarta, Surabaya, Bojonegoro, Malang, Semarang maupun Kalimantan.

Berdasarkan data Iqfast Karantina Pertanian Lampung pada tahun 2019 pengiriman SBW asal Lampung mencapai 27.776 kg dengan frekuensi pengiriman 1.042 Kali. Sedangkan pada untuk periode Januari hingga Mei 2020 sebanyak 25.352 kg dan 424 kali pengiriman. Jika dilihat data secara nasional maka perdagangan SBW Lampung hanya berkisar 3-5% dari total perdagangan SBW Nasional. Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana caranya meningkatkan produksi SBW di Provinsi Lampung.

Berdasarkan analisis SWOT pada tabel dibawah ini terlihat bahwa komoditas SBW dari sisi factor internal memiliki kekuatan :

- 1) Nilai jual SBW yang tinggi sehingga bisa mendatangkan keuntungan tinggi dibandingkan produk pertanian atau peternakan lainnya;
- 2) memiliki manfaat bagi kesehatan, terutama bagi orang Cina yang banyak menggunakan SBW dalam ramuannya;
- 3) rantai pemasaran sederhana dan mudah karena tinggal menjual pada pengepul yang ada di Desa; dan

- 4) ekosistem di Lampung yang ideal dari suhu dan kelembaban memungkinkan peternakan SBW akan dapat dilakukan dengan baik.

Tabel 2. SWOT Potensi Budidaya Sarang Burung Walet Provinsi Lampung

Internal Faktor	
Strength/Kekuatan	Weaknes/Kelemahan
1. Memiliki nilai jual tinggi 2. Memiliki manfaat bagi kesehatan 3. Rantai pemasaran di Lampung sederhana dan mudah 4. Ekosistem di lampung cukup ideal bagi pengembangan SBW	1. Investasi berbiaya tinggi 2. Pemilik belum memahami budidaya SBW yang sesuai standar ekspor 3. Rumah SBW belum tersertifikasi oleh Barantan 4. System perijinan rumah wallet dan kelayakan lingkungan belum ada 5. Ekspor sulit dilakukan secara langsung oleh pelaku usaha SBW
Eksternal Faktor	
Opportunity/Peluang	Threat/Ancaman
1. Permintaan terhadap SBW baik domestic maupun mancanegara tinggi 2. Nilai ekspor ekspor tinggi 3. Informasi tataniaga mudah melalui jaringan media social ataupun lainnya yang berbasis internet 4. Dukungan pemerintah berupa dana, pembinaan dan peraturan	1. Persaingan dengan Provinsi penghasil SBW lainnya 2. Pencurian SBW 3. Kontaminasi dengan bakteri

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis peneliti terhadap data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara eksportir terbesar sarang burung walet di dunia. Provinsi Lampung dapat memanfaatkan peluang ini guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dengan potensi alam yang kaya Lampung dapat menjadi sentra produksi sarang burung walet yang mampu berperan dalam ekspor nasional jika diberdayakan lebih lanjut. Dengan pemberdayaan dan kerjasama dari semua pihak diharapkan dapat meningkatkan produksi komoditas tersebut sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Danny Summardi, Pordamantra, Sunnariyo. 2018. *Evaluasi Kelayakan Usaha Sarang Burung Wallet di Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur*. Palangkaraya. Vol. 13. No 2, Agustus 2018. Halaman 53

- Griffin, Ricky W and Ebert, Ronald J, 2006. Business, 8th edition, Pearson Education Inc, New Jersey
- Hermann, Mario Pentek, Boris Otto, *Design Principles for Industries 4.0 Scenario: A Literature Review*, (2016), 49th Hawaii International Conference on System Sciences.
- Marhiyanto, dkk. 1996. Budidaya Rumah dan Sarang Walet. Surabaya. Gitamedia Press.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 2015. Monografi Kabupaten Lampung Timur 2015. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur.
- Turaini Ayuti, Dani Garnida, Indrawati Yuda Asmara. 2016. Identifikasi Habitat dan Produksi Sarang Burung Wallet (*Collocalia Fuciphaga*) di Kabupaten Lampung Timur. Universitas Padjajaran. Halaman 3
- Varmaat, Shelly Cashman, 2007, *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental* Edisi 3, Salemba Infotek, Jakarta
- Wong, Jony, 2010, *Internet Marketing for Beginners*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

PEMETAAN JARINGAN DAN STRUKTUR PERDAGANGAN INTERNASIONAL BIJI KOPI MENTAH 2001 – 2019

Fahmi Tarumanegara ^a,

^a Universitas Lampung, Jalan Prof. Soemantri Brodjonegoro No. 1,
Bandar Lampung, 34597, Indonesia
fahmi.tarumanegara@fisip.unila.ac.id ¹

ABSTRAK

Perdagangan internasional biji kopi mentah telah tumbuh dan menunjukkan kehadiran negara-negara bukan produsen kopi sebagai eksportir kopi. Di tengah kondisi itu berbagai tantangan hadir dari dinamika kerjasama sektor perkopian internasional. Artikel ini mencoba memetakan jejaring perdagangan internasional biji kopi mentah serta pergeseran struktur perdagangan sepanjang 20 tahun terakhir. Analisis data sekunder terhadap data nilai perdagangan diadik dari keseluruhan 206 negara dunia digunakan. Analisis data dan pemetaan dilakukan berbasis kerangka analisis jejaring sosial (jejaring kompleks) dan parameter *degree*, *centrality*, dan *modularity*. Artikel ini menemukan adanya pergeseran bentuk jaringan dan struktur perdagangan komoditas biji kopi mentah. Perubahan strategi pemasaran kopi khususnya bagi negara-negara produsen sangat diperlukan, serta perlunya pembaharuan peran organisasi perkopian dunia.

Kata Kunci: Jejaring Perdagangan Internasional, Struktur Perdagangan Internasional, Biji Kopi.

ABSTRACT

International trade for green beans commodities has grown and shows the presence of non-coffee producing countries as coffee exporters. In the midst of these conditions, various challenges arise from the dynamics of cooperation in the international coffee sector. This article attempts to mapping the international trade network for raw coffee beans and analyze the trade structure shifting over the last 20 years. Secondary data analysis of dyadic trade data from all 206 countries involved was used. Data analysis and trade mapping was carried out based on a social network (complex) analysis framework with parameters of degree, centrality, and modularity. This article finds that the shape of the network and the trade structure has shifted. Producer countries should reform their marketing strategy as well as the role of International Coffee Organizations.

Keywords: International Trade Network, International Trade Structure, Green Bean.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional di tengah arus globalisasi dan pasar bebas yang membuka persaingan antar negara dan kawasan yang kian ketat, tetap memperlihatkan peran pentingnya bagi perekonomian dunia. Sepanjang dua dekade terakhir, kontribusi perdagangan internasional terhadap GDP dunia berkisar antara 49,27% hingga 52,10% (World Bank, 2022) yang berarti setengah perekonomian dunia ditopang oleh aktivitas perdagangan. Perdagangan internasional juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 241,32%, dari sebesar US\$

6,43 trilyun di tahun 2001 menjadi sebesar US\$ 21,95 di tahun 2001 (ITC, 2022). Pertumbuhan tersebut bahkan terjadi di periode yang sama dengan hadirnya berbagai kejadian internasional seperti konflik, persaingan dagang antar negara, krisis keuangan, permasalahan lingkungan, hingga permasalahan kesehatan dunia.

Pertumbuhan pesat perdagangan internasional di 20 tahun terakhir terjadi di sebagian besar atau 82,68% dari 99 komoditas utama dan 6339 sub komoditas, termasuk di komoditas sektor perkopian. Nilai perdagangan internasional keseluruhan komoditas kopi meningkat dari sebesar US\$ 6,560 milyar di tahun 2001 menjadi US\$ 36,349 milyar di 2021, atau sebesar 435,79%. Nilai perdagangan kopi saat ini adalah yang terbesar ke 126, dengan kontribusi antara 0,102% hingga 0,197% terhadap seluruh sub komoditas perdagangan internasional. Nilai perdagangan kopi juga merupakan yang terbesar ke 12 dari perdagangan 201 sub komoditas sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan, dengan kontribusi sebesar 1,349% hingga 2,54% (ITC, 2022a, 2022b). Nilai perdagangan sektor perkopian meskipun berada di bawah sektor minyak dan gas (migas) dan pertambangan, berhasil tumbuh lebih tinggi dari dua sektor tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya dan besarnya potensi sektor perkopian dalam perdagangan internasional dan bagi perekonomian dunia.

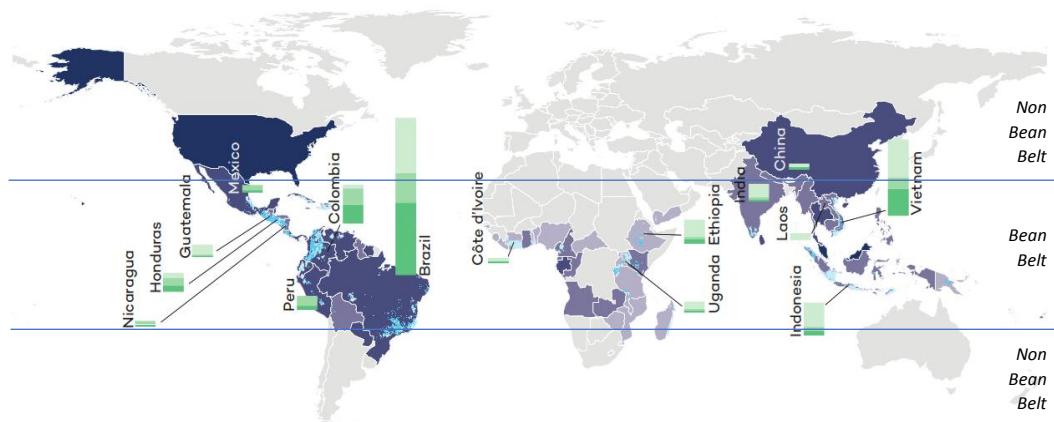
Tabel 1. Performa Perdagangan Internasional Komoditas Perkopian 2001 dan 2021

Sub Komoditas	Nilai Perdagangan (milyar US\$)			Porsi Perdagangan	
	2001	2021	Tumbuh	2001	2021
Biji Kopi Meentah	4,76	21,69	355,98%	72,52%	59,69%
Kopi Dekafein	1,30	12,90	894,28%	19,78%	35,49%
Kopi Sangrai	0,32	0,84	165,45%	4,85%	2,32%
Kopi Sangrai - Dekafein	0,12	0,73	498,01%	1,86%	2,01%
Lainnya	0,03	0,11	260,62%	0,45%	0,29%

Sumber: ITC, 2022b

Pertumbuhan pada perdagangan sektor perkopian, didukung oleh pertumbuhan di seluruh komoditas sektor tersebut. Komoditas kopi olahan khususnya kopi dekafein mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 894,28%, atau meningkat dari US\$ 1,30 milyar di tahun 2001 menjadi US\$ 12,90 di tahun 2021. Kontribusi komoditas ini terhadap seluruh komoditas perkopian lainnya juga meningkat dari sebesar 19,78% menjadi sebesar 35,49%. Komoditas kopi olahan lain yaitu kopi sangrai-dekafein juga mengalami pertumbuhan sebesar 498,01%. Kondisi berbeda terjadi di komoditas biji kopi mentah yang meskipun tumbuh sebesar 355,98%, namun mengalami penurunan nilai kontribusinya terhadap perdagangan keseluruhan perdagangan kopi yaitu dari sebesar 72,52% di tahun 2001 menjadi hanya sebesar 59,69% di tahun 2021 (ITC, 2022b). Penurunan kontribusi perdagangan biji kopi mentah sebagai bahan baku utama seluruh komoditas kopi, menunjukkan peluang pergeseran kebijakan, kemampuan,

termasuk pola perdagangan dari negara-negara eksportir kopi yang idealnya adalah produsen kopi dunia atau dikenal dengan istilah negara-negara *bean belt*, yaitu negara-negara kawasan tropis yang cocok untuk budi daya tanaman kopi.



Sumber: Vivek Voora, et.al. (2019).

Gambar 1. Kawasan *Bean Belt*

Aktivitas ekspor impor sektor perkopian justru memperlihatkan kompleksitas dan dinamisnya keterlibatan negara-negara dalam sektor ini. Pada aktivitas impor, negara pengimpor utama atau yang menguasai lebih dari 50% perdagangan di setiap komoditas perkopian di setiap tahunnya, sebagian besar merupakan negara *non bean belt*. Kondisi ini menjadi lumrah dikarenakan negara-negara *non bean belt* merupakan negara konsumen dan bukan produsen biji kopi mentah. Namun fakta unik justru terjadi pada aktivitas ekspor. Pada ekspor biji kopi sangrai dan sangrai-dekafein, sepanjang 20 tahun terakhir terjadi perubahan posisi negara-negara ekportir utama yang keseluruhannya merupakan negara *non bean belt*. Di ekspor komoditas kopi dekafein di periode yang juga terjadi perubahan posisi negara-negara yang diiringi dengan terjadinya penurunan jumlah negara *bean belt* yang masuk dalam jajaran negara eksportir utama. Sedangkan pada komoditas biji kopi mentah, meskipun di tahun 2001 seluruh negara eksportir utama adalah negara *bean belt*, namun pada tahun 2021 tercatat tiga negara *non bean belt* masuk sebagai negara eksportir utama, sejalan dengan perubahan posisi negara-negara *bean belt*. Di tahun 2001 terdapat 108 negara menjadi eksportir biji kopi mentah, yang jumlah ini meningkat menjadi 149 negara di tahun 2021 (ITC, 2022b). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sejumlah 45 negara produsen penghasil biji kopi mentah dunia yang merupakan negara-negara di wilayah *bean belt* harus menghadapi persaingan yang kian ketat, dan kenyataan bahwa sektor perkopian tidak lagi secara eksklusif hanya didominasi negara-negara produsen biji kopi mentah.

Tantangan bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan kopi khususnya bagi negara produsen, juga hadir dari keberadaan organisasi perkopian dan perubahan perjanjian sektor perkopian internasional. Perdagangan

internasional sektor perkopian menjadi kian kompetitif di tengah pemberlakuan International Coffee Agreement (ICA) yang dikeluarkan International Coffee Organization (ICO) sebagai satu-satunya organisasi internasional yang menjembatani kepentingan negara produsen dan eksportir kopi dunia. ICO sendiri menjadi wadah kerjasama dan pembangunan komitmen untuk memperkuat sektor perkopian termasuk menjaga iklim pasar perkopian yang menguntungkan bagi seluruh anggotanya yang terdiri dari 43 atau 98% negara produsen dan 27 negara Uni Eropa ditambah 5 negara lainnya atau 98% negara konsumen kopi dunia (ICO, 2022a). Sejak tahun 2001, ICO memberlakukan ICA 2001 dan diperbaahruhi dengan ICA 2017 yang kian menghadirkan iklim perdagangan pasar bebas di sektor perkopian internasional. Keduanya menggugurkan ICA 1962, 1976, 1983, dan 1984; yang ditujukan untuk menjamin terciptanya dan memastikan keseimbangan permintaan dan penawaran, termasuk penyalarsan harga dan kuota perdagangan kopi. ICA 2001 justru menjadi kesepakatan untuk membuka diri bagi sektor swasta serta mendukung selain untuk mendorong pertumbuhan sektor perkopian yang berkelanjutan. Sedangkan ICA 2017 yang berlaku sejak 2011 dijalankan untuk memfasilitasi ekspansi dan transparansi perdagangan seluruh bentuk komoditas perkopian, termasuk pembiayaan dan kredit, pembangunan komunitas lokal. (ICO, 2022b). Tidak hanya itu, pola dan struktur perdagangan sektor perkopian internasional juga berpotensi bergeser ditengah keluar masuknya negara-negara dari keanggotaan ICO. Antara tahun 2019-2020, Amerika Serikat sebagai salah satu negara importir terbesar serta negara eksportir utama yaitu Guatemala, Paraguay, dan Uganda; menyatakan keluar dari keanggotaan ICO.

Latar belakang di atas memperlihatkan besarnya pertumbuhan dan nilai perdagangan sektor perkopian serta kontribusinya bagi perekonomian dunia. Aktivitas ekspor khususnya biji kopi mentah menunjukkan adanya pergeseran negara-negara pemain utama, dimana negara produsen biji kopi mentah kian menghadapi persaingan dari negara-negara eksportir lainnya yang bukan merupakan negara produsen kopi. Kondisi ini terjadi di tengah adanya pergeseran komitmen dan aturan internasional mengenai perdagangan kopi di 20 tahun terakhir. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mencoba memetakan jaringan perdagangan internasional biji kopi mentah di tahun 2001 dan 2019, serta menjelaskan pergeseran struktur perdagangan yang terjadi di dalamnya.

2. JARINGAN DAN STRUKTUR PERDAGANGAN

Penelitian mengenai perdagangan internasional yang menitikberatkan telaah pada struktur perdagangan umumnya merujuk pada karya Stephen D. Krasner (1976). Kresner memandang struktur perdagangan berkaitan dengan distribusi kekuatan dan kepentingan ekonomi serta politik setiap negara yang terlibat dalam perdagangan. Struktur ini menunjukkan atribut perilaku dan dan

atribut institusional negara yang dipengaruhi oleh level kekuatan politik, pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial negara. Pola struktur dan sistem perdagangan dalam ide Kresner struktur perdagangan terbuka, tertutup, dan hegemonik (Krasner, 1976). Negara dengan begitu dihadapkan pada pergeseran struktur perdagangan yang sangat dinamis. Pergeseran struktur perdagangan akan mendorong pergeseran kebijakan dan perilaku perdagangan setiap negara, yang kembali pergeseran bentuk struktur perdagangan.

Penelitian yang mengawali pergeseran pembahasan mengenai struktur perdagangan adalah karya Roger J. Nemeth dan David A. Smith (1985). Keduanya menempatkan fokus analisis terhadap struktur perdagangan tidak lagi dapat dilihat hanya sebatas pada atribut karakteristik negara yang terlibat, melainkan butuh pula dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh relasi perdagangan antar negara. Pemetaan sistem dan struktur perdagangan serta pola perdagangan ditujukan untuk mengetahui posisi struktural setiap negara. Selain hubungan dagang, berbagai atribut lain seperti: intervensi politik dan militer, keanggotaan perjanjian, serta hubungan diplomatik dapat memperkuat pemetaan struktur perdagangan. Keduanya juga mengadopsi kerangka *core*, *semiperiphery*, dan *periphery* dalam menjelaskan posisi struktural negara dalam perdagangan (Nemeth dan Smith, 1985).

Penelitian lain yang secara komprehensif menjelaskan struktur perdagangan, dipublikasikan oleh Emilie M. Hafner-Burton, Miles Kahler, dan Alexander H. Montgomery (2009). Sebagaimana Nemeth dan Smith, ketiganya memandang pentingnya melihat kekuatan perdagangan negara yang tidak hanya fokus pada atribut kapabilitas material negara secara individual. Ketiganya juga mengenalkan bahwa perdagangan internasional dan hubungan internasional butuh diinvestigasi dalam perspektif “jaringan”. Jaringan dalam hal ini adalah suatu kumpulan relasi antar aktor yang secara dinamis membentuk struktur. Jaringan sebagai bentuk nyata struktur inilah yang dipengaruhi dan mempengaruhi negara dalam struktur dan sistem perdagangan, serta menggambarkan keseluruhan interaksi dan tata kelola internasional.

Analisis jejaring dapat mengidentifikasi pola hubungan, kemitraan, serta peran dari masing-masing aktor yang terlibat dalam struktur perdagangan. Analisis jaringan juga dapat menggambarkan hubungan lintas level analisis (grup, negara, sistemik), serta berbagai sifat hubungan (monadik, diadik, dan sistemik), termasuk untuk mengukur kekuatan hubungan. Analisis jejaring dapat dilakukan dengan pemetaan karakteristik agen atau aktor (*nodes*) serta besaran *magnitude* atau *frequency* ikatan relasi antar aktor (*edges*). Relasi yang terbentuk dapat bersifat *homophily* ketika aktor cenderung membangun relasi dengan aktor lain yang memiliki karakteristik sejenis, ataupun *heterophily* yaitu ketika aktor tidak memperlakukan perbedaan karakteristik dalam hubungannya dan dengan

begitu saling mengisi kelebihan dan kekurangan diantara mereka. Beberapa parameter dapat digunakan untuk melihat gambaran struktur yang terbentuk diantaranya: *degree centrality* yaitu kekuatan aktor dilihat dari keseluruhan relasi yang terbentuk atau bersinggungan dengannya, *closeness centrality* yaitu kekuatan aktor dari panjangnya hubungan yang terbentuk antara aktor tersebut dengan aktor lainnya, *betweenness centrality* yaitu kekuatan aktor terlibat dalam hubungan antar aktor lain di dalam sistem, serta *eigenvector centrality* yaitu kekuatan aktor tidak hanya dalam berhubungan dengan aktor lainnya dan kekuatan hubungannya namun juga kemampuannya berperan di hubungan tersebut (Burton, Kahler, Montgomery, 2009).

Penelitian yang membahas perdagangan kopi sebelumnya juga telah banyak dilakukan yang umumnya fokus pada permasalahan perkopian dalam konteks “*sustainable*” dan “*fair trade*”, serta membandingkan peran negara produsen, peran negara eksportir dan importir, termasuk peran ICO (Giovannucci, Koekoek, 2003). Sebagian lainnya menitik beratkan penelitian perkopian ke pembahasan pada permasalahan *supply chain* karena kenyataan bahwa perdagangan kopi layaknya perdagangan komoditas lain membentuk suatu rantai produksi-distribusi-konsumsi yang juga melibatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara *northern buyers* dan *southern producers* (Grabs dan Ponte, 2019). Hal ini mengapa pembahasan perdagangan kopi tidak dapat dilepaskan dari permasalahan hubungan internasional.

Penelitian yang mulai memfokuskan diri ke telaah jaringan perdagangan kopi adalah Krisztina Pongratz Chander (2017), yang mencermati bahwa struktur perdagangan kopi internasional beroperasi dalam *global commodity chain* (GCC) atau bagaimana rantai global dari pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran komoditas kopi menjadi tidak berimbang dalam hal relasi kekuasaan antar negara yang terlibat. Kondisi ini mendorong negara-negara khususnya negara produsen yang merupakan negara berkembang menghadapi *struggle for power* untuk mendapatkan *marketshare* (Chander, 2017). Identifikasi struktur perdagangan kopi dengan begitu butuh difokuskan pada siapa negara yang menguasai *market share* dan kemampuan negara dalam membangun kemitraan dengan negara lain. Lebih lanjut, dibutuhkan telaah pada peran dan cakupan kekuasaan masing-masing aktor dalam GCC serta implikasi jaringan perdagangan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di masing-masing negara. Hernández dan Ruiz (2021) menambahkan bahwa dalam mengurai masalah di GCC kopi, maka relasi perdagangan juga butuh diidentifikasi atribut yang mampu menjelaskan tentang keuntungan dan kesejahteraan dari negara yang terlibat. Salah satu yang representatif menjelaskan hal ini adalah atribut nilai perdagangan. Nilai perdagangan dalam hal ini lebih telah menjelaskan pula kemampuan negara dalam produksi, lebih dari itu juga kemampuan dalam menegosiasikan harga serta keuntungan yang diperolehnya.

Penelitian yang mencoba memetakan struktur dan dinamika perdagangan sektor perkopian internasional juga telah dilakukan oleh berbagai peneliti, salah satunya penelitian karya Sujaritpong, Yoo-Kong, dan Bhadola (2021). Penelitian tersebut mencoba mengkaji struktur, pola jaringan hubungan antar aktor (*topology*), serta bentuk respon atas pergerakan struktur dan pola jaringan (*spectral properties*); dari perdagangan kopi internasional. Ketiganya menggunakan *complex network theory* sebagai alat dan metode analisis untuk memetakan data perdagangan bilateral 176 negara tahun 1996 hingga 2017 yang bersumber dari World Trade Organization (WTO). Dengan menggunakan parameter *degree*, *density*, dan *spectral radius*; mereka menyimpulkan bahwa negara dengan nilai *degree* tinggi memiliki pengaruh besar karena memiliki interaksi perdagangan yang besar pula. Hasil *spectral analysis* dan nilai *eigenvalue dynamics* juga memperlihatkan bahwa perdagangan kopi internasional sensitif dengan kehadiran krisis dunia (Sujaritpong, Yoo-Kong, dan Bhadola, 2021). Penelitian tersebut dalam memetakan kekuatan aktor dalam mempengaruhi aktor lain hanya melibatkan parameter *degree* yang mengukur besarnya mitra yang terhubung dengan suatu aktor, dengan begitu membuka potensi pelibatan parameter lainnya untuk memetakan jejaring perdagangan kopi internasional yang kompleks. Parameter lainnya yang dimaksud adalah parameter yang mampu juga mengukur besaran pengaruh, besaran peran negara di dalam struktur, bahkan kepadatan kerjasama dan persaingan.

Penelitian Catalan, et.al (2022) dapat dijadikan rujukan dalam memetakan struktur perdagangan sektor perkopian internasional dengan parameter yang lebih komprehensif. Penelitian tersebut bertujuan untuk menelaah *supply chain* dan evolusi jaringan perdagangan kopi internasional yang melibatkan negara produsen dan non-produsen. Catalan, et.al melibatkan konsep *coffee trade regime* untuk menerangkan posisi negara-negara dan posisi ICO dalam jaringan perdagangan. Konsep lain yang dilibatkan adalah *coffee paradox* untuk menjelaskan relasi antara perdagangan dan pembangunan. Dengan menggunakan *complex network analysis* dan parameter *betweness centrality* dan *closeness centrality*, Catalan, et.al memetakan data perdagangan internasional 170 negara dari United Nations Commodity Trade Statistics (UN Comtrade) sepanjang tahun 1995 hingga 2018 (Catalan, et.al., 2022). Analisis Catalan, et.al yang fokus mendeskripsikan kekuatan negara-negara pemain utama di dua titik waktu, juga memberi ruang untuk adanya telaah lebih lanjut. Dengan kenyataan bahwa nilai perdagangan dan posisi setiap negara secara dinamis berubah dari waktu ke waktu, serta didasari bahwa perubahan nilai perdagangan dan posisi setiap negara di suatu waktu pada dasarnya merepresentasikan bentuk struktur perdagangan di waktu tersebut, maka struktur perdagangan kopi internasional selalu berubah dan pergeserannya butuh untuk dipetakan.

3. METODE

Penelitian ini yang akan mencoba memetakan jaringan perdagangan dan menjelaskan pergeseran struktur perdagangan internasional biji kopi mentah menggunakan *complex atau social network analysis* (SNA). Analisis ini melibatkan parameter statistika SNA berupa: *degree*, *weight degree*, *closeness centrality*, *betweness centrality*, *eigenfactor centrality*, dan *modularity*. Pemetaan jaringan perdagangan didasari algoritma pemetaan *openord*. Keseluruhan analisis tersebut menggunakan alat bantu Gephi 096. Data perdagangan kopi tahun 2001 dan 2019 diperoleh dari data perdagangan bilateral (diadik) komoditas biji kopi mentah seluruh negara dari database International Trade Center (ITC).

4. PEMBAHASAN

Pola Perdagangan Biji Kopi Mentah Dunia 2001 dan 2019

Pada tahun 2001, terdapat 204 negara yang terlibat perdagangan biji kopi mentah. Rerata nilai *degree* di tahun 2001 sebesar 8,12. Negara dengan nilai *degree* terbesar (minimum memiliki 30% dari jumlah potensi mitra yang dapat terbentuk) sebanyak 12 negara yaitu: Italia, Amerika Serikat, Vietnam, Jerman, India, Perancis, Indonesia, Inggris, Brazil, Belgia, Belanda, dan Spanyol. Nilai *degree* negara-negara *bean belt* seluruhnya memperlihatkan besarnya nilai *out degree* dan kecilnya nilai *in degree*. Sedangkan negara-negara *non bean belt* memiliki nilai *in degree* lebih besar dari nilai *out degree* bahkan dengan jumlah relatif berimbang. Vietnam sebagai contoh memiliki nilai *out degree* 91 dan *in degree* 3, artinya Vietnam memiliki jumlah mitra ekspor yang sangat besar dan jumlah mitra impor sangat kecil. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki nilai *in degree* 50 dan *out degree* 46, hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat lebih banyak jumlah mitra impornya namun tetap memiliki jumlah mitra ekspor yang besar pula.

Di tahun 2019, terdapat 206 negara yang terlibat perdagangan biji kopi mentah, dengan rerata nilai *degree* di tahun 2001 sebesar 11,34. Negara dengan nilai *degree* terbesar (sesuai standar serupa dengan tahun 2001) terdiri dari 20 negara yang terdiri dari seluruh negara di tahun 2001, serta ditambah masuknya Uni Emirat Arab, Tiongkok, Colombia, Australia, Uganda, dan Afrika Selatan. Di tahun ini seluruh negara dengan kemitraan tertinggi berasal dari seluruh kawasan dunia. Pola perimbangan *in degree* dan *out degree* antara negara *bean belt* dan *non bean belt* mengikuti pola tahun 2001. Unikanya negara-negara *non bean belt* secara keseluruhan memperlihatkan keseriusan untuk melakukan aktifitas ekspor dimana nilai *out degree* mereka kini lebih dominan dari nilai *in degree*nya. Di sisi lain nilai *degree* negara-negara *bean belt* mengalami penurunan kecuali Brazil, yang diiringi pula dengan pengurangan mitra ekspornya.

Tabel 2. Perbandingan *Degree* Komoditas Biji Kopi Mentah 2001 dan 2019

2001				2019			
Negara	InD	OuD	Degree	Negara	InD	OuD	Degree
Italia	42	69	111	Italia	41	96	137
Amerika Serikat	50	46	96	Jerman	66	69	135
Vietnam	3	91	94	Amerika Serikat	60	70	130
Jerman	62	28	90	Inggris	56	74	130
India	10	80	90	Perancis	48	60	108
Perancis	52	33	85	Belanda	47	58	105
Indonesia	9	73	82	Spanyol	39	64	103
Inggris	50	27	77	Belgia	46	56	102
Brazil	5	67	72	Brazil	3	88	91
Belgia	45	27	72	India	20	70	90
Belanda	49	22	71	Uni Emirat Arab	45	42	87
Spanyol	42	19	61	Tiongkok	35	51	86
				Vietnam	18	64	82
				Colombia	5	70	75
				Indonesia	14	58	72
				Australia	40	31	71
				Uganda	4	63	67
				Afrika Selatan	33	33	66

Sumber: Diolah dari data ITC (2022b)

Nilai *weight degree* menunjukkan besarnya kemampuan negara-negara dalam menguasai nilai transaksi perdagangan atau kapitalisasi pasar. Di tahun 2001, sejumlah 10 negara tercatat memiliki nilai *weight degree*: Brazil, Amerika Serikat, Jerman, Colombia, Jepang, Vietnam, Italia, Belgia, Guatemala, dan Perancis. Di tahun ini, negara-negara *bean belt* menguasai transaksi perdagangan yang bersumber dari ekspor komoditas dari besarnya nilai *wight out degree*, sedangkan penguasaan dari transaksi impor atau nilai *weight in degree* berada di bawah nilai 1,00%. Hal ini berbeda jika melihat pola negara-negara *non bean belt*. Meskipun keseluruhan negara tersebut sangat dominan menguasai transaksi impor dengan nilai *weight in degree* tinggi atau memiliki pengaruh dalam penawaran harga beli, namun penguasaan transaksi ekspor negara-negara tersebut berada di atas 1,00%.

Di tahun 2019, juga tercatat terdapat 10 negara dengan nilai *weight degree* terbesar di dunia. Negara-negara tersebut serupa dengan tahun 2001, dengan diiringi keluarnya Guatemala dan Perancis, serta masuknya Honduras dan Indonesia. Di tahun ini seluruh negara mengalami peningkatan *wight degree* yang artinya kekuatan seluruh negara dalam transaksi perdagangan biji kopi mentah meningkat. Di kelompok negara-negara *bean belt*, pola dominan tetap terjadi di penguasaan transaksi ekspor yang tumbuh lebih dari 300% bahkan Vietnam lebih dari 700%, namun dengan nilai transaksi impor atau nilai *weight in degree* tidak sebanding atau berada di bawah 11,00%. Uniknyanya negara-negara *non bean belt* meskipun dominan di nilai transaksi impornya, memiliki nilai *weight out degree* yang meningkat. Nilai *weight out degree* negara-negara *non bean belt* berkisar antara 15,29 hingga 57,57, kecuali bagi Italia. Ini memperlihatkan bahwa negara

non bean belt kini bersaing pula memperebutkan nilai ekspor biji kopi mentah dunia dengan tetap menguasai transaksi impornya.

Tabel 2. Perbandingan *Weight Degree* Komoditas Biji Kopi Mentah 2001 dan 2019

2021				2019			
Negara	WiD	WoD	Weight Degree	Negara	WiD	WoD	Weight Degree
Brazil	0,03	120,76	120,8	Brazil	0,01	435,95	436,0
Amerika Serikat	105,02	8,35	113,4	Amerika Serikat	372,61	15,29	387,9
Jerman	87,57	7,66	95,2	Vietnam	9,66	281,17	290,8
Colombia	0,14	76,42	76,6	Jerman	228,91	55,26	284,2
Jepang	45,58	0,00	45,6	Colombia	10,42	226,75	237,2
Vietnam	0,64	38,80	39,4	Belgia	126,47	57,57	184,0
Italia	34,91	1,18	36,1	Italy	130,83	3,88	134,7
Belgia	23,99	9,44	33,4	Honduras	10,40	111,11	121,5
Guatemala	0,08	30,65	30,7	Jepang	101,30	0,00	101,3
Perancis	25,95	0,45	26,4	Indonesia	11,96	80,87	92,8

Sumber: Diolah dari data ITC (2022b)

Hasil analisis *closeness centrality* memperlihatkan kekuatan dari bagaimana kedekatan suatu negara dalam jaringan perdagangan biji kopi mentah untuk menjangkau negara lain sebagai mitranya baik untuk kebutuhan ekspor maupun impor. Sepanjang 20 tahun terakhir nilai rerata nilai *closeness centrality* negara-negara menguat, dimana hanya 6 negara yang tetap berada dalam nilai *closeness centrality* terbesar yaitu: Amerika Serikat, Brazil, Colombia, India, Italia, dan Vietnam. Sebagaimana parameter lainnya di periode yang sama terjadi peningkatan nilai *closeness centrality* dari negara-negara *non bean belt*, yang berarti negara-negara tersebut semakin mudah menjangkau dan melakukan transaksi dengan negara lainnya. Sebagian negara *bean belt* bahkan mengalami penurunan nilai *closeness centrality* seperti Indonesia, ini menyiratkan bahwa negara-negara *bean belt* mengalami penurunan kedekatannya dengan negara mitra, meskipun performa nilai perdagangannya mengalami peningkatan.

Tabel 3. Perbandingan *Closeness dan Betweness Centrality* Perdagangan Komoditas Biji Kopi Mentah 2001 dan 2019

Closeness Centrality				Betweness Centrality			
Negara	2001	Negara	2019	Negara	2001	Negara	2019
Viet Nam	0,64	Italia	0,66	AS	4102,8	AS	3600,89
Indonesia	0,59	Brazil	0,64	Italia	3759,9	UAE	2302,50
India	0,57	Inggris	0,61	Jerman	1966,0	Jerman	2215,64
Brazil	0,55	AS	0,60	Indonesia	1964,6	Inggris	2113,74
Italia	0,52	India	0,60	Australia	1892,1	Italia	1811,74
Guatemala	0,51	Colombia	0,60	Inggris	1870,8	Perancis	1462,15
Kenya	0,51	Jerman	0,59	Tiongkok	1855,9	Afrika Selatan	1385,72
Colombia	0,50	Uganda	0,59	Perancis	1795,7	Belanda	913,88
Ethiopia	0,50	Vietnam	0,59	Afrika Selatan	1566,2	Australia	772,21
AS	0,50	Belgia	0,57	India	1523,3	Ukraine	758,23
Costa Rica	0,49	Honduras	0,57	Vietnam	1511,1	Russia	744,86

Sumber: Diolah dari data ITC (2022b)

Berbeda dari sebelumnya, hasil analisis *betweness centrality* memperlihatkan kekuatan negara untuk menjadi jembatan dalam transaksi atau kemitraan perdagangan. Sepanjang dua dekade terakhir tercatat 7 negara tetap berada dalam jajaran negara dengan *betweness centrality* tertinggi, yaitu: Amerika Serikat, Italia, Jerman, Australia, Inggris, Perancis, dan Afrika Selatan. Pada tahun 2001 terdapat negara 3 negara *bean bealt* di posisi ini, yang di tahun 2019 keseluruhannya tergantikan oleh negara-negara *non bean belt*. Negara-negara dengan *betweness centrality* tinggi juga memiliki peran sebagai suplier sekaligus penyalur atau penentu keberlangsungan lalu lintas perdagangan.

Tabel 4. Perbandingan Eigencentrality Perdagangan Komoditas Biji Kopi Mentah 2001 dan 2019

EigenCentrality			
Negara	2001	Negara	2019
Jerman	1,00	Jerman	1,00
Amerika Serikat	0,81	Amerika Serikat	0,92
Perancis	0,77	Inggris	0,89
Inggris	0,77	Uni Ermirat Arab	0,78
Belanda	0,74	Perancis	0,73
Spanyol	0,64	Belanda	0,71
Italia	0,64	Hong Kong	0,68
Jepang	0,63	Italy	0,64
Belgia	0,62	Swedia	0,62
Swiss	0,61	Jepang	0,61

Sumber: Diolah dari data ITC (2022b)

Parameter *eigencentrality* kekuatan negara sebagai aktor sentral dalam sistem perdagangan biji kopi mentah internasional. Nilai *eigencentrality* tidak hanya menunjukkan kedekatan dan besarnya peran negara menjadi penjemabatan antar negara lainnya secara langsung, maupun kedekatan dan perannya secara tidak langsung. Sepanjang 20 tahun terakhir tidak ada satupun negara *bean belt* yang masuk jajaran negara dengan nilai *eigencentrality* tertinggi, yang menunjukkan bahwa kekuatan negara-negara bean belt memang tidak berada pada pasar komoditas biji kopi mentah melainkan hanya pada produksi komoditas tersebut. Pasar biji kopi mentah di tahun 2001 mayoritas didominasi oleh negara-negara dari Eropa, dimana negara-negara dari kawasan Asia dan Timur Tengah kian berperan di pasar komoditas ini pada tahun 2019. Jerman dan Amerika Serikat adalah dua negara dengan *eigencentrality* terbesar sepanjang periode ini, yang berarti besarnya potensi keduanya untuk mempengaruhi struktur dan sistem perdagangan komoditas biji kopi mentah.

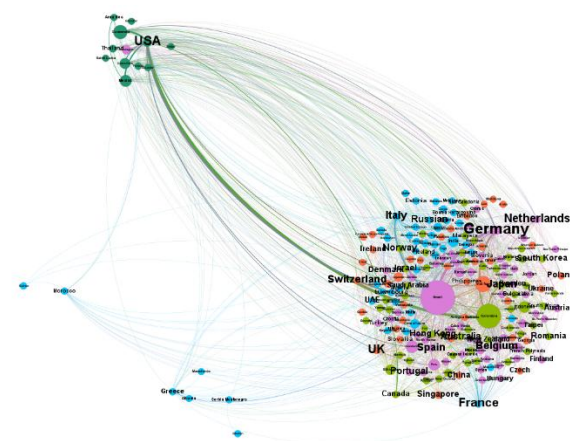
Pergeseran Struktur Perdagangan Biji Kopi Mentah Dunia 2001 Dan 2019

Perdagangan internasional biji kopi mentah di tahun 2001 memperlihatkan nilai *nodes* sebesar 204 dan *edges* 1657, yang nilai ini meningkat menjadi 206 dan 2336 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perdagangan komoditas ini

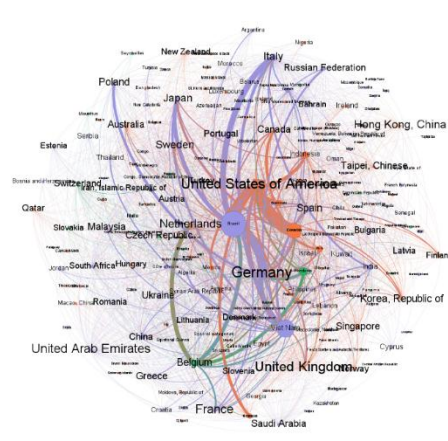
telah terjadi pergeseran jumlah aktor yang terlibat terlebih peningkatan relasi dagang yang terbentuk atau peningkatan 40,977% hubungan relasi perdagangan. Di sisi lain nilai *density* tahun 2001 sebesar 4,00% yang meningkat menjadi 5,50% di tahun 2019, menunjukkan bahwa di dalam pasar perdagangan biji kopi mentah, meskipun tertata adanya peningkatan, namun aktivitas perdagangan masih sangat renggang atau adanya potensi peningkatan sebesar 94,5% dari keseluruhan aktivitas ekspor dan impor. Relasi perdagangan terjauh pada tahun 2001 melintasi 7 negara dan pada 2019 melintasi 6 negara, hal ini menunjukkan bahwa suatu aktivitas perdagangan di komoditas kopi semakin melibatkan sedikit negara dalam satu jalur *supply chain*nya atau negara produsen semakin dekat dengan negara konsumen terakhir.

Pergeseran besar juga terjadi dalam perdagangan komoditas ini di dua dekade terakhir. Nilai *modularity* tahun 2001 sebesar 4 dan pada tahun 2019 sebesar 3, menunjukkan besaran jumlah blok perdagangan yang terbentuk. Di tahun 2001 blok perdagangan pertama terdiri dari 99 negara yang berasal dari seluruh kawasan dunia, umumnya dari kawasan Asia dan Afrika. Negara utama di blok ini adalah: Colombia, Jepang, dan Kanada, dan Indonesia. Blok kedua terdiri dari 38 negara yang umumnya berasal dari kawasan Asia dan Eropa, seperti: Vietnam, Swiss, dan Inggris. Blok ketiga hanya terdiri dari 11 negara dan eksklusif berada di kawasan Amerika, terdiri dari: Amerika Serikat, Guatemala, dan Mexico. Sedangkan blok terakhir terdiri dari 36 negara di kawasan Amerika dan Eropa, seperti: Brazil, Jerman, dan Belgia.

2001



2019



Sumber: Diolah dari data ITC (2022b)

Gambar 2. Jaringan Perdagangan Internasional Komoditas Biji Kopi Mentah 2001 dan 2019

Berbeda dengan blok perdagangan yang terbentuk di tahun 2001 yang erat kaitannya dengan posisi geografis, maka blok perdagangan di tahun 2019 berasal dari lintas kawasan. Blok dagang terbesar di tahun 2019 terdiri dari 110 negara

dengan negara terbesar diantaranya adalah: Brazil, Vietnam, Jerman, dan Italia. Blok dagang terbesar kedua terdiri dari 76 negara yang diantaranya adalah: Amerika Serikat, Colombia, Indonesia, Belanda, Canada dan Inggris. Sedangkan blok terakhir terdiri dari 20 negara Eropa dan Afrika, seperti: Belgia, Honduras, Swiss. Ketiga blok dagang tersebut menunjukkan kedekatan kemitraan ekspor impor di tahun ini lebih bersifat kedekatan politik antar negara dibandingkan kedekatan geografis.

Pemetaan jejaring perdagangan internasional biji kopi mentah di tahun 2001 dan 2019 memperlihatkan pergeseran bentuk struktur perdagangan. Struktur perdagangan pada tahun 2001 memperlihatkan adanya blok-blok dagang yang relatif eksklusif terhadap blok perdagangan lainnya. Meskipun terdapat relasi antar blok dagang, negara importir dan eksportir di suatu blok perdagangan memiliki relasi yang kuat secara di dalam kelompok dagang. Masing-masing negara eksportir cenderung memiliki pasarnya masing-masing, begitu pula sebaliknya dimana negara-negara importir relatif memiliki mitra eksport berbeda untuk mendapatkan pemenuhan suplai biji kopi mentah. Di dalam struktur perdagangan pada tahun 2001 terlihat jelas bahwa negara produsen atau negara *bean belt* pada umumnya mengambil posisi sebagai suplier utama komoditas dan menjadi penyalur komoditas dari negara produsen kecil lainnya. Beberapa negara importir seperti Amerika Serikat dan Jerman yang merupakan negara importir, juga melakukan ekspor terhadap negara lain namun hanya terhadap negara yang bukan merupakan negara produsen kopi.

Struktur perdagangan di tahun 2019 justru bergerak menjadi ke arah pasar persaingan sempurna. Di tahun ini meski terdapat kedekatan blok perdagangan, masing-masing anggota blok perdagangan memiliki relasi yang semakin kuat dengan kelompok lain. Negara *bean belt* yang seharusnya berperan dan unggul sebagai negara produsen biji kopi mentah sekaligus eksportir, kini dihadapkan pada peningkatan kekuatan negara importir yang juga mengambil peran sebagai eksportir di komoditas sama. Tantangan dari negara *non bean belt* hadir karena kemampuan mereka membangun kemitraan dengan negara suplier dan negara konsumen besar maupun kecil. Negara *non bean belt* di tahun ini juga memfasilitasi perpanjangan jalur perdagangan antara negara *bean belt* dengan negara konsumen akhir.

5. PENUTUP

Hasil pemetaan jaringan perdagangan biji kopi mentah tahun 2001 dan 2019 yang dilakukan dalam artikel ini menunjukkan adanya pergeseran struktur perdagangan di periode tersebut. Pergeseran struktur perdagangan ini ditandai dengan pergerakan pasar perdagangan ke arah persaingan sempurna yang kian tajam, pergeseran posisi negara-negara pusat (*core*) dalam struktur perdagangan,

serta semakin senjangnya perbedaan kekuatan dan pengaruh negara-negara *bean belt* dan *non bean belt*. Kondisi ini terjadi karena adanya stagnansi pola perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara *bean belt*. Negara-negara *bean belt* sepanjang dua dekade meski memperlihatkan peningkatan performanya namun sangat fokus berperan sebagai produsen biji kopi mentah serta sebagai eksportir pertama komoditas tersebut. Negara-negara *non bean belt* di waktu yang sama justru memperluas perannya sebagai importir utama sekaligus eksportir biji kopi mentah. Hal ini dilakukan dengan memperluas mitra dan membangun jaringan impor untuk mendapatkan stok suplai biji kopi mentah, di sisi lain mereka juga memperluas mitra serta membangun jaringan ekspor untuk memasarkan stok suplai mereka. Negara-negara *non bean belt* dengan begitu mendapatkan keuntungan ganda berupa keuntungan transaksi aktivitas ekspor dan impor, serta penguasaan global *supply chain* jaringan perdagangan biji kopi mentah.

Negara *bean belt* secara bertahap idealnya butuh mulai membatasi dan mengurangi volume perdagangan biji kopi mentahnya, serta mulai masuk ke pasar biji kopi olahan. Langkah ini dapat dilakukan secara gradual dengan juga melakukan perluasan dan pembangunan jaringan perdagangan di wilayah atau segmen pasar baru. Kerjasama terbatas antara negara produsen untuk menyatukan kepentingan dan mengimbangi kekuatan negara-negara importir juga diperlukan, khususnya kerjasama mengenai penetapan harga, transfer keahlian dan teknologi, serta tata kelola distribusi dan pemasaran. ICO dalam hal ini dapat berperan untuk menjadi jembatan komunikasi antar negara produsen dan konsumen, serta antara negara produsen dan sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniele Giovannucci dan Freek Jan Koekoek. (2003). *The State of Sustainable Coffee: A Study of Twelve Major Markets*. London: International Coffee Organization.
- Emilie M. Hafner-Burton, Miles Kahler, dan Alexander H. Montgomery. (2009). *Network Analysis for International Relations*. *International Organization*, Vol. 63, No. 3 (Summer, 2009). New York: Cambridge University Press.
- International Coffee Organization. (2022a). *Membership Of The International Coffee Organization Under The International Coffee Agreement 2007*. London: ICO. <https://www.ico.org/>
- International Coffee Organization. (2022b). *The International Coffee Organization 1963-2013: 50 Years Serving The World Coffee Community*. London: ICO.

- International Trade Center. (2022a). *List of Exported Products for The Selected Product: Total All Products*. Jenewa: ITC. <https://www.trademap.org/>
- International Trade Center. (2022b). *List of Exported Products for The Selected Product: Coffee, Whether or Not Roasted or Decaffeinated, Coffee Husks and Skins, Coffee Substitutes*. Jenewa: ITC. <https://www.trademap.org/>
- Janina Grabs dan Stefano Ponte. (2019). The Evolution of Power in the Global Coffee Value Chain and Production Network. *Journal of Economic Geography*, Vol. 19, No. 4. Frederiksberg: Copenhagen Business School.
- José G. Vargas-Hernández dan Ignacio Edmundo Valle Ruiz. (2021). Global Trade of Coffee and its Economic Effects in the Value Chain. *Annual Research Journal of Symbiosis Centre for Management Studies*, Vol. 9 (Maret 2021). Pune: Symbiosis Centre for Management Studies.
- Krisztina Pongratz Chander. (2017). The Global Coffee Commodity Chain: Coffee Farmers In Costa Rica, and Its ‘Ups And Downs’. *Journal of Globalization Studies*, Vol. 8, No. 2 (November 2017). Volgograd: Uchitel Publishing House.
- Ookrit Sujaritpong, Sikarin Yoo-Kong, dan Pradeep Bhadola. (2021). Analysis And Dynamics of The International Coffee Trade Network. *Journal of Physics: Conference Series* 1719 (2021) 012106. Bristol: IOP Publishing.
- Rebeca Utrilla-Catalan, *et.all*. (2022). Growing Inequality in the Coffee Global Value Chain:A Complex Network Assessment. *Sustainability* Vol. 14, 672 (Januari 2022). Basel: MDPI.
- Roger J. Nemeth and David A. Smith. (1985). International Trade and World-System Structure: A Multiple Network Analysis. *Review (Fernand Braudel Center) Quantitative Studies of the World System*, Vol. 8, No. 4, (Spring, 1985). New York: Binghamton University.
- Stephen D. Krasner. (1976). State Power and the Structure of International Trade. *World Politics*, Vol. 28, No. 3 (April 1976). New York: Cambridge University Press.
- Thomas Chaney. (2014). The Network Structure of International Trade. *The American Economic Review*, Vol. 104, No. 11 (November 2014). Nashville: American Economic Association.
- Vivek Voora, *et.al*. (2019). *Global Market Report: Coffee (Sustainable Commodities Marketplace Series 2019)*. Manitoba: International Institute for Sustainable Development.

World Bank. (2022). *World Bank Data: Indicator Trade % of Gross Domestic Products*. Washington DC: World Bank.
<https://data.worldbank.org/>